



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

DISUSUN OLEH:

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2022



**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
INSPEKTORAT

Jl. Soekarno Hatta No 59 Kota Mungkid Telpn (0293) 788215
Kode Pos 56511 website: inspektorat.magelangkab.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Kota Mungkid, 24 Maret 2022
INSPEKTUR KABUPATEN MAGELANG

UM HANIYATI CHAULIYANAH, SE
Pemana Tingkat I
NIP. 19640707 199003 2 004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah salah satu kewajiban bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 selanjutnya digunakan sebagai dasar Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan juga sebagai dasar Pemerintah Pusat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang dinilai berkinerja tertinggi terhadap hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) terhadap LPPD.

Demikian LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini disusun, semoga dapat menjadi gambaran capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Magelang Tahun 2021 sekaligus sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah dan pembangunan daerah tahun berikutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kota Mungkid, 28 Maret 2021

The seal of Kabupaten Magelang, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI MAGELANG' and 'MAGELANG'.
BURATI MAGELANG
ZAGNAL ARIFIN, S.I.P.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.1.1. Penjelasan Umum	I-1
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah	I-32
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-57
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	II-1
2.1. Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran	II-2
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-17
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-23
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-24
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	III-1
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-1
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota	III-6
3.3. Permasalahan dan Kendala	III-8
3.4. Saran dan Tindak Lanjut	III-8
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	IV-1
4.1. Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ...	IV-1
4.1.3. Realisasi	IV-1
4.1.4. Alokasi Anggaran	IV-2
4.1.5. Dukungan Personil	IV-2
4.1.6. Permasalahan dan Solusi	IV-3



4.2. Urusan Kesehatan	IV-4
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-4
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ...	IV-4
4.2.3. Realisasi	IV-6
4.2.4. Alokasi Anggaran	IV-7
4.2.5. Dukungan Personil	IV-8
4.2.6. Permasalahan dan Solusi	IV-8
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	IV-9
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-9
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ...	IV-9
4.3.3. Realisasi	IV-10
4.3.4. Alokasi Anggaran	IV-10
4.3.5. Dukungan Personil	IV-10
4.3.6. Permasalahan dan Solusi	IV-11
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	IV-12
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-12
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ...	IV-12
4.4.3. Realisasi	IV-13
4.4.4. Alokasi Anggaran	IV-14
4.4.5. Dukungan Personil	IV-14
4.4.6. Permasalahan dan Solusi	IV-14
4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .	IV-15
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-15
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ...	IV-15
4.5.3. Realisasi	IV-16
4.5.4. Alokasi Anggaran	IV-18
4.5.5. Dukungan Personil	IV-18
4.5.6. Permasalahan dan Solusi	IV-19
4.6. Urusan Sosial	IV-20
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar	IV-20
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah ...	IV-20
4.6.3. Realisasi	IV-21
4.6.4. Alokasi Anggaran	IV-21
4.6.5. Dukungan Personil	IV-22
4.6.6. Permasalahan dan Solusi	IV-22
4.7. Program dan Kegiatan	IV-22
BAB V PENUTUP	V-1



LAMPIRAN

Lampiran 2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (<i>Output</i>)	1
Lampiran 2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil (<i>Outcome</i>)	50
Lampiran 2.2.3.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	79
Lampiran	Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2020	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	I-4
Tabel 1.2.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang	I-4
Tabel 1.3.	Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	I-5
Tabel 1.4.	Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021	I-6
Tabel 1.5.	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021	I-7
Tabel 1.6.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-9
Tabel 1.7.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-11
Tabel 1.8.	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021	I-13
Tabel 1.9.	Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021	I-15
Tabel 1.10.	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-17
Tabel 1.11.	Target dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-19
Tabel 1.12.	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-21
Tabel 1.13.	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-28
Tabel 1.14.	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	I-30
Tabel 1.15.	Integrasi SPM Ke Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.....	I-60
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2021.....	II-1
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	II-2
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	II-17
Tabel 2.4.	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-23
Tabel 2.5.	Interval Nilai dan Predikat Penilaian Realisasi Kinerja ..	II-25
Tabel 2.6.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Pada Indikator Tujuan	II-26
Tabel 2.7.	Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Pada Indikator Sasaran	II-28
Tabel 2.8.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2021.....	II-30
Tabel 2.9.	Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.....	II-31



Tabel 2.10.	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.....	II-36
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2021.....	II-37
Tabel 2.12.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2017-2021	II-38
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021	II-39
Tabel 2.14.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat Tahun 2021	II-39
Tabel 2.15.	Pengeluaran Per Kapita Riil (yang Disesuaikan) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-40
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2021	II-43
Tabel 2.17.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-44
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Daya Saing Daerah Tahun 2021	II-45
Tabel 2.19.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-49
Tabel 2.20.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-50
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2021.....	II-51
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2021.....	II-52
Tabel 2.23.	Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021.....	II-53
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2021.....	II-54
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya Jumlah PMKS Tahun 2021	II-56
Tabel 2.26.	Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021.....	II-56
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2021	II-57
Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Hunian Yang Layak dan Berkualitas Tahun 2021.....	II-60
Tabel 2.29.	Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021...	II-61
Tabel 2.30.	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-61
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021	II-63
Tabel 2.32.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-64
Tabel 2.33.	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-65



Tabel 2.34.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-66
Tabel 2.35.	Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-67
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2021	II-67
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2021	II-68
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2021	II-70
Tabel 2.39.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2021	II-73
Tabel 2.40.	Capaian Kinerja Sasaran StrategisMeningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021	II-75
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021	II-76
Tabel 2.42.	Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021	II-77
Tabel 2.43.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021	II-78
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2021	II-79
Tabel 2.45.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	II-81
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2021	III-3
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2021	III-7
Tabel 4.1.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-1
Tabel 4.2.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-2
Tabel 4.3.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-2
Tabel 4.4.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-5
Tabel 4.5.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-6
Tabel 4.6.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-7
Tabel 4.7.	Tenaga Kesehatan yang Terlibat Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-8
Tabel 4.8.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-91
Tabel 4.9.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-10



Tabel 4.10.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-10
Tabel 4.11.	Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-11
Tabel 4.12.	Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-11
Tabel 4.13.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-13
Tabel 4.14.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-13
Tabel 4.15.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-14
Tabel 4.16.	Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-14
Tabel 4.17.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-16
Tabel 4.18.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-17
Tabel 4.19.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-18
Tabel 4.20.	Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-18
Tabel 4.21.	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-20
Tabel 4.22.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-21
Tabel 4.23.	Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-21
Tabel 4.24.	Program dan Kegiatan yang Terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Magelang Tahun 2021	IV-23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-38
Gambar 2.2.	Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2017-2021	II-40
Gambar 2.3.	Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional 2017-2021	II-41
Gambar 2.4.	Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Maret 2021)	II-42
Gambar 2.5.	PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020	II-48
Gambar 2.6	PDRB Perkapita kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu Tahun 2020	II-48
Gambar 2.7	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-52
Gambar 2.8	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-53
Gambar 2.9.	Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021	II-55
Gambar 2.10	Perbandingan TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-64



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbaikan kinerja pemerintah daerah menduduki posisi penting dalam strategi pemberdayaan pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah dan mewujudkan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Perbaikan kinerja pemerintah daerah dapat menciptakan pelaksanaan otonomi daerah yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan tata pemerintahan yang baik. Perbaikan kinerja pemerintah daerah tersebut mewajibkan kepala daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan guna mencapai *good governance*.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengacu ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan LPPD kabupaten/kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.1.1. Penjelasan Umum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.



a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Dalam penyusunan dan penyampaian LPPD ini, sejumlah aturan perundangan digunakan sebagai landasan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



b. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah menurut BPS seluas 108.573 hektar atau sekitar 3,34 % dari luas Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan yang digunakan dalam penyusunan revisi RTRW Kabupaten Magelang, luas wilayah Kabupaten Magelang kurang lebih adalah 112.926,4 hektar. Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara $110^{\circ}01' 51''$ - $110^{\circ}26'58''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}19'13''$ - $7^{\circ}42'16''$ Lintang Selatan, dengan batas-batas Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah selatan : Kabupaten Purworejo dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo

sedangkan di tengahnya terdapat Kota Magelang

Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada di antara jalur pantura dengan jalur selatan-selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang-Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 adalah 1.311.044 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (111.044 jiwa) kemudian Kecamatan Grabag (95.015 jiwa) dan Secang (82.879 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.690 jiwa).



Tabel 1.1.
Jumlah Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Tahun 2021
1	Salaman	37,940	37,427	75,367
2	Borobudur	32,228	31,766	63,994
3	Ngluwar	16,335	16,355	32,690
4	Salam	24,070	24,031	48,101
5	Srumbung	24,590	24,487	49,077
6	Dukun	23,666	23,592	47,258
7	Sawangan	29,198	28,766	57,964
8	Muntilan	40,040	40,003	80,043
9	Mungkid	37,124	37,239	74,363
10	Mertoyudan	55,092	55,912	111,004
11	Tempuran	26,759	26,135	52,894
12	Kajoran	31,115	30,238	61,353
13	Kaliangkrik	31,267	29,907	61,174
14	Bandongan	31,728	30,598	62,326
15	Candimulyo	25,642	25,064	50,706
16	Pakis	28,334	27,228	55,562
17	Ngablak	21,567	20,760	42,327
18	Grabag	48,177	46,928	95,105
19	Tegalrejo	27,300	26,606	53,906
20	Secang	41,524	41,355	82,879
21	Windusari	27,268	25,683	52,951
		660.694	650.080	1.311.044

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Tabel 1.2.
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Magelang

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Magelang		
		2019	2020	2021
1	Salaman	20	20	20
2	Borobudur	20	20	20
3	Ngluwar	8	8	8
4	Salam	12	12	12
5	Srumbung	17	17	17
6	Dukun	15	15	15
7	Muntilan	14	14	14
8	Mungkid	16	16	16
9	Sawangan	15	15	15
10	Candimulyo	19	19	19
11	Mertoyudan	13	13	13
12	Tempuran	15	15	15
13	Kajoran	29	29	29
14	Kaliangkrik	20	20	20
15	Bandongan	14	14	14
16	Windusari	20	20	20
17	Secang	20	20	20
18	Tegalrejo	21	21	21
19	Pakis	20	20	20
20	Grabag	28	28	28
21	Ngablak	16	16	16
		372	372	372

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2022



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dibentuk perangkat daerah yang meliputi:

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah berjumlah 18
5. Badan Daerah berjumlah 3
6. Kecamatan berjumlah 21
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
9. RSUD Muntilan.

Adapun jumlah PNS Kabupaten Magelang sampai dengan akhir tahun 2021 sejumlah 7.440 orang.

Tabel 1.3.
Kondisi PNS Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Golongan	Tahun				
		2017*	2018	2019	2020	2021
1	I	170	145	140	123	100
2	II	1.380	1.226	1.166	1061	1.212
3	III	4.469	4.450	4.380	4197	4.212
4	IV	3.209	2.798	2.571	2240	1.916
Jumlah		9.229	8.619	8.257	7.621	7.440

* Pengambilan data Tahun 2017 diambil per 1 Januari 2018

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan jumlah PNS sejak tahun 2017 sampai dengan 2021 dengan rata-rata penurunan tiap tahun sejumlah 447. Adapun penyebab penurunan ini adalah PNS memasuki masa purna tugas, meninggal dunia, pensiun atas permintaan sendiri, pengalihan PNS guru SLB dan SMA/SMK menjadi PNS Provinsi, dan adanya mutasi ke luar daerah.

Pada tahun 2021 komposisi pendidikan PNS Kabupaten Magelang didominasi oleh lulusan S1/D-IV, dengan persentase sebesar 55,94%, kemudian lulusan D-III sebesar 16,03%, lulusan SMA sebesar 13,06%, lulusan S2 sebesar 7,38%, lulusan D-II sebesar 3,91%, lulusan SMP sebesar 2,07%, lulusan SD sebesar 0,71%, serta lulusan D-I sebesar 0,62%.



Tabel 1.4.
Komposisi Pendidikan PNS Kabupaten Magelang
Tahun 2017 - 2021

No	Pendidikan	Tahun									
		2017		2018		2019		2020		2017	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	S3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	S2	291	192	277	196	273	199	289	230	280	269
3	S1/D-IV	1885	3176	1730	3042	1641	2963	1500	2826	1393	2769
4	D -III	232	773	222	779	198	806	179	820	234	979
5	D - II	203	405	175	370	159	327	118	232	94	197
6	D - I	30	91	23	82	17	67	10	61	7	39
7	SMA	912	644	795	579	775	540	691	419	616	356
8	SMP	263	19	235	17	191	14	166	13	144	10
9	SD	108	4	91	5	73	4	63	4	51	2
Jumlah		3924	5304	3549	5070	3327	4390	3016	4605	2819	4621
		9.228		8.619		8.257		7.621		7.440	

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2022

- f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1) Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan
a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketentuan terkait pendapatan asli daerah mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan RKPD Tahun 2021 yang diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus dalam mendukung kondisi perekonomian yang lebih berkualitas dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.



Tabel 1.5
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Asli Daerah	361.937.105.587,00	375.378.465.373,00	103,71	329.769.193.224,00	13,83
2	Pendapatan Transfer	1.997.640.363.927,00	1.982.641.210.547,00	99,25	1.940.323.473.805,00	2,18
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	114.225.540.000,00	111.484.639.179,00	97,60	110.365.013.575,00	1,01
	JUMLAH	2.473.803.009.514,00	2.469.504.315.099,00	99,83	2.380.457.680.604,00	3,74

Data per 17 Februari 2022, Unaudited

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



Dari Tabel 1.5 di atas tampak bahwa realisasi realiasi Pendapatan Daerah pada tahun 2021 lebih rendah dari targetnya yaitu 0,17%. Berdasarkan Tabel 1.5 di atas, realisasi pendapatan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah meliputi pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sejumlah Rp361.937.105.587,00 realisasi PAD sejumlah Rp375.378.439.003,00 atau 103,71%, realisasi tersebut lebih tinggi 13,83% dibanding realisasi tahun 2020. Realisasi PAD 2021 berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 15,20%. Adapun rincian realisasi PAD sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 1.6.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Pajak Daerah	112.347.877.077,00	120.093.411.768,00	106,89	115.530.759.532,00	3,95
2	Hasil Retribusi Daerah	15.577.421.886,00	21.156.190.869,00	135,81	27.049.700.014,00	(21,79)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.715.782.927,00	26.880.782.928,00	100,62	30.637.364.531,00	(12,26)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	207.296.023.697,00	207.248.079.808,00	99,98	156.551.369.147,00	32,38
	JUMLAH	361.937.105.587,00	375.378.465.373,00	103,71	329.769.193.224,00	13,83

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



a) Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Khusus untuk Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Rincian target dan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2020 dan realisasi tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 1.7.
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang
 Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pajak Hotel	7.869.613.503,00	8.460.263.054,00	107,51	9.313.371.310,00	(9,16)
2	Pajak Restoran	13.248.186.894,00	15.000.679.717,00	113,23	13.304.010.466,00	12,75
3	Pajak Hiburan	1.022.482.404,00	828.393.843,00	81,02	1.611.029.293,00	(48,58)
4	Pajak Reklame	1.109.814.945,00	1.167.509.338,00	105,20	1.109.814.945,00	5,20
5	Pajak Penerangan Jalan	33.876.609.315,00	35.141.205.727,00	103,73	32.989.571.766,00	6,52
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000.000,00	3.272.820.406,00	65,46	9.557.585.826,00	(65,76)
7	Pajak Parkir	844.917.390,00	860.039.012,00	101,79	785.319.312,00	9,51
8	Pajak Air Tanah	899.465.360,00	922.282.300,00	102,54	752.135.620,00	22,62
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	32.000.000.000,00	33.605.694.756,00	105,02	31.505.074.451,00	6,67
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	16.476.787.266,00	20.834.523.615,00	126,45	14.602.846.543,00	42,67
	JUMLAH	112.347.877.077,00	120.093.411.768,00	106,89	115.530.759.532,00	3,95

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



b) Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi berasal dari hasil pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dasar Pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Rincian target dan realisasi penerimaan Pajak Daerah pada tahun 2020 dan realisasi tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 1.8.
 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Magelang
 Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Retribusi Jasa Umum	11.246.099.109,00	16.843.632.192,00	149,77	22.146.998.820,00	(23,95)
2	Retribusi Jasa Usaha	3.565.510.357,00	3.456.776.177,00	96,95	3.563.807.554,00	(3,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	765.812.420,00	855.782.500,00	111,75	1.338.893.640,00	(36,08)
	JUMLAH	15.577.421.886,00	21.156.190.869,00	135,81	27.049.700.014,00	(21,79)

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penerimaan PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diatur dalam:
- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang.
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang.
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang.
 - 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp26.715.782.927,00 dan realisasi terealisasi sebesar Rp26.880.782.928,00. Sumber pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai berikut:



Tabel 1.9.
Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Magelang
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi tahun 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Lembaga Keuangan	23.125.458.827,00	23.125.458.828,00	100,00		
2	Perusahaan Daerah BPR Bapas 69				18.406.891.686,00	(100,00)
3	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	3.590.324.100,00	3.755.324.100,00	104,60	3.984.492.600,00	(5,75)
4	Perusahaan Daerah Aneka Usaha				112.427.800,00	(100,00)
5	BPR / BKK				1.234.382.801,00	(100,00)
6	Bank Jawa Tengah				6.896.787.559,00	(100,00)
7	PD BKK Tempuran				0,00	
8	PT. PRPP Jateng				2.382.085,00	(100,00)
	JUMLAH	26.715.782.927,00	26.880.782.928,00	100,62	30.637.364.531,00	(12,26)

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Jumlah tersebut merupakan realisasi Lain-lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 yang menampung penerimaan pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam kategori pajak daerah maupun retribusi daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:

- 1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) hasil kerja sama daerah;
- 4) jasa giro;
- 5) hasil pengelolaan dana bergulir;
- 6) pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang milik daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- 7) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 8) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 9) pendapatan denda pajak daerah;
- 10) pendapatan denda retribusi daerah;
- 11) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 12) pendapatan atas pengembalian;
- 13) pendapatan dari BLUD; dan
- 14) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian target dan realisasi lain-lain PAD yang sah tahun 2020 dan realisasi tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 1.10.
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Magelang
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	580.250.000,00	635.172.561,00	109,47	244.818.500,00	159,45
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.027.529.607,00	1.781.452.341,00	87,86		
3	Hasil Kerja Sama Daerah	495.021.000,00	1.097.680.955,00	221,74		
4	Penerimaan Jasa Giro	4.326.626.597,00	5.059.274.453,00	116,93	5.947.674.890,00	(14,94)
5	Pendapatan Bunga Deposito	6.102.739.724,00	8.160.958.879,00	133,73	13.458.093.813,00	(39,36)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	10.000.000,00	21.222.558,00	212,23		
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	83.499.430,00		449.265.779,00	(81,41)
8	Pendapatan Denda Pajak	82.006.507,00	123.792.545,00	150,95	136.362.015,00	(9,22)
9	Pendapatan Denda Retribusi	402.030.391,00	427.633.200,00	106,37	261.856.248,00	63,31
10	Pendapatan dari pengembalian Lainnya	1.474.303.562,00	1.592.963.847,00	108,05	2.975.769.760,00	(46,47)
11	Lain-Lainnya Pendapatan (BLUD)	191.795.516.309,00	188.264.429.039,00	98,16	131.655.160.565,00	43,00
12	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya				446.558.414,00	(100,00)
13	Kontribusi Air PDAM ke Desa				955.309.163,00	(100,00)
14	Hasil Penjualan Pertanian				20.500.000,00	(100,00)
	JUMLAH	207.296.023.697,00	207.248.079.808,00	99,98	156.551.369.147,00	32,38

Data per 17 Februari 2022 *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:

- a) Transfer Pemerintah Pusat
 - i) Dana Perimbangan, terdiri atas:
 - (1) Dana Bagi Hasil, terdiri atas bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam.
 - (2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - (3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Fisik dan Dana Alokasi Non Fisik.
 - ii) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
 - iii) Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv) Dana Keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v) Dana Desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Transfer Antar Daerah
 - i) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam bentuk bantuan keuangan umum dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan bantuan keuangan khusus yaitu untuk tujuan tertentu. Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (1) Bantuan keuangan dari daerah provinsi; dan
 - (2) Bantuan keuangan dari daerah kabupaten/ kota.

Pendapatan transfer tahun anggaran 2021 ditargetkan senilai Rp1.997.640.363.927,00 terealisasi sebesar Rp1.982.641.210.547,00 atau 99,25%. Kontribusinya terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar 80,28%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 kontribusi terhadap pendapatan mengalami penurunan sebesar 1,23%. Adapun rincian realisasi pendapatan transfer sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 1.11.
Target dan Realisasi Pendapatan Dana Transfer Kabupaten Magelang
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
A	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.812.454.420.349,00	1.797.468.218.695,00	99,17	1.781.723.641.760,00	0,88
1	Dana Perimbangan	1.393.467.735.349,00	1.378.481.533.695,00	98,92	1.331.514.071.778,00	3,53
a	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	34.554.688.000,00	45.715.118.226,00	132,30	34.364.292.995,00	33,03
b	Dana Alokasi Umum	975.017.297.000,00	975.017.297.000,00	100,00	987.675.947.000,00	(1,28)
c	Dana Alokasi Khusus	383.895.750.349,00	357.749.118.469,00	93,19	309.473.831.783,00	15,60
2	Dana Insentif Daerah	27.942.576.000,00	27.942.576.000,00	100,00	59.165.462.000,00	(52,77)
3	Dana Desa	391.044.109.000,00	391.044.109.000,00	100,00	391.044.107.982,00	0,00
B	Pendapatan Transfer Antar Daerah	185.185.943.578,00	185.172.991.852,00	99,99	158.599.832.045,00	16,75

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*
Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Mengacu pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri atas:

a) Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri dan luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Antara lain pendapatan hibah dana BOS dan pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2021 sebesar Rp111.484.639.179,00 atau 97,60%. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan daerah sebesar 4,51%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp1.119.625.604,00 atau 1,01%.



Tabel 1.12.
Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Magelang
Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendapatan Hibah	21.675.800.000,00	18.895.525.379,00	87,17	110.365.013.575,00	(82,88)
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	92.549.740.000,00	92.589.113.800,00	100,04		
	JUMLAH	114.225.540.000,00	111.484.639.179,00	97,60	110.365.013.575,00	1,01
	Pendapatan Hibah	21.675.800.000,00	18.895.525.379,00	87,17	110.365.013.575,00	(82,88)

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



2) Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan prioritas dan program strategis pembangunan secara efisien, efektif, selektif, akuntabel dan transparan serta mengacu pada RKPD. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan jangka menengah daerah melalui sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja pegawai ASN.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya dan honorarium yang selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.



2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam:

a) Belanja Barang

Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.

b) Belanja Jasa

Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.

c) Belanja Pemeliharaan

Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah, belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan kendaraan bermotor.

d) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.



e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam bentuk:

- (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- (2) penghargaan atas suatu prestasi;
- (3) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- (4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Transfer ke daerah dan dana desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau;
- (7) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.



5) Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada: pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, Badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia serta partai politik.

6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.



Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak meliputi:

- 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan, dan/atau;
- 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.



d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/ atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer terdiri dari:

- 1) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan, diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Belanja Daerah tahun 2021 ditargetkan sejumlah Rp2.745.790.865.616,00. Realisasi belanja daerah sejumlah Rp2.412.937.344.233,00 atau 87,88% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 terdapat kenaikan sebesar Rp108.561.427.072,00 atau 4,71%.

Rincian lebih lanjut target dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 1.13.
 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Magelang
 Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	BELANJA OPERASI	1.731.789.911.434,00	1.470.124.919.809,00	84,89	1.357.596.932.757,00	8,29
a	Belanja Pegawai	984.809.751.767,00	872.000.973.628,00	88,55	795.312.940.429,00	9,64
b	Belanja Barang dan Jasa	640.308.793.467,00	496.762.849.640,00	77,58	495.959.581.668,00	0,16
c	Belanja Hibah	100.811.891.200,00	95.879.446.541,00	95,11	55.687.000.660,00	72,18
d	Belanja Bantuan Sosial	5.859.475.000,00	5.481.650.000,00	93,55	10.637.410.000,00	(48,47)
2	BELANJA MODAL	288.096.259.923,00	251.160.713.253,00	87,18	214.407.058.402,00	17,14
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	83.831.960.369,00	50.039.581.363,00	59,69	64.637.965.303,00	(22,58)
4	BELANJA TRANSFER	642.072.733.890,00	641.612.129.808,00	99,93	667.733.960.699,00	(3,91)
TOTAL BELANJA DAERAH		2.745.790.865.616,00	2.412.937.344.233,00	87,88	2.304.375.917.161,00	4,71

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



3) Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan umum pembiayaan daerah terdiri dari kebijakan dan rencana penerimaan pembiayaan daerah serta kebijakan dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah netto ditargetkan sejumlah Rp271.987.856.102,00 terealisasi Rp271.987.856.102,00. Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 1.14.
 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Magelang
 Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Uraian	Target TA 2021	Realisasi			% Kenaikan dari realisasi TA 2020
			TA 2021 <i>Unaudited</i>	%	TA 2020 <i>Audited</i>	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah					
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	287.691.856.102,00	287.691.856.102,00	100,00	218.814.092.659,00	31,48
b	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman					
	JUMLAH	287.691.856.102,00	287.691.856.102,00	100,00	218.814.092.659,00	31,48
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah					
a	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	0,00	
b	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.704.000.000,00	5.704.000.000,00	100,00	7.204.000.000,00	(20,82)
	JUMLAH	15.704.000.000,00	15.704.000.000,00	100,00	7.204.000.000,00	117,99
TOTAL PEMBIAYAAN NETTO		271.987.856.102,00	271.987.856.102,00	100,00	211.610.092.659,00	28,53

Data per 17 Februari 2022, *Unaudited*
 Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022



a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran 2021 yang didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. Penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2021 alokasi ditargetkan sejumlah Rp287.691.856.102,00 terealisasi sejumlah Rp287.691.856.102,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2020, mengalami kenaikan sebesar Rp68.877.763.443,00 atau 31,48%.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang diarahkan untuk Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal. Pembentukan Dana Cadangan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dana Cadangan Pemilihan Bupati Magelang Tahun 2024 sedangkan penyertaan modal dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sejumlah Rp15.704.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp15.704.000.000,00 atau 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2020, terdapat kenaikan sejumlah Rp8.500.000.000,00 atau 117,99%.

Secara keseluruhan, realisasi Total Pembiayaan Netto pada tahun 2021 lebih tinggi dari realisasi tahun 2020 sebesar 28,53%. Dengan Nilai SILPA pada tahun 2021 sebesar Rp328.554.826.968,00 dan tahun 2020 sebesar Rp287.691.856.102,00 lebih tinggi dari SILPA tahun 2020 sebesar Rp40.862.970.866,00 atau sebesar 10%.



1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Secara umum permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing urusan pemerintahan di Kabupaten Magelang dikelompokkan dalam 6 (enam) bidang permasalahan:

- 1) Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kehidupan Beragama
 - a) Urusan Pendidikan
 - i) Rendahnya APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket;
 - ii) Rendahnya APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Paket;
 - iii) Masih rendahnya partisipasi pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs);
 - iv) Kurangnya kualitas dan kuantitas guru;
 - v) Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - vi) Kurangnya sarana prasana pendidikan.
 - b) Urusan Kesehatan
 - i) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB);
 - ii) Kurangnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat;
 - iii) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana kesehatan;
 - iv) Tingginya prosentase balita gizi buruk.
 - c) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - i) Kurangnya pemberdayaan perempuan;
 - ii) Belum optimalnya upaya perlindungan anak.
 - d) Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 - i) Tingginya laju pertumbuhan penduduk.
 - e) Urusan Sosial
 - i) Banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - ii) Belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana keagamaan.
 - iii)



- f) Urusan Kebudayaan
 - i) Kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian budaya;
 - ii) Kurangnya perhatian, perlindungan dan pelestarian terhadap benda cagar budaya.
 - g) Urusan Pemuda dan Olah Raga
 - i) Terbatasnya sarana dan prasarana keolahragaan.
 - h) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - i) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat perdesaan;
 - ii) Tingginya angka kemiskinan;
 - iii) Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan terkait pengentasan kemiskinan.
 - i) Urusan Perpustakaan
 - i) Terbatasnya sarana, prasarana perpustakaan daerah;
 - ii) Rendahnya minat baca masyarakat.
 - j) Urusan Ketrasmigrasian
 - i) Rendahnya keinginan untuk bertransmigrasi.
- 2) Permasalahan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Lokal yang Berdaya Saing
- a) Urusan Ketenagakerjaan
 - i) Tingginya angka pengangguran.
 - b) Urusan Penanaman Modal
 - i) Rendahnya daya saing daerah;
 - ii) Belum optimalnya kewenangan pelayanan perijinan penanaman modal;
 - iii) Belum optimalnya jumlah dan nilai investasi berskala nasional/PMDN;
 - iv) Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
 - c) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - i) Rendahnya pengelolaan manajemen koperasi;
 - ii) Rendahnya SDM usaha kecil dan menengah;
 - iii) Kurangnya akses permodalan;
 - iv) Terbatasnya akses dan informasi pasar;
 - v) Belum adanya pusat perdagangan bersama/UMKM center.
 - d) Urusan Ketahanan Pangan
 - i) Belum optimalnya upaya-upaya penganeekaragaman bahan pangan;
 - ii) Belum optimalnya upaya-upaya pengamanan pangan.



- e) Urusan Pertanian
 - i) Semakin meningkatnya kebutuhan pemenuhan pangan masyarakat;
 - ii) Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke non pertanian;
 - iii) Rendahnya daya saing produk-produk pertanian;
 - iv) Rendahnya akses pasar komoditas pertanian bagi petani dan kelompok tani;
 - v) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani;
 - vi) Belum optimalnya pengembangan potensi peternakan.
 - f) Urusan Pariwisata
 - i) Kurangnya sarana dan prasarana pariwisata;
 - ii) Kurangnya SDM pelaku pariwisata;
 - iii) Kurangnya manajemen pengelolaan pariwisata.
 - g) Urusan Perikanan
 - i) Belum optimalnya pengembangan potensi perbenihan ikan darat.
 - h) Urusan Perdagangan
 - i) Terbatasnya sarana prasarana perdagangan yang memadai.
 - i) Urusan Perindustrian
 - i) Kurangnya daya saing produk industri kecil dan menengah;
 - ii) Terbatasnya SDM;
 - iii) Kurangnya akses permodalan industri;
 - iv) Belum teridentifikasikannya keunggulan spasial untuk meningkatkan daya saing daerah.
- 3) Permasalahan Pembangunan Prasarana dan Sarana Daerah
- a) Urusan Pekerjaan Umum
 - i) Rendahnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan infrastruktur untuk memperlancar akses perekonomian di perkotaan dan pedesaan;
 - ii) Adanya kerusakan jalan dan jembatan;
 - iii) Rasio jaringan irigasi yang masih relatif kecil dan adanya kerusakan bangunan irigasi akibat dari letusan Gunung Merapi;
 - iv) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.



- b) Urusan Perumahan
 - i) Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna air bersih yang layak dan berkelanjutan;
 - ii) Rendahnya cakupan akses rumah tangga pengguna sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
 - iii) Masih terdapat lingkungan permukiman kumuh yang tersebar di semua kecamatan;
 - iv) Tingginya angka rumah tidak layak huni.
 - c) Urusan Perhubungan
 - i) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang perhubungan.
 - d) Urusan Energi dan Sumber Daya
 - i) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan.
- 4) Permasalahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelestarian Lingkungan Hidup
- a) Urusan Penataan Ruang
 - i) Penambangan tidak berijin;
 - ii) Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak berijin;
 - iii) Banyaknya bangunan di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Merapi.
 - b) Urusan Penataan Ruang
 - i) Masih rendahnya cakupan wilayah pelayanan persampahan;
 - ii) Rasio TPS yang masih rendah;
 - iii) Kerusakan lingkungan akibat bencana alam;
 - iv) Kerusakan lingkungan akibat pencemaran lingkungan.
 - c) Urusan Kehutanan
 - i) Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam dukungan penyelamatan, pemulihan, pemeliharaan dan pemberdayaan hutan.
- 5) Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan
- a) Urusan Perencanaan Pembangunan
 - i) Belum optimalnya proses dan mekanisme pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang demokratis, partisipatif, aspiratif, transparan dan akuntabel.
 - b) Urusan Pertanahan
 - i) Banyaknya kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.
 - c) Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - i) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.



- d) Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 - i) Kurang efektif dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
 - ii) Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan aset daerah.
- e) Urusan Statistik
 - i) Kurangnya sinkronisasi data statistik pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki SKPD dan instansi pemerintah.
- f) Urusan Kearsipan
 - i) Rendahnya SDM pengelolaan kearsipan.
- g) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - i) Terbatasnya akses informasi yang didapat masyarakat;
 - ii) Kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola komunikasi dan informatika.
- 6) Permasalahan Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat.
 - a) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
 - i) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat;
 - ii) Belum optimalnya pengendalian terhadap kondisi rawan bencana;
 - iii) Kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - iv) Terbatasnya anggaran, personil dan perlengkapan penegakan hukum;
 - v) Meningkatnya potensi kerawanan keamanan, ketertiban terkait dengan perubahan sosial, pengangguran dan berkembangnya paham ekstrim (terorisme).

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, visi Bupati dan Wakil Bupati Magelang periode tahun 2019-2024 adalah:



“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera,
Berdaya Saing dan Amanah”
(SEDAYA AMANAH)

Visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 sebagaimana tersebut di atas mengandung tiga kata kunci yaitu Sejahtera, Berdaya Saing, dan Amanah disingkat menjadi “Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa Jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

- 1) SEJAHTERA adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi Jawa adalah *wareg*, *wutuh*, *waras* dan *wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.
- 2) BERDAYA SAING adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
- 3) AMANAH adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Magelang tahun 2019-2024, maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dijabarkan dalam misi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.

Salah satu indikator tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah tercapainya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen yang sangat menentukan tercapainya peningkatan IPM adalah luasnya jangkauan akses pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.

Komponen pendidikan dalam mewujudkan peningkatan IPM dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan pendidikan. Komponen kesehatan dilakukan melalui peningkatan kinerja pembangunan kesehatan. Sementara komponen daya beli masyarakat dilakukan melalui penurunan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), peningkatan ketahanan pangan daerah dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Adapun untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang berakhlak mulia dilakukan dengan peningkatan kualitas kehidupan beragama yang mencakup sarana prasarana publik terkait peribadatan dan perhatian pemerintah daerah terhadap para pelaku pembinaan masyarakat baik organisasi kemasyarakatan maupun pribadi masyarakat.

- 2) Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Misi kedua ini akan mewujudkan kondisi masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih maju dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Untuk mencapai kondisi tersebut diwujudkan melalui pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai pembangunan ekonomi adalah dengan meningkatkan daya saing kemampuan ekonomi daerah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan ekonomi antara lain pengembangan pertanian, pariwisata dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pengembangan sarana dan prasarana publik, serta pengembangan kepemudaan dan olah raga.



Sedangkan upaya dalam mencapai pembangunan wilayah berkelanjutan dilakukan dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur wilayah. Beberapa program prioritas dalam mendukung pembangunan infrastuktur wilayah berkelanjutan adalah pengembangan sarana dan prasarana publik dan pelestarian lingkungan hidup.

3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Misi ini menunjukkan adanya keinginan kuat Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik, dan bersih. Pada periode yang lalu tata kelola pemerintahan Kabupaten Magelang telah berjalan dengan baik yang diindikasikan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan daerah. Dalam periode 2019-2024 tata kelola pemerintahan yang amanah dilaksanakan dengan reformasi birokrasi secara optimal.

Reformasi birokrasi ke depan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang semakin transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel. Pelayanan publik yang transparan dan akuntabel akan diwujudkan dengan *smart regency* dimana pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diakses dan dikontrol oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang partisipatif dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan dengan berbagai media. Sedangkan pelayanan publik yang inovatif dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara profesional serta optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan pembangunan.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019–2024 dengan uraian program sebagai berikut:

- 1) Program Pengelolaan Pendidikan
- 2) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
- 3) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 5) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman



- 6) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
- 7) Program Peningkatan Sumber Daya Air
- 8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- 9) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- 10) Program Pengembangan Permukiman
- 11) Program Penataan Bangunan Gedung
- 12) Program Penyelenggaraan Jalan
- 13) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- 14) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 15) Program Pengembangan Perumahan
- 16) Program Kawasan Permukiman
- 17) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
- 18) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
- 19) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 20) Program Penanggulangan Bencana
- 21) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
- 22) Program Pemberdayaan Sosial
- 23) Program Rehabilitasi Sosial
- 24) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 25) Program Penanganan Bencana
- 26) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 27) Program Penempatan Tenaga Kerja
- 28) Program Hubungan Industrial
- 29) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 30) Program Perlindungan Perempuan
- 31) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
- 32) Program Perlindungan Khusus Anak
- 33) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 34) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 35) Program Pengawasan Keamanan Pangan
- 36) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 37) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 38) Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (Kehati)
- 39) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)



- 40) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 41) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal MHA yang Berkaitan dengan PPLH
- 42) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 43) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 44) Program Pengelolaan Persampahan
- 45) Program Pendaftaran Penduduk
- 46) Program Pencatatan Sipil
- 47) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
- 48) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- 49) Program Peningkatan Kerjasama Desa
- 50) Program Administrasi Pemerintahan Desa
- 51) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- 52) Program Pengendalian penduduk
- 53) Program Pembinaan Keluarga Berencana
- 54) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAAJ) Program Informasi dan Komunikasi Publik
- 55) Program Aplikasi Informatika
- 56) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- 57) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
- 58) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- 59) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- 60) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 61) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 62) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- 63) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 64) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- 65) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- 66) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 67) Program Pengembangan Kebudayaan Perpustakaan
- 68) Program Pembinaan Perpustakaan
- 69) Program Pengelolaan Arsip
- 70) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- 71) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 72) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 73) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata



- 74) Program Pemasaran Pariwisata
- 75) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif
- 76) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 77) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 78) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- 79) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- 80) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- 81) Program Perizinan Usaha Pertanian
- 82) Program Penyuluhan Pertanian
- 83) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
- 84) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 85) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- 86) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
- 87) Program Perencanaan dan Pengembangan Industri
- 88) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- 89) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- 90) Program Perekonomian dan Pembangunan
- 91) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 92) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 93) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 94) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 95) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
- 96) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 97) Program Kepegawaian Daerah
- 98) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 99) Program Penyelenggaraan Pengawasan
- 100) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Asistensi
- 101) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 102) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- 103) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 104) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 105) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- 106) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
- 107) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakatan
- 108) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 109) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan Mendasarkan kerangka pendanaan tahun 2021, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

Rencana program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan SMP, Pengelolaan PAUD, Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.

ii) Program Pendidikan dan Tenaga Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidikan serta tenaga kependidikan.

b) Kesehatan

Rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

i) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP, Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten.

ii) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah.

iii) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan *Post Market* pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.



- iv) Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan
Program ini diarahkan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah.
- c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
 - i) Program Peningkatan Sumber Daya Air
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS), Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Hektar.
 - ii) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
 - iii) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - iv) Program Pengembangan Permukiman
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah.
 - v) Program Penataan Bangunan Gedung
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
 - vi) Program Penyelenggaraan Jalan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten.
 - vii) Program Pengembangan Jasa Konstruksi
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
 - viii) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah, Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.



d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

ii) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan pada kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

iii) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten.

iv) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

e) Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

ii) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

iii) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran.



f) Sosial

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

ii) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

iii) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten.

iv) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

ii) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

iii) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan.



b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten.

ii) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan.

iii) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha.

iv) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak.

c) Pangan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.

ii) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

iii) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar.

d) Lingkungan Hidup

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

ii) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.



- iii) Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (Kehati)
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
 - iv) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3.
 - v) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH.
 - vi) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal MHA yang Berkaitan dengan PPLH
Program ini diarahkan pada kegiatan engakuan dan peningkatan kapasitas MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH.
 - vii) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup.
 - viii) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
 - ix) Program Pengelolaan Persampahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Sampah.
- e) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
- i) Program Pendaftaran Penduduk
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
 - ii) Program Pencatatan Sipil
Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.



iii) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan pemanfaatan dan Penyajian *Database* Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

iv) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

f) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa.

ii) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

iii) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pengendalian penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

ii) Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan.



h) Perhubungan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAAJ) yang diarahkan pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

i) Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

ii) Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Pengelolaan *e-government*.

j) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi.

ii) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.

iii) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

iv) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

k) Penanaman Modal

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu.



- ii) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - iii) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi.
- l) Kepemudaan dan Olahraga
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
- i) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan, dan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan.
 - ii) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
 - iii) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.
- m) Statistik
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektorale yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektorale.
- n) Persandian
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah.
- o) Kebudayaan
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Kebudayaan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten.
- p) Perpustakaan
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan Perpustakaan yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten, dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten.



q) Kearsipan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Pengelolaan Arsip yang diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.

ii) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penebaran Benih di Perairan Umum.

iii) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan.

b) Pariwisata

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, dan Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

ii) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata.

iii) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Kekayaan Hal Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

iv) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.



c) Pertanian

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

- i) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme dan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan Dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijau Pakan Ternak.
- ii) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, dan Pembangunan Prasarana Pertanian, dan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
- iii) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan.
- iv) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
- v) Program Perizinan Usaha Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian, Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, dan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan.
- vi) Program Penyuluhan Pertanian
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.



d) Perdagangan

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya.

ii) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan.

iii) Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

iv) Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal.

e) Perindustrian

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Perencanaan dan Pengembangan Industri yang diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri.

f) Transmigrasi

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang diarahkan pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk.

4) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a) Unsur Pendukung

Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:

i) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitas Kerja Sama Daerah, Fasilitas dan Koordinasi Hukum, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

ii) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.



- iii) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program ini diarahkan pada kegiatan Penataan Organisasi, Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah.
 - iv) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program ini diarahkan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD.
- b) Unsur Penunjang
- Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
- i) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - ii) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA, dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 - iii) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - iv) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - v) Program Kepegawaian Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, serta Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.



- vi) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program ini diarahkan pada kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
- c) Unsur Pengawas
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
- i) Program Penyelenggaraan Pengawasan
Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- ii) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
- d) Unsur Kewilayahan
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
- i) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
- ii) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan Desa, dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.
- iii) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- iv) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
- e) Unsur Pemerintahan Umum
Program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah:
- i) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.



- ii) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan.
- iii) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- iv) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Kemasyarakatan.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dijabarkan sebagai berikut.

Misi Kesatu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia

1. Tujuan Pertama:

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:

- a. meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan; dan
- b. meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan.

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan;
- b. meningkatkan mutu pendidikan;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun arah kebijakannya sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemenuhan akses layanan pendidikan;
- b. meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar;
- c. meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;



- d. meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
- e. meningkatkan mutu pendidikan dasar;
- f. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- g. meningkatkan kualitas puskesmas dan rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan;
- h. meningkatkan pemenuhan spm bidang kesehatan;
- i. meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- j. meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan;
- k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan terhadap kesehatan ibu, anak, lansia;
- l. meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, serta budaya olahraga;
- m. meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Tujuan Kedua:

Meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan sasaran:

- a. menurunnya jumlah PMKS;
- b. meningkatnya ketahanan pangan daerah;
- c. terkendalinya tingkat pengangguran terbuka;
- d. meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas.

Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang dilakukan adalah:

- a. meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas;
- b. meningkatkan penanganan PMKS.

Arah kebijakannya adalah:

- a. meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau;
- b. meningkatkan kawasan permukiman layak;
- c. meningkatkan penanganan dan perlindungan PMKS, rehabilitasi sosial dan jaminan sosial;
- d. meningkatkan pemberdayaan sosial.

Misi Kedua Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis pada Potensi Lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

1. Tujuan kesatu:

Meningkatnya daya saing daerah dengan 3 (tiga) sasaran, yaitu:

- a. tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik;
- b. meningkatnya cakupan layanan infrastruktur;
- c. meningkatnya daya saing ekonomi daerah.



Strategi yang mendukung pencapaian SPM yang ditempuh adalah meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Arah kebijakannya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. Meningkatkan penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- c. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air;
- d. Meningkatkan tata bangunan gedung dan lingkungan;
- e. Meningkatkan layanan air minum dan sanitasi;
- f. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi dan sarana prasarana ke-PU-an;
- g. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Berikut ini disajikan matrik integrasi SPM ke dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Magelang berdasarkan RPJMD Tahun 2019-2024 sebagaimana tabel 1.15.



Tabel 1.15.
Integrasi SPM Ke Dalam Arah Kebijakan Pembangunan
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Prioritas Kabupaten	Indikator Kinerja	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Harapan lama sekolah 3. Persentase SD SMP yang terakreditasi minimal B	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan 2. Meningkatkan mutu pendidikan	1. Meningkatkan pemenuhan akses layanan pendidikan; 2. Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan pada pendidikan dasar; 3. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; 4. Meningkatkan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; 5. Meningkatkan mutu pendidikan dasar.
Kesehatan	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan pelayanan Kesehatan; 2. Meningkatkan kualitas Puskesmas dan rumah sakit dalam pemenuhan sarana dan prasarana Kesehatan; 3. Meningkatkan pemenuhan SPM bidang Kesehatan; 4. Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular; 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya Kesehatan; 6. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi dan pelayanan terhadap kesehatan ibu, anak, lansia; 7. Meningkatkan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, serta budaya olahraga.
Penanggulangan Kemiskinan	Persentase penurunan PMKS	Meningkatkan penanganan PMKS	1. Meningkatkan penanganan dan perlindungan PMKS, Rehabilitasi Sosial dan Jaminan Sosial; 2. Meningkatkan pemberdayaan sosial.
	Cakupan hunian layak dan berkualitas	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas	1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau; 2. Meningkatkan kawasan permukiman layak.
Sarana dan Prasarana Publik	Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	1. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air; 2. Meningkatkan tata bangunan gedung dan lingkungan; 3. Meningkatkan layanan air minum dan sanitasi; 4. Meningkatkan kualitas jasa konstruksi dan sara-na prasarana ke-PU-an; 5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian ruang.
Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana	Cakupan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	1. Meningkatkan penegakan hukum 2. Meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	1. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat; 2. Meningkatkan penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi dengan memaksimalkan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022



Tahun 2021 merupakan tahun perencanaan kedua untuk pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Magelang lima tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, fokus pembangunan tahun 2021 adalah “Peningkatan kesejahteraan melalui pemerataan infrastruktur publik”, dengan arah kebijakan meliputi:

- a. Meningkatkan keterjangkauan dan pemerataan pendidikan;
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan;
- c. Meningkatkan ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman;
- d. Meningkatkan kuantitas atraksi pariwisata;
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian;
- f. Meningkatkan infrastruktur jaringan jalan;
- g. Meningkatkan layanan air minum dan sanitasi;
- h. Meningkatkan infrastruktur sumber daya air;
- i. Meningkatkan pengamanan dan keselamatan lalu lintas.

Permasalahan penerapan dan pencapaian SPM yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 meliputi:

1. Bidang Pendidikan

- a. Belum optimalnya partisipasi pendidikan, yang ditandai dengan nilai Angka Partisipasi Murni (APM) di jenjang SD dan SMP lebih rendah dari APM Provinsi Jawa Tengah dan nasional serta Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang belum mencapai 100%.
- b. Belum optimalnya mutu pendidikan, salah satunya dapat dilihat dari guru berkualifikasi S1/DIV.

2. Bidang Kesehatan

- a. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan, kualitas lembaga pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat serta kualitas pelayanan rumah sakit.

Hal ini bisa dilihat dari masih ditemukannya kasus kematian ibu, neonatal, bayi dan balita; mutu FKT/FKTL/Laboratorium yang perlu ditingkatkan; masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular.

- b. belum terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat serta belum terpenuhinya sumber daya kesehatan baik secara kualitas maupun kuantitas.



3. Bidang Pekerjaan Umum

- a. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur. Disamping kualitas dan kuantitas infrastruktur yang dibangun, konsep pengembangan wilayah yang belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan infrastruktur pekerjaan umum maupun infrastruktur perhubungan; menjadi penyebab belum optimalnya cakupan dan layanan infrastruktur.
- b. Belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur Pekerjaan Umum dan penataan ruang disebabkan oleh permasalahan salah satunya karena belum optimalnya layanan air minum dan sanitasi air limbah domestik yang disebabkan target *Universal Access 100 0 100* belum dapat diwujudkan pada tahun 2019.

4. Bidang Perumahan Rakyat

Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat adalah belum optimalnya layanan hunian yang layak dan berkualitas. Layak dan berkualitasnya sebuah hunian diukur mulai dari kondisi lingkungan yang paling kecil, yaitu dari rumah/bangunan tempat tinggal, perumahan, permukiman, lingkungan hunian sampai dengan kawasan permukiman.

5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok yang harus ditangani dalam rangka mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah belum optimalnya:

- 1) Penegakan hukum;
- 2) Ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana; dan
- 3) Wawasan kebangsaan dan pendidikan politik

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya pelayanan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan komprehensif dan multi dimensi, memerlukan peran berbagai pihak baik pemerintah, swasta maupun masyarakat,
- 3) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik.

6. Bidang Sosial

Permasalahan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini bisa dilihat dari cakupan penanganan PMKS yang masih rendah.



Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah serta ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran. Pada Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kabupaten Magelang mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai prioritas urusan pembangunan daerah. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemenuhan kebutuhan akan rumah tinggal yang layak huni, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, prioritas pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2021 adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil menengah, sarana dan prasarana publik, lingkungan hidup, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan bencana.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Pada aspek kesejahteraan masyarakat, kinerja yang diukur difokuskan pada kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan seni budaya serta olah raga. Pada fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta kesejahteraan sosial, ukuran tingkat keberhasilan dan kemajuan pembangunan digunakan indikator yang bersifat umum (makro) yang secara universal sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran (indikator). Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran.

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan/Unit	Capaian Kinerja 2020	Capaian Kinerja 2021	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Indeks Pembangunan Manusia		69,87	70,12	0,358
2.	Angka Kemiskinan	%	11,27	11,91	5,679
3.	Angka Pengangguran	%	4,27	5,03	17,799
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,67	3,48	308,383
5.	Pendapatan per Kapita	Juta rupiah	24,97	26,18	4,846
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		18,57	*	*

*Data tahun 2021 belum dikeluarkan oleh BPS Provinsi (kewenangan provinsi)

Sumber: Kabupaten Magelang Dalam Angka, 2022

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.



2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pada Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*) yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Output*)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	607	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	18902	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	26372	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	2349	
		Jumlah pendidik pada PAUD	1642	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	498	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	399	
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	732	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	92428	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	38286	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	80074	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	25605	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	5523	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2872	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	4720	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	2195	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	1664	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	1252	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	782	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	653	
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	2200			
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1337			
Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	436			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	108	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	782	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	653	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	15	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4941	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	4941	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	401	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	401	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	304	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	436	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	18	
2.	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	6	Dinas Kesehatan
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1024	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	1026	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1026	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1026	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1064	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	349	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	117	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	349	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	349	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1022	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	62	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	66.7	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	60.3	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	0	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	0	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	391722	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	6905	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	398627	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	0	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	398627	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	88.81	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	78.98	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	1.57	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	88.79	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	0	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	0	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	88.81	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	395	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	127	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	3	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	12448	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	12448	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	1000.825	
		Panjang jalan yang dibangun	0	
		Panjang jembatan yang dibangun	55	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	2662	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	64	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	2662	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	64	
		Panjang jalan yang dipelihara	120.37	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	52	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	7	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	7	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	0	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	293	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	49	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	29	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri	52	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	52	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	52	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	81	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	29	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	29	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	81	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	360079	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	997	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	997	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	977	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	20	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	2931	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	85.09	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	2537	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	85.09	
		Jumlah rumah di kab/kota	360079	
		Jumlah unit PK RTLH	2537	
		Jumlah rumah tidak layak huni	41149	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	
		Rasio rumah dan KK	116.55	
		Jumlah rumah pembangunan baru	458	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	38	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	3423	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	3423	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	3423	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	3423	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	
5.	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	125	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	80	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	12	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	2	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	617	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	9.61	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	100	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	300	
		Persentase jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	0	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0.0012	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	9.61	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0.00007	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	1139	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	7	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	83	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	0	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	653	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	207	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	2900	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	4	
6.	Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	226	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	226	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	226	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	47	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	47	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	1	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	6	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	2	
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	27	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	226	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	70	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	3	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	48	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	22	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	38	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	347	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	9	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	145	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	239	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	94	
6.	Tenaga Kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.	0	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	87.5	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	18.18	
		Persentase LPK yang terakreditasi	7.79	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	97.4	
		Jumlah penganggur yang dilatih	360	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	96.59	
		Persentase penyerapan lulusan	9.1	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	0	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	102	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	102	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	
		Data tingkat produktivitas total	0	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	26.1	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	36	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	50	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	48.74	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	0	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2.07	
		Jumlah mogok kerja	1	
		Jumlah penutupan perusahaan	5	
		Jumlah perselisihan kepentingan	0	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	
		Jumlah perselisihan PHK	8	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	126	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	79	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	42	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	62.5	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	901	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2301	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	38	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	2	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	1	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	0	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	102	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	102	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	48	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	104	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	0	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	4	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	37	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	219	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	37	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	4	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Pertanian dan Pangan
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	10925	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	87.9	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	
		Tertanganinya kerawanan pangan	12	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	22	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	98.3	
10.	Pertanahan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	DPUPR
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.	0	
		Dokumen Izin membuka tanah	0	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	
		SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks kualitas air (IKA)	51.54	Dinas Lingkungan Hidup
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.68	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	68.05	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	365160.6	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota	0	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota	0	
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100	
12.	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	0.05	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Penerbitan akta perceraian	0.23	
		Penerbitan akta kematian	100	
		Penyajian data kependudukan	1	
13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	4	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	17	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Sosial PPKB PPPA
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	41	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	88	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	11517	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	96	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	65	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1797	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	18	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	45	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	6	
		15.	Perhubungan	
Terlaksananya pelayanan uji berkala	68.56			
Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0			
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	47.24			
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	89	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	98	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	39.58	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	35	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	92	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	92	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	100	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	100	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	52	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	2	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	97	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	
17.	Koperasi dan UKM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantutan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	17.28	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	46.961	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	5.991	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.047	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.691	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	30.415	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0.691	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	33.871	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0.093	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	99.722	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0.042	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0.042	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.491	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0.491	
18.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPSTP
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	4	
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	44	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3970	
		Laporan realisasi penanaman modal	2.803.105 .219.670	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	2	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	4	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	100	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	DISPARPORA
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	30	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	6	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	5	
20	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	1	DISKOMINFO
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1384	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	
		Jumlah kompilasi stastik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	100	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	100	
21	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	100	DISKOMINFO
		Persentase system elektronik yang telahmenerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	
22	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	1030	DISDIKBUD
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	165	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	90	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran	1	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	1	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	90	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	
23	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	3.48	DISPUSPA
		Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	4.05	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.03	
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	2.94	
		Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	219	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	2	
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	2	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	712	
24	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	68.11	DISPUSPA
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0.34	
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	5165	
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	
25	Kelautan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	181	DISPETERIKAN
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	28	
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	440	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2.207.858 .240	
26	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	11	DISPARPORA
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	6	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	902	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	6	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0	
27	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	189	DISTAN PANGAN
		Prasarana pertanian yang digunakan	14	
		Penerbitan izin usaha pertanian	3	
		Persentase prasarana yang digunakan	66.67	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	100	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	100	
28	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	DISTAN PANGAN
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	
29	ESDM	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	DPUPR
30	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	100	DPMP TSP DISDAGKOP UKM
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	100	
		Persentase penerbitan TDG	100	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0	
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0.01781	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	14974	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	43.388	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100	
31	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	50	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	29.65	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0.25	
32	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	DISPERINNAKER
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output) dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini.



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pada Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) yang merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dan 8 (delapan) Urusan Pilihan.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	93.002 %	DISDIKBUD	
				DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	92.179 %	DISDIKBUD	
				DISDUKCAPIL	
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	80.907 %	DISDIKBUD	
				DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100,00%	DISDIKBUD	
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	0.038	DINKES	
				DISDUKCAPIL	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	66.667 %	DINKES	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	94.034 %	DINKES	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99.738 %	DINKES	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.583 %	DINKES	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84.612 %	DINKES	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55.375 %	DINKES	
				DISDUKCAPIL	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	20.301 %	DINKES	
				DISDUKCAPIL	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	48.15%	DINKES	
				DISDUKCAPIL	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.03%	DINKES			
Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	59.751 %	DINKES			
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	62.771 %	DINKES			



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	25.039 %	DINKES	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	97.491 %	DINKES	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0%	DPUPR	Tidak terdapat kawasan tsb di Kabupaten Magelang
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	0%	DPUPR	Tidak terdapat kawasan tsb di kabupaten Magelang
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	8.015 %	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	90.207 %	DPUPR	
		Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	90.359 %	DPUPR BAPPEDA & LITBANGDA	
		Rasio kepatuhan IMB kabupaten	100%	DPUPR	
		Tingkat kemantapan jalan	88.828 %	DPUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	DPUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	0%	DPRKP	
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	0%	DPRKP	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	100,00%	DPRKP	
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11.428%	DPRKP	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0.951%	DPRKP	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	SATPOL PP dan PK	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	SATPOL PP dan PK	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	126.038	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	30.600	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	526	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	SATPOL PP dan PK	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	9,82 menit	SATPOL PP dan PK	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100%	DINSOS PPKB PPPA	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	DINSOS PPKB PPPA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	DISPERINNAKER	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,023%	DISPERINNAKER	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.054.743,871	DISPERINNAKER	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	14,987%	DISPERINNAKER	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	39,157%	DISPERINNAKER	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	11,811%	DINSOS PPKB PPPA BPPKAD	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	0,017%	DINSOS PPKB PPPA DISDUKCAPIL	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,845	DINSOS PPKB PPPA DISDUKCAPIL	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	181.846	DISTAN PANGAN	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	DPMPTSP	
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	131,818 %	DPUPR	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100%	DPMPTSP	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0%	DPUPR	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	DPUPR	
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	BAGIAN PEMERINTAHAN	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	71,41	DLH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	38,185%	DLH	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	40%	DLH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik	98,178%	DISDUKCAPIL	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	76,124%	DISDUKCAPIL	
		Kepemilikan Akte Kelahiran	92,749%	DISDUKCAPIL	
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	15,583%	BAGIAN ORGANISASI	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	58,824%	DISPERMADES	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	101,732 %	DISPERMADES	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,14	DNSOS PPKB PPPA	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	64,638%	DINSOS PPKB PPPA	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	17,96%	DINSOS PPKB PPPA	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten	45,67%	DISHUB	
		Kinerja lalu lintas kabupaten	NA	DISHUB	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DISKOMINFO	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	100%	DISKOMINFO DISDUKCAPIL	
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	34.793% 0093%	DISDAGKOP UKM	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	12,565%	DPMP TSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,009%	DISPARPORA DISDUKCAPIL	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	8,688%	DISPARPORA DISDUKCAPIL	
		Peningkatan prestasi olahraga	20	DISPARPORA	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO BAGIAN ORGANISASI	
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO BAGIAN ORGANISASI	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	DISKOMINFO	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	DISDIKBUD	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	45,9%	DISPUSPA	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	238,67%	DISPUSPA	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	67,11%	DISPUSPA	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	1.025	DISPUSPA	
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: <i>one data</i> KKP)	20.585,39 ton	DISPETERIKAN	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-97,606%	DISPARPORA	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-38,591%	DISPARPORA	



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tingkat hunian akomodasi	29,883%	DISPARPORA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4%	BAPPEDA dan LITBANGDA	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,32%	BPPKAD	
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	738,061	DISTAN PANGAN	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0%	DISPETERIKAN	
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	0	DPUPR	Kewenangan provinsi
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DPMPSTP	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	42,976%	DISTAN PANGAN	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	43,388%	DISDAGKOP UKM	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	8,408%	DISPERINNAKER	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	50%	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	29,648%	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DISPERINNAKER	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	0	DISPERINNAKER	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1087%	DISPERINNAKER	

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*) dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini.



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pada Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten meliputi 5 (lima) Urusan Pemerintahan.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	9,387%	BPPKAD	
		Rasio PAD	1,514%	BPPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	56,309%	BPPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	WTP	INSPEKTORAT	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	BAGIAN PENGADAAN	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	9,664%	BAGIAN PENGADAAN	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	21,947%	BAGIAN PENGADAAN BPPKAD	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	531,043%	BKPPD	
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	21,815%	BKPPD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,653%	BKPPD	
4	Manajemen Keuangan	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,70%	BKPPD	
		<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	28,79%	BKPPD	
		Assets management	100%	BKPPD	
		<i>Cash Management</i> : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	15,464%	BKPPD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	100,995%	BKPPD	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100%	BKPPD	

Informasi lebih lanjut terkait capaian indikator kinerja kunci dapat dilihat pada Lampiran 2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan dalam LPPD Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini.



2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud kewajiban kepala daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021. Pada pembahasan ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan tersebut.

Pengukuran capaian berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 dan dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator, dan dibandingkan dengan capaian realisasi pada tahun sebelumnya serta dibandingkan dengan target capaian pada akhir periode RPJMD. Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator, yang dibagi menjadi dua jenis yaitu: indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

- Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin tinggi capaian kinerja, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Kinerja} \\ \text{(Indikator Positif)} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerja, untuk membedakan indikator positif dan indikator negatif, maka selanjutnya indikator negatif diberi tanda bintang (*) pada indikator kinerja yang dinilai, dengan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Capaian} \\ \text{Kinerja} \\ \text{(Indikator Negatif)} \end{array} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$



Untuk mengukur tingkat capaian kinerja mengacu interval realisasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pengukuran dibuat skala pengukuran ordinal dengan pemberian predikat berdasarkan persentase capaian dari masing-masing indikator dengan interval nilai realisasi kinerja sebagaimana pada tabel 2.5. berikut ini:

Tabel 2.5.

Interval Nilai dan Predikat Penilaian Realisasi Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Predikat Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66 % ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Coklat
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017, diolah

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Capaian kinerja persasaran strategis pada tahun 2020 dilakukan analisa dengan dilakukan perbandingan antar capaian kinerja dan target kinerja tahun 2021 dan target kinerja hingga akhir periode RPJMD pada tahun 2019-2024, hasil analisa sebagai berikut:



Tabel 2.6
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Pada Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0-100)	69,34	69,87	69,83	70,12	100,42	70,57	99,36
2	Meningkatnya Paritas Daya Beli Masyarakat	2	Inflasi *)	persen	2,5-4,0	1,56	2,5-4,0	2,18	145,50	2,5-4,0	145,50
		3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.262,68	9.301,000	9.762,42	9.301,00	95,27	10.400,12	89,43
		4	Angka Kemiskinan *)	persen	10,08-11,08	11,27	8,78-9,78	11,91	78,22	6,83-7,83	47,89
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	5	Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	92,91	91,81	93,31	91,89	99,68	94,41	98,83
B	MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
4	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	5-5,5	-1,68	5,2-5,7	-1,68	-29,47	5,5-6,0	-28,00
		7	PDRB Per Kapita	juta rupiah	25,20	24,94	28,21	24,94	88,41	32,72	76,22
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,86	66,86	72,98	66,60	91,61	83,29	80,27
C	MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah										
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	62,76	61,07	67,25	61,07**)	93,32	72,39	85,19
Rata-rata Capaian Kinerja :								84,77		77,19	

Sumber: BPS dan Perangkat Daerah terkait data diolah, 2022

Keterangan:

*) Indikator Negatif

***) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2021) karena data belum keluar/ada.



Berdasarkan tabel di atas dalam capaian rata-rata kinerja tujuan pada indikator makro Kepala Daerah tahun 2021 telah tercapai **84,77%** dengan kriteria **Sedang**, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja tujuan telah tercapai **77,19%** dengan kriteria **Sedang**, hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator tujuan strategis belum tercapai, baik pada target tahun 2021 maupun target akhir periode RPJMD pada tahun 2024. Pada capaian kinerja tujuan tahun 2021 masih terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang dengan kriteria sangat rendah bahkan minus yaitu: Laju Pertumbuhan Ekonomi yang memiliki capaian kinerja rendah dengan capaian terhadap target kinerja -30,00%. Sedangkan dibandingkan dengan target RPJMD pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) indikator tujuan yang tidak mencapai target dengan kriteria sangat rendah yaitu: Angka Kemiskinan (-29,47%) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (-28,00%).

Secara umum capaian kinerja tujuan Kepala Daerah Kabupaten Magelang belum mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021. Dari 5 Tujuan dengan 9 indikator, sudah 6 indikator yang telah mencapai target. Demikian juga dibandingkan dengan target kinerja akhir periode RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja masih jauh dari target yang ditetapkan dengan capaian $\leq 75\%$. Capaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021 pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Pada Indikator Sasaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia										
1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,72	7,78	8,00	7,79	97,38	8,41	92,63
		2	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,67	12,54	12,92	12,55	97,14	13,27	94,57
		3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	93,89	97	94,79	92,67	97,76	95,94	96,59
2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	tahun	73,52	73,72	73,61	73,88	100,37	73,75	100,18
3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	persen	0,58	0,63	0,58	0,62	106,90	0,58	106,90
4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,51	79,51**)	79,47	81,27	102,27	82,62	98,37
5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	58,89	67,73	68,66	73,11	106,48	95,81	76,31
6	Terkendalinya Tingkat Pengangguran Terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *)	persen	2,4-3,0	4,27	2,25-2,65	5,03	10,19	2,25-2,55	2,75
7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,03	69,65	69,63	69,65**)	100,46	70,53	98,75
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	madya	Nindya*	Nindya	Nindya	100,00	Utama	75,00
B	MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	72,10	71,3	72,14	71,41	98,99	72,20	98,91
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	61,63	69,9	73,81	63,725	86,34	94,38	67,52



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2019)	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)		
						Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13	Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.529,30	4.306,14	5.208,43	4306,14 ^{**})	82,68	6.227,11	69,15
		14	Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.997,70	6.914,81	7.748,63	6914,81 ^{**})	89,24	8.875,03	77,91
		15	Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.157,40	7.264,81	8.139,80	5.160,44	63,40	9.613,39	53,68
		16	Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.416,24	1.416,24	1.630,14	1416,24 ^{**})	86,88	1.951,00	72,59
		17	Pertumbuhan Investasi	persen	5,00	13,00	5,00	12,56	251,20	5,00	251,20
		18	Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	81,38	83,44	87,21	95,88	109,94	87,76	109,25
		19	Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,67	0,688	0,69	0,6953	100,77	0,72	96,57
C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah											
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	60,10(B)	60,33(B)	65,02 (B)	60,33(B ^{***})	92,79	71,00 (BB)	84,97
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	2,19-2,30	2,94	2,51-2,61	2,67	106,37	2,86-3,1	93,36
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	-	WTP	WTP	WTP	WTP ^{**})	100,00	WTP	100,00
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	82,74	83,69	83,75	84,22	100,56	86,00	97,93
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,49	0,60	0,60	0,58	96,67	0,71	81,69
Rata-rata Capaian Kinerja :								99,36		91,53	

Sumber: Perangkat Daerah terkait data diolah, 2022

Keterangan:*) Indikator Negatif

**) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum keluar/ada, atau tidak keluar lagi



Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja sasaran pada indikator mikro Kepala Daerah tahun 2021 telah melampaui target, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,36% dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu mengalami penurunan sebesar 6,12% dimana capaian tahun 2020 sebesar 105,48%. Capaian kinerja tahun 2021 dibandingkan target akhir RPJMD pada tahun 2024 capaian kinerja sasaran telah tercapai **91,53%** dengan kriteria **Sangat Tinggi**, jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu mengalami penurunan sebesar 15,53% dimana capaian tahun 2020 sebesar 76,00%. Hal itu menunjukkan target yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis telah tercapai bahkan terlampaui pada target tahun 2021 sedangkan target akhir periode RPJMD pada tahun 2024 hampir mencapai target yang ditetapkan. Pencapaian tersebut belum bisa menunjukkan kinerja yang bagus karena masih terdapat capaian indikator yang melebihi 200% pada indikator kinerja pertumbuhan investasi, hal ini dikarenakan penentuan target kinerja yang terlalu rendah pada awal penyusunan RPJMD. Rekapitulasi distribusi kriteria penilaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Capaian Kriteria Penilaian Indikator Kinerja Sasaran Kepala Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Pada Indikator Sasaran

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Indikator dan Persentase terhadap target	
			2021	2024
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	18 (75,00)	14 (58,33)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	4 (16,67)	4 (16,67)
3	66 % ≤ 75%	Sedang	0 (0,00)	4 (16,67)
4	51% ≤ 65%	Rendah	1 (4,17)	1 (4,17)
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	1 (4,17)	1 (4,17)
Jumlah Program:			24	24

Sumber: Perangkat Daerah terkait data diolah, 2022

Berdasarkan kriteria penilaian pada tabel di atas realisasi kinerja pada tahun 2021 kriteria sangat tinggi (91% ≤ 100%) mencapai 18 (75,00%) indikator sasaran, demikian juga terhadap target indikator pada tahun 2024 mencapai 14 (58,33%) indikator sasaran. Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis diperlukan anggaran untuk menunjang pencapaian target kinerja, jumlah anggaran dan realisasi per program dalam menunjang tercapainya target kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang tahun anggaran 2021 secara detail pada Tabel 2.9 berikut ini:



Tabel 2.9.
Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021

Rekening	Rincian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1.01.	URUSAN PENDIDIKAN			
1.01.1.01.00.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota *)	310.037.126.158,00	231.616.263.168,00	74,71
1.01.1.01.00.02.	Program Pengelolaan Pendidikan	164.154.596.074,00	158.084.437.357,00	96,30
1.01.1.01.00.04.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	51.900.534.500,00	47.557.909.400,00	91,63
1.02.	URUSAN KESEHATAN			
1.02.1.02.01.02.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	219.105.652.251,00	158.377.278.664,00	72,28
1.02.1.02.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.351.643.942,00	10.033.696.129,00	65,36
1.02.1.02.01.04.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	225.420.770,00	87.146.250,00	38,66
1.02.1.02.01.05.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.695.741.400,00	1.800.822.670,00	66,80
1.03.	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.1.03.00.02.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.506.280.605,00	6.605.048.936,00	87,99
1.03.1.03.00.03.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.104.900.145,00	8.091.466.855,00	99,83
1.03.1.03.00.05.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.738.826.115,00	4.737.231.164,00	99,97
1.03.1.03.00.08.	Program Penataan Bangunan Gedung	45.129.549.960,00	44.923.955.850,00	99,54
1.03.1.03.00.10.	Program Penyelenggaraan Jalan	45.508.507.818,00	41.003.683.275,00	90,10
1.03.1.03.00.11.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	18.479.610,00	18.459.610,00	99,89
1.03.1.03.00.12.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.245.760,00	146.049.248,00	66,01
1.03.1.04.00.07.	Program Pengembangan Permukiman	82.185.000,00	82.100.160,00	99,90
1.04.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.1.04.00.02.	Program Pengembangan Perumahan	44.193.000,00	20.741.805,00	46,93
1.04.1.04.00.03.	Program Kawasan Permukiman	1.317.239.007,00	1.308.344.610,00	99,32
1.04.1.04.00.04.	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	506.095.500,00	426.646.550,00	84,30
1.04.1.04.00.05.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	35.170.000,00	12.144.070,00	34,53
1.05.	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1.05.1.05.01.02.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.926.443.500,00	2.789.938.246,00	95,34
1.05.1.05.01.04.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.271.783.000,00	7.216.002.068,00	99,23
1.05.1.05.02.03.	Program Penanggulangan Bencana	2.123.174.000,00	2.016.034.231,00	94,95
1.06.	URUSAN SOSIAL			
1.06.1.06.00.02.	Program Pemberdayaan Sosial	126.000.000,00	126.000.000,00	100,00
1.06.1.06.00.04.	Program Rehabilitasi Sosial	284.877.500,00	273.513.014,00	96,01
1.06.1.06.00.05.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	238.189.500,00	236.216.648,00	99,17
1.06.1.06.00.06.	Program Penanganan Bencana	52.803.700,00	52.800.100,00	99,99



Rekening	Rincian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2.07.	URUSAN TENAGA KERJA			
2.07.2.07.00.03.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	511.237.990,00	490.138.715,00	95,87
2.07.2.07.00.04.	Program Penempatan Tenaga Kerja	992.589.000,00	954.889.861,00	96,20
2.07.2.07.00.05.	Program Hubungan Industrial	121.270.780,00	113.098.660,00	93,26
2.08.	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2.08.1.06.00.02.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	37.650.000,00	37.649.870,00	100,00
2.08.1.06.00.03.	Program Perlindungan Perempuan	225.915.000,00	50.517.700,00	22,36
2.08.1.06.00.06.	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	141.214.670,00	139.196.957,00	98,57
2.08.1.06.00.07.	Program Perlindungan Khusus Anak	225.915.000,00	75.235.150,00	33,30
2.09.	URUSAN PANGAN			
2.09.2.09.00.03.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	758.283.576,00	738.482.408,00	97,39
2.09.2.09.00.04.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.170.000,00	4.149.150,00	99,50
2.09.2.09.00.05.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	55.236.451,00	55.101.094,00	99,75
2.11.	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.2.11.00.02.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	291.960.000,00	290.128.040,00	99,37
2.11.2.11.00.03.	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	604.228.775,00	599.710.222,00	99,25
2.11.2.11.00.04.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	2.455.446.200,00	2.157.019.184,00	87,85
2.11.2.11.00.05.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.675.230.000,00	674.764.000,00	40,28
2.11.2.11.00.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.726.500,00	59.647.788,00	99,87
2.11.2.11.00.07.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	355.685.490,00	329.692.338,00	92,69
2.11.2.11.00.08.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	178.388.600,00	178.330.985,00	99,97
2.11.2.11.00.10.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	17.500.000,00	17.499.015,00	99,99
2.11.2.11.00.11.	Program Pengelolaan Persampahan	11.303.437.011,00	10.459.318.501,00	92,53
2.12.	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2.12.2.12.00.02.	Program Pendaftaran Penduduk	812.676.600,00	799.702.657,00	98,40
2.12.2.12.00.03.	Program Pencatatan Sipil	259.050.442,00	253.375.213,00	97,81
2.12.2.12.00.04.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	706.744.148,00	693.775.608,00	98,17
2.12.2.12.00.05.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100.695.983,00	97.949.103,00	97,27
2.13.	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2.13.2.13.00.03.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	30.670.565,00	27.762.770,00	90,52
2.13.2.13.00.04.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.435.083.283,00	4.980.433.375,00	91,63



Rekening	Rincian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
2.13.2.13.00.05.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.967.332.593,00	1.943.371.484,00	98,78
2.14.	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.1.06.00.02.	Program Pengendalian Penduduk	97.033.500,00	92.674.167,00	95,51
2.14.1.06.00.03.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.538.071.000,00	6.459.549.452,00	85,69
2.15.	URUSAN PERHUBUNGAN			
2.15.2.15.00.02.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.648.074.920,00	23.355.453.386,00	98,76
2.16.	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.2.16.00.02.	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.351.603.582,00	1.285.457.454,00	95,11
2.16.2.16.00.03.	Program Aplikasi Informatika	5.675.974.000,00	5.570.431.565,00	98,14
2.17.	URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
2.17.2.17.00.03.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	33.863.050,00	33.626.450,00	99,30
2.17.2.17.00.05.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	190.304.000,00	190.124.800,00	99,91
2.17.2.17.00.06.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	15.000.000,00	13.549.150,00	90,33
2.17.2.17.00.07.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.025.077.445,00	941.749.946,00	91,87
2.18.	URUSAN PENANAMAN MODAL			
2.18.2.18.00.04.	Program Pelayanan Penanaman Modal	247.255.000,00	245.596.181,00	99,33
2.18.2.18.00.05.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000,00	203.722.345,00	54,70
2.18.2.18.00.06.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	26.250.000,00	26.091.047,00	99,39
2.19.	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2.19.2.19.00.02.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	585.584.095,00	559.388.935,00	95,53
2.19.2.19.00.03.	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.544.856.000,00	3.129.121.305,00	88,27
2.19.2.19.00.04.	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
2.20.	URUSAN STATISTIK			
2.20.2.16.00.02.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	284.589.110,00	212.220.068,00	74,57
2.21.	URUSAN PERSANDIAN			
2.21.2.16.00.02.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	514.174.450,00	506.803.338,00	98,57
2.22.	URUSAN KEBUDAYAAN			
2.22.1.01.00.02.	Program Pengembangan Kebudayaan	2.506.461.352,00	2.451.846.110,00	97,82
2.23.	URUSAN PERPUSTAKAAN			
2.23.2.23.00.02.	Program Pembinaan Perpustakaan	676.481.855,00	576.965.002,00	85,29
2.24.	URUSAN KEARSIPAN			
2.24.2.23.00.02.	Program Pengelolaan Arsip	184.101.252,00	180.221.396,00	97,89
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3.25.	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.3.25.00.04.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.344.103.719,00	1.250.520.350,00	93,04
3.25.3.25.00.06.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	752.251.775,00	740.606.020,00	98,45



Rekening	Rincian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3.26.	URUSAN PARIWISATA			
3.26.2.19.00.02.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	12.512.896.491,00	9.970.671.511,00	79,68
3.26.2.19.00.03.	Program Pemasaran Pariwisata	318.902.039,00	316.214.174,00	99,16
3.26.2.19.00.04.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.514.000,00	9.511.960,00	99,98
3.26.2.19.00.05.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.106.875.684,00	898.699.105,00	81,19
3.27.	URUSAN PERTANIAN			
3.27.2.09.00.02.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.652.247.355,00	21.914.080.484,00	92,65
3.27.2.09.00.03.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.454.207.379,00	6.333.982.812,00	98,14
3.27.2.09.00.05.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	99.116.942,00	97.326.060,00	98,19
3.27.2.09.00.06.	Program Perizinan Usaha Pertanian	23.995.825,00	22.477.815,00	93,67
3.27.2.09.00.07.	Program Penyuluhan Pertanian	745.472.966,00	735.731.860,00	98,69
3.27.3.25.00.04.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	588.353.465,00	569.087.996,00	96,73
3.30.2.17.00.02.	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	63.326.685,00	63.323.660,00	100,00
3.30.2.17.00.03.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.631.312.479,00	4.865.005.361,00	73,36
3.30.2.17.00.04.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	197.297.584,00	186.438.273,00	94,50
3.30.2.17.00.06.	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	218.606.498,00	213.420.159,00	97,63
3.31.2.07.00.02.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.003.804.930,00	676.639.380,00	67,41
3.32.2.07.00.3.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
4.	UNSUR PENDUKUNG			
4.01.	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.4.01.00.02.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.859.776.390,00	18.470.707.589,00	97,94
4.01.4.01.00.03.	Program Perekonomian Dan Pembangunan	7.164.723.954,00	6.515.933.779,00	90,94
4.02.	URUSAN SEKRETARIAT DPRD			
4.02.4.02.00.02.	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	13.851.725.500,00	10.756.096.012,00	77,65
5.	UNSUR PENUNJANG			
5.01.	URUSAN PERENCANAAN			
5.01.5.01.00.02.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	611.299.915,00	589.496.533,00	96,43
5.01.5.01.00.03.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	846.636.010,00	803.393.136,00	94,89
5.02.	URUSAN KEUANGAN			
5.02.4.01.00.03.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.063.964.495,00	2.255.522.991,00	55,50
5.02.5.02.01.02.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	729.675.527.549,00	693.684.480.488,00	95,07
5.02.5.02.01.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.291.840.599,00	6.949.608.274,00	95,31
5.03.	URUSAN KEPEGAWAIAN			
5.03.5.03.00.02.	Program Kepegawaian Daerah	6.509.169.240,00	5.949.457.143,00	91,40
5.05.	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.05.5.01.00.02.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	931.745.955,00	927.368.048,00	99,53



Rekening	Rincian	Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
6.	UNSUR PENGAWAS			
6.01.	URUSAN INSPEKTORAT			
6.01.6.01.00.02.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	340.792.800,00	327.108.455,00	95,98
6.01.6.01.00.03.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	360.818.000,00	357.341.610,00	99,04
7.	UNSUR KEWILAYAHAN			
7.01.	URUSAN KECAMATAN			
7.01.7.01.01.02.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	634.281.527,00	611.903.022,00	96,47
7.01.7.01.01.03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.359.062.371,00	6.244.076.934,00	98,19
7.01.7.01.01.04.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	599.154.000,00	593.493.700,00	99,06
7.01.7.01.01.06.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	466.749.800,00	462.672.190,00	99,13
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8.01.	URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.8.01.00.02.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	285.868.715,00	177.817.320,00	62,20
8.01.8.01.00.03.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.165.443.180,00	3.130.635.440,00	98,90
8.01.8.01.00.04.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.086.000,00	27.870.000,00	75,15
	Jumlah	1.013.902.212.525,00	841.533.748.439,00	83,00

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, data realisasi keuangan diolah kondisi 17 Februari 2022 unaudited, 2022.

Catatan:*)Tidak termasuk kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Realisasi anggaran Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mencapai rata-rata **83,00%** dengan kategori **Tinggi**. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,34% jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu sebesar 73,66%. Tingkat capaian terbanyak adalah kriteria Sangat Tinggi ($91\% \leq 100\%$) sebanyak 78 (71,56%) program, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,40% dibandingkan dengan tahun lalu dengan realisasi program tertinggi pada kriteria Sangat Tinggi sebesar 71 (73,96%). Capaian program pada kategori sedang ($\leq 50\%$) sebanyak 6 (5,50%) program, jika dibandingkan dengan serapan anggaran tahun sebelumnya dengan capaian kategori sangat rendah sebesar 2 (2,08%) program mengalami kenaikan sebanyak 2,6%, hal ini menunjukkan kinerja serapan anggaran pada tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan dan perbaikan, tetapi secara kriteria mengalami penurunan.



Jumlah program yang dikelola pada tahun 2021 sebanyak 109 program sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 71 program sehingga bertambah sebesar 65,14%, hal ini akibat penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Dimana program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada peraturan tersebut. Secara detail rekapitulasi realisasi anggaran per program Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Per Program
Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Jumlah Program
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	78 (71,56%)
2	76% ≤ 90%	Tinggi	14 (12,84%)
3	66% ≤ 75%	Sedang	8 (7,34%)
4	51% ≤ 65%	Rendah	3 (2,75%)
5	≤ 50%	Sangat Rendah	6 (5,50%)
Jumlah Program:			109

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022, data diolah

Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran per program pada tahun 2021 terbanyak pada kriteria sangat tinggi (91%≤100%) yaitu 78 (71,56%) program, dan yang terendah pada kriteria rendah (51%≤65%) sebanyak 3 (2,75%) program.

- b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja, Tahun Sebelumnya dan Target Dalam RPJMD

Berdasarkan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Magelang Tahun 2021, dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja selama tahun 2021 terhadap indikator makro berjumlah 5 tujuan strategis dengan 9 indikator kinerja. Selain Indikator makro terdapat indikator mikro yang diukur sebagai kinerja Kepala Daerah, jumlah sasaran strategis sebanyak 15 sasaran strategis dengan 24 indikator kinerja. Perjanjian Kinerja didasarkan pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bupati Magelang Tahun 2021 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Magelang. LPPD pada pembahasan ini merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang disusun berdasarkan target pada tahun II (kedua) dari RPJMD Kabupaten Megelang 2019-2024.



Pada evaluasi pencapaian kinerja tahun 2021 masih terdapat penggunaan data sementara atau tahun lalu, hal ini dilakukan karena data tersebut sampai batas periode pelaporan belum lengkap dikeluarkan oleh perangkat daerah, Badan Pusat Statistik atau lembaga yang berwenang mengeluarkan data tersebut.

1) Evaluasi Tujuan Strategis

i) Tujuan Strategis: Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Pada tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia diukur dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hasil pencapaian indikator sebagai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka (0-100)	69,87	69,83	70,12	100,42	70,57	99,36
						100,42		99,36

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas capaian kinerja tujuan strategis meningkatnya kualitas sumber daya manusia tahun 2021 sebesar 70,12 dengan pencapaian terhadap target sebesar 100,42% (sangat baik), dimana target yang ditetapkan dapat terlampaui, sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD target kinerja telah mencapai 99,36% (sangat baik).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Magelang mencapai 70,12 mengalami kenaikan sebesar 1,73 dari tahun 2017 yang sebesar 68,39, dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,43. Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

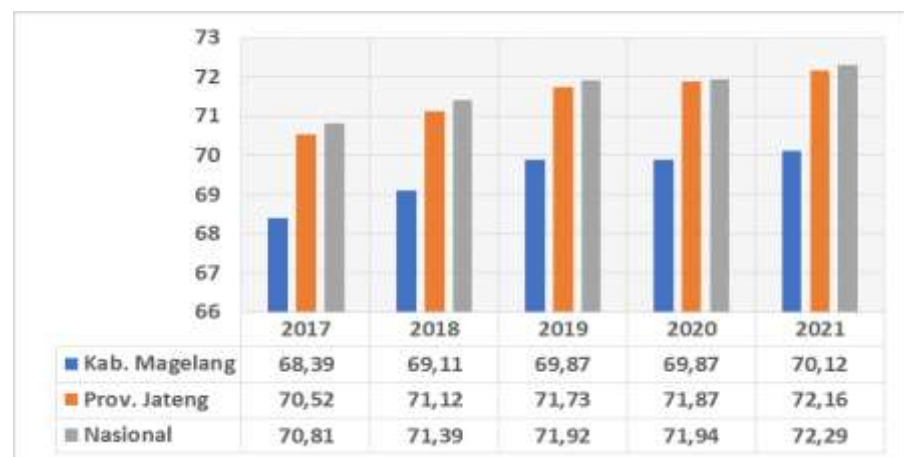


Tabel 2.12.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang
Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2017-2021

Dimensi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup	Tahun	73,39	73,47	73,56	73,72	73,88
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,48	12,53	12,54	12,55
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,41	7,57	7,77	7,78	7,79
Standar Hidup Layak						
Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuaikan)	Ribu Rp	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
IPM Kabupaten Magelang		68,39	69,11	69,87	69,87	70,12

Sumber: BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah, 2022

Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 berada pada status “sedang” (nilai berkisar antara $60 \leq \text{IPM} \leq 70$) dan pada tahun 2021 pada status “tinggi” (nilai berkisar antara $70 \leq \text{IPM} \leq 80$). Walaupun berstatus tinggi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.1.
IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2017-2021

Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada di urutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.



Tabel 2.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota eks
Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Purworejo	71,31	71,87	72,50	72,68	72,98
Kabupaten Wonosobo	66,89	67,81	68,27	68,22	68,43
Kabupaten Magelang	68,39	69,11	69,87	69,87	70,12
Kabupaten Temanggung	68,34	68,83	69,56	69,57	69,88
Kota Magelang	77,84	78,31	78,80	78,99	79,43

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

ii) Tujuan Strategis: Meningkatkan Paritas Daya Beli Masyarakat

Pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat diukur dalam 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: Inflasi, Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dan Angka Kemiskinan. Berikut capaian tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat:

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatkan Paritas
Daya Beli Masyarakat Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Inflasi ^{*)}	persen	1,56	2,5-4,0	2,18	112,80	2,5-4,0	114,00
2 Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	ribu rupiah	9.301,000	9762,42	9301	95,27	10.400,12	89,43
3 Angka Kemiskinan ^{*)}	persen	11,27	8,78-9,78	11,91	81,85	6,83-7,83	25,62
					96,64		76,35

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Catatan: *) Indikator negatif

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat pada tahun 2021 sebesar 96,64% (sangat tinggi) dan dapat melalui target kinerja pada tahun tersebut, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 76,35% (tinggi).

Pada tahun 2019 laju inflasi Kabupaten Magelang lebih lambat dari laju inflasi Provinsi Jawa Tengah 2,81 maupun Nasional 2,72. Pada tahun 2020 laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 1,56%, sama dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah. Namun pada tahun 2021, inflasi Kabupaten Magelang lebih cepat laju inflasinya dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2017-2021 disajikan pada gambar berikut ini:





Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2022

Gambar 2.2
Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2017-2021

Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 pengeluaran per kapita riil Kabupaten Magelang meningkat 9,42%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,30% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 1,57% per tahun nasional 1,16% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah.

Tabel 2.15
Pengeluaran Per Kapita Riil (Yang Disesuaikan) Kabupaten
Magelang Tahun 2017-2021

Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp)	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	8.627	9.025	9.387	9.301	9.440
Provinsi Jawa Tengah	10.377	10.777	11.102	10.930	11.034
Nasional	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156

Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Kemiskinan merupakan salah satu indikator makro, terutama untuk mengukur perkembangan ekonomi suatu wilayah, kemiskinan sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan selalu menjadi fokus yang bisa diintervensi oleh pemerintah dan menjadi prioritas dalam rencana pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja persentase penduduk miskin pada tahun 2021 adalah:



1. Adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020, yang berdampak signifikan terhadap sektor ekonomi.
2. *Database* kemiskinan belum sepenuhnya digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Penanggulangan kemiskinan belum memaksimalkan integrasi berbagai sektor dan *stakeholder* yang terkait, sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
4. Kenaikan biaya hidup masyarakat yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan masyarakat khususnya pekerja buruh dan kaum petani.

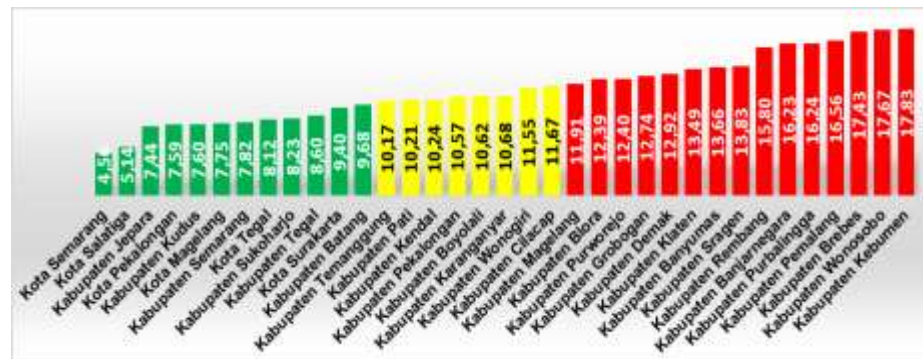
Angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2021 ini linier dengan kenaikan di level nasional, provinsi dan 34 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kab Magelang Periode Maret 2021 berada di atas Provinsi (11,79) dan Nasional (10,14%). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2021

Gambar 2.3
Perbandingan Capaian Persentase Kemiskinan
Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional 2017-2021

Dibandingkan dengan capaian 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Magelang berada pada peringkat 21 (dua puluh satu) atau naik 1 strip dibandingkan capaian tahun 2020 (peringkat 20). Selengkapnya bisa dilihat pada grafik di bawah ini:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2021

Gambar 2.4.
Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota
di Provinsi Jawa Tengah (Maret 2021)

Dilihat dari grafik di atas, dengan posisi angka kemiskinan berada diatas provinsi dan nasional, maka pada tahun 2021 Kabupaten Magelang masuk menjadi kabupaten zona merah bersama 14 (empat belas) kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Diperkirakan pada tahun 2023 masih akan terjadi perlambatan penurunan penduduk miskin di Kabupaten Magelang, mengingat adanya potensi masyarakat yang rentan miskin/hampir miskin akan jatuh di bawah garis kemiskinan. Adanya PHK masal dan kelesuan beberapa sektor ekonomi yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan masyarakat akan menjadi faktor utama penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin.

Guna menjaga jumlah penduduk miskin, Pemerintah Kabupaten sudah melakukan langkah-langkah strategis melalui *refocusing* belanja dalam APBD 2021 untuk diarahkan mengatasi dampak Covid-19, antara lain melalui strategi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan hampir miskin, melanjutkan penyaluran bantuan sosial berupa Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang difokuskan untuk warga yang langsung terdampak pandemi Covid-19. Hal ini menjadi salah satu upaya untuk bisa menjaga agar kemiskinan tidak semakin melonjak akibat Covid-19. Adapun sasaran pemberian bantuan sosial dan jaring pengaman sosial yang dianggarkan dari APBD Kabupaten tidak hanya untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi juga termasuk masyarakat diluar data DTKS yang terdampak Covid-19 baik langsung ataupun tidak langsung.

iii) Tujuan Strategis: Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender

Pada tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender diukur dengan indikator kinerja tujuan indeks pembangunan gender. Capaian tujuan strategis meningkatnya pembangunan berbasis gender sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya
Pembangunan Berbasis Gender Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks Pembangunan Gender	angka (0-100)	91,81	93,31	91,89	99,68	94,41	98,83
					99,68		98,83

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Catatan: **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya paritas daya beli masyarakat pada tahun 2021 sebesar 99,68% (sangat tinggi) dimana dapat melampaui target pada tahun yang bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,73% (sangat tinggi).

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Hal ini dapat digambarkan apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), didukung peningkatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

IPG Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2021 mengalami *trend* yang fluktuatif, berada pada angka 92,23 tahun 2018, mengalami penurunan menjadi 91,78 pada tahun 2019, naik kembali menjadi 91,81 pada tahun 2020 dan 91,89 pada tahun 2021. Capaian IPG di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 berada di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi masih lebih baik dibandingkan capaian nasional.



Tabel 2.17
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Magelang
Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	91,95	92,23	91,78	91,81	91,89
Provinsi Jawa Tengah	91,94	91,95	91,89	92,18	92,14
Nasional	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2022

Kabupaten Magelang masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain: masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan belum optimalnya pemenuhan kesehatan perempuan, khususnya ibu yang melahirkan, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan kebijakan di bawahnya dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Magelang serta Surat Edaran Bupati tentang Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender* (PPRG) pada Perangkat Daerah se-Kabupaten Magelang, diharapkan semua OPD melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang berperspektif gender.

Guna mempercepat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, penggunaan data terpilah gender mutlak diperlukan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender.

Di Kabupaten Magelang, beberapa data khususnya data kependudukan sudah disajikan pilah gender. Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, dan lain-lain.



Melalui penganggaran responsif gender, diharapkan akan bisa mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, dan partisipasi dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam memilih dan menikmati hasil pembangunan. Adapun implementasi dari anggaran responsif gender diharapkan setiap OPD melampirkan dokumen pendukung yang mengakomodir pengarusutamaan gender dalam perencanaan program dan kegiatan, dengan alat analisis GAP (*Gender Analysis Pathway*)/ PROBA dan GBS (*Gender Budget Statement*) dalam Pra Rencana Kerja Anggaran (Pra RKA).

iv) Tujuan Strategis: Meningkatnya Daya Saing Daerah

Pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja tujuan, yaitu: laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita dan cakupan infrastruktur wilayah berkelanjutan. Capaian tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah sebagai berikut:

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatnya
Daya Saing Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	-1,68	5,2-5,7	-1,68	-30,00	5,5-6,0	-28,00
2 PDRB Per Kapita	juta rupiah	24,94	28,21	24,94	88,41	32,72	76,22
3 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	persen	66,86 ^{**})	72,98	66,6	91,61	83,29	80,27
					50,01		42,83

Sumber : BPS Kabupaten Magelang, 2022

Catatan : **)Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah pada tahun 2021 sebesar 50,01% (rendah), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 42,83% (sangat rendah). Rendahnya capaian tujuan strategis meningkatnya daya saing daerah dikarenakan indikator laju pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, hal ini dikarenakan kondisi Covid-19 menyebabkan laju pertumbuhan mengalami kemerosotan yang sangat tajam.



Adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan sosial dan ekonomi mempengaruhi kondisi perekonomian dari sisi permintaan dan penawaran. Akibatnya terjadi penurunan pendapatan yang selanjutnya berdampak pada menurunnya paritas daya beli masyarakat/*Purchasing Power Parity (PPP)*.

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), PPP Tahun 2020 di Kabupaten Magelang sebesar Rp9.301.000,00 per orang per tahun. Nilai ini menurun 0,9% dari tahun 2019 yaitu Rp9.387.000,00 per orang per tahun. Apabila dikaitkan dengan terjadinya pandemi Covid-19, penurunan PPP ini sangat wajar dialami oleh Kabupaten Magelang karena sektor-sektor penggerak perekonomian utama di Kabupaten Magelang adalah sektor-sektor yang paling rentan terhadap ancaman dampak pandemi Covid-19 yaitu sektor perdagangan dan industri termasuk di dalamnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pertanian dan peternakan, serta sektor pariwisata.

Adapun dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UKM berdasarkan hasil kajian dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dampak pada sisi produksi dan dampak pada sisi pemasaran. Secara rinci, dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penurunan sampai dengan penghentian produksi.

Hampir semua UKM mengalami penurunan produksi kecuali UKM yang tergabung dalam Klaster Salak Nglumut. Rata-rata penurunan produksi adalah sebesar 55,5%. Adapun UKM yang berhenti produksi adalah sebanyak 23,1%.

2. Penurunan omset usaha.

Semua UKM mengalami penurunan omset usaha rata-rata 57,8%.

3. Berhenti memasarkan hasil produksi.

Sebanyak 20,3% UKM berhenti melakukan pemasaran hasil produksi karena tidak ada permintaan dari konsumen.

Lebih lanjut kajian dilakukan dengan menginventarisir beberapa harapan dari pelaku UKM dalam rangka menangani dampak pandemi Covid-19. Adapun harapan dari pelaku UKM tersebut meliputi bantuan permodalan, pemasaran, sarana produksi, perijinan, dan pendampingan.



Sejalan dengan hasil kajian yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberian Stimulus Ekonomi Kepada Pelaku Usaha Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021. Stimulus ekonomi diberikan kepada masyarakat baik perorangan, kelompok, koperasi maupun badan usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan modal usaha dan pembelian produk.

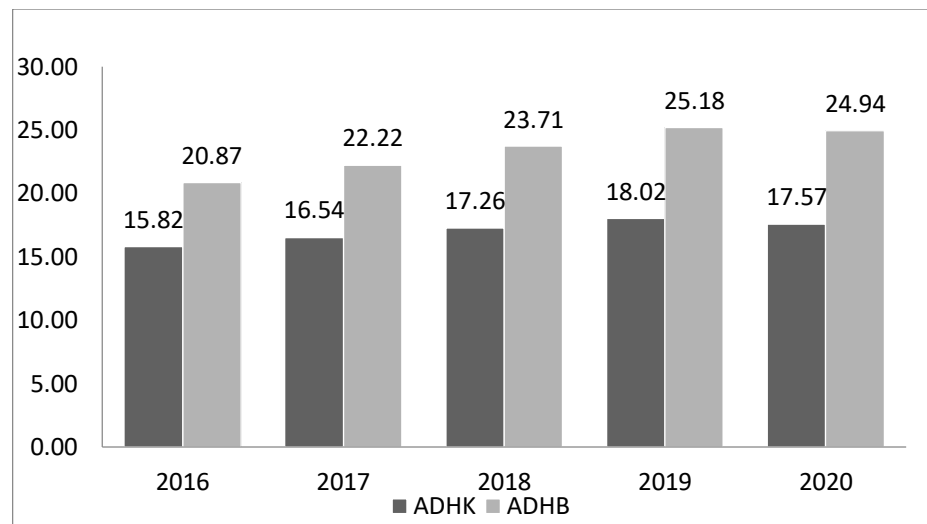
Besaran stimulus ekonomi diatur sebagai berikut:

1. bantuan modal untuk pelaku usaha perorangan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. bantuan modal untuk pelaku usaha berbentuk kelompok, koperasi, dan badan usaha sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan
3. pembelian produk dengan harga satuan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk pajak.

Penerima stimulus ekonomi yaitu pelaku usaha yang terdaftar dalam basis data calon penerima stimulus ekonomi melalui Sistem Informasi Jaring Pengaman Ekonomi. Terhadap calon penerima stimulus ekonomi dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan saebagai penerima stimulus ekonomi, yaitu dalam hal masih menjalankan usahanya atau sudah tidak menjalankan usahanya namun jika diberikan bantuan stimulus ekonomi usahanya dapat berjalan kembali. Harapan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dengan adanya stimulus ekonomi bagi pelaku usaha adalah mendorong stabilitas iklim berusaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang.

Pada tahun 2016 PDRB ADHK per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp15,82 juta/tahun dan meningkat menjadi Rp17,57/tahun pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2016 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Magelang sebesar Rp.20,87 juta /tahun dan meningkat menjadi Rp24,94 juta /tahun pada tahun 2020. Data PDRB Per Kapita (ADHK dan ADHB), selengkapnya disajikan pada gambar berikut.

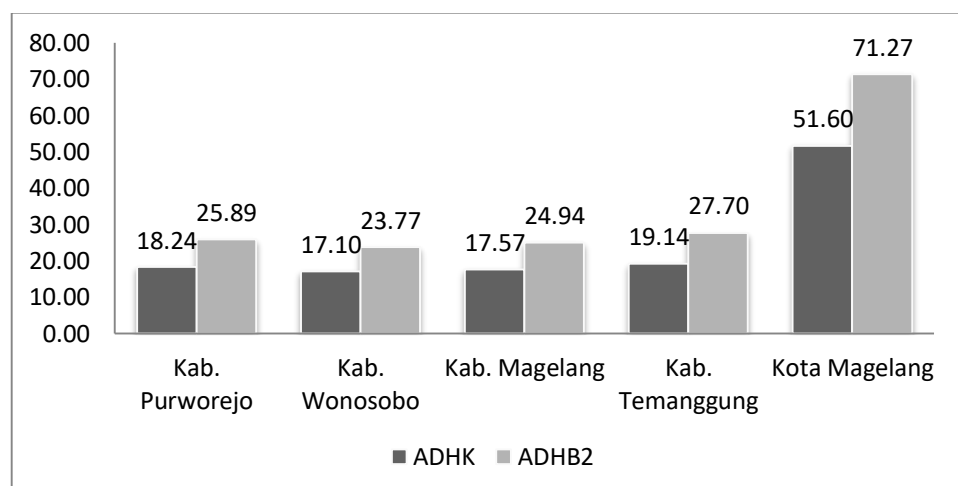




Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2021

Gambar 2.5.
PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang
Tahun 2016-2020

PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB Kabupaten Magelang disandingkan dengan kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu, berada pada urutan kedua dari bawah. PDRB Perkapita (ADHK dan ADHB) Kabupaten Magelang hanya lebih tinggi dari Kabupaten Wonosobo. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.6.
PDRB Perkapita kabupaten/kota se-eks Karesidenan Kedu
Tahun 2020

Ketercapaian Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan selama Tahun 2017-2021 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.19
Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan
Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	70,95	71,93	71,18	71,30	71,41
2.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	54,00	56,55	61,43	61,90	63,725*
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	%	62,47	64,24	66,30	66,60	67,57*

Sumber: Bappeda dan Litbangda, data hasil olahan, 2022

Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah berkelanjutan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kinerja beberapa urusan dalam satu komposit. Komponen cakupan pembangunan infrastruktur terdiri dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. IKLH digunakan untuk mengukur kinerja urusan lingkungan hidup. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah menjadi tolak ukur kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta urusan perhubungan.

Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, maupun cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk, yaitu:

1. Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang

Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi memiliki 13 komponen pembentuk yaitu:

- 1) cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- 2) persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik;



- 3) cakupan layanan jaringan irigasi; cakupan layanan sumber daya air;
 - 4) cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik;
 - 5) persentase terbangunnya *Landmark*;
 - 6) cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik;
 - 7) cakupan layanan air minum;
 - 8) cakupan layanan sanitasi;
 - 9) cakupan sarana prasarana ke PU-an;
 - 10) cakupan layanan jasa konstruksi;
 - 11) persentase dokumen rekomendasi perijinan;
 - 12) Persentase kesesuaian tata ruang; dan
 - 13) cakupan kinerja pertanahan.
2. Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan atau cakupan penyelenggaraan layanan perhubungan
- Kinerja urusan perhubungan diukur melalui indikator cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan yang dibentuk oleh komponen/unsur:
- 1) persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan;
 - 2) persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengaman dan keselamatan lalu lintas;
 - 3) persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan
 - 4) persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Di bawah ini, merupakan capaian cakupan pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Magelang tahun 2017-2021.

Tabel 2.20.

Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang	%	53,06	57,83	62,80	69,90	73,43*
2.	Cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan	%	54,93	55,27	60,05	53,89	54,02
3.	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	%	54,00	56,55	61,43	61,90	63,725*

Sumber: DLH, DPUPR, Dishub: 2022



- v) Tujuan Strategis: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel

Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Tujuan Strategis Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	persen	61,07	67,25	61,07**)	93,32	72,39	85,74
					93,32		85,74	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2022
Catatan : **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum tersedia.

Dikarenakan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum keluar, maka data capaian mengacu pada hasil penilaian tahun 2020. Pada tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada tujuan strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel pada tahun 2021 sebesar 93,32% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 85,74% (tinggi). Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan, serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumberdaya manusia aparatur.

Pencapaian Reformasi Birokrasi diukur dengan Indeks reformasi birokrasi yang merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti korupsi, pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Magelang baru keluar dua kali, yaitu pada tahun 2018 mendapatkan nilai 56,45 dan pada tahun 2019 mendapat nilai 62,78.



c. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

- 1) Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan
 Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22.
 Capaian Kinerja Sasaran Strategis
 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Pendidikan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,78	8,00	7,79	97,38	8,41	92,63
2 Harapan Lama Sekolah	tahun	12,54	12,92	12,55	97,14	13,27	94,57
3 Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	persen	97	94,79	92,67	97,76	95,94	96,59
					97,42		94,60

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada Sasaran strategis Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan pada tahun 2021 sebesar 97,42% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 94,60% (sangat tinggi). Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pada tahun 2021.

Kabupaten Magelang mencapai 7,79 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.

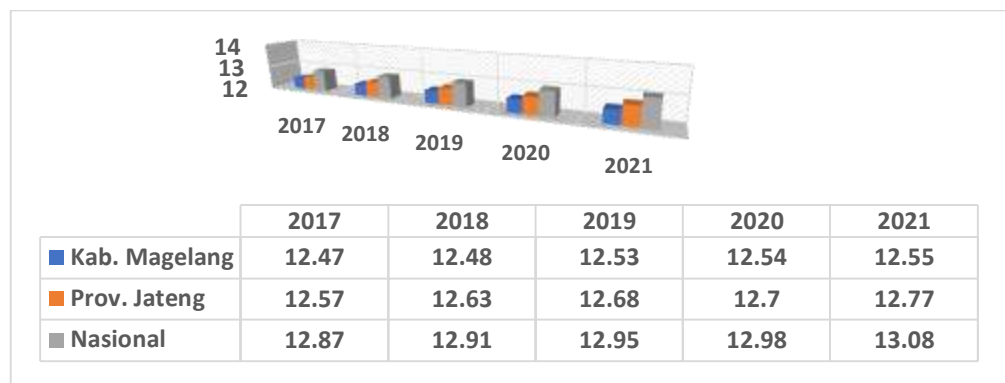


Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.7.
 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional
 Tahun 2017-2021



Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebesar 12,55. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2017 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,47 (2017) menjadi 12,55 (2021). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 lebih rendah dari provinsi dan nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Gambar 2.8.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B setiap sekolah/madrasah di Indonesia harus mengikuti proses akreditasi. Hasil dari akreditasi sekolah/madrasah bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk pemetaan mutu pendidikan, pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Peringkat akreditasi sekolah terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu: A (Amat Baik) dengan nilai $85 < \text{nilai} \leq 100$; B (Baik) dengan nilai $70 < \text{nilai} \leq 85$ dan C (Cukup) dengan nilai $56 \leq \text{nilai} \leq 70$. Sekolah dikatakan layak dan cukup bermutu apabila berakreditasi minimal B.

Tabel 2.23.

Persentase SD/MI dan SMP/MTs yang Berakreditasi Minimal B Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase SD berakreditasi minimal B.	Persen	98,68	99,34	99,35	99,17	98,33
2	Persentase SMP berakreditasi minimal B.	Persen	86,82	88,37	88,38	87,02	87,02
3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	Persen	92,75	93,86	93,87	93,10	92,67



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

Persentase SD berakreditasi minimal B di Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 98,18%, naik menjadi 99,35% pada tahun 2020, dan turun menjadi 99,17% pada tahun 2021. Persentase SMP berakreditasi minimal B sebesar 88,19% pada tahun 2017, mengalami penurunan menjadi 87,02% pada tahun 2021. Penurunan ini dikarenakan mulai tahun 2020 ada perubahan dalam penilaian, dimana *grade* penilaian awal dengan nilai 86-100 kriterianya A, sejak tahun 2020 gradenya naik yaitu nilai 91-100 kriterianya A. Walaupun belum mencapai 100%, persentase sekolah yang berakreditasi minimal B ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Magelang sudah cukup baik.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan Rp171.667.979.376,00 dengan realisasi sebesar Rp165.001.758.709,00 (96,12%), realisasi sangat rendah karena realisasi anggaran belum selesai diinput. Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kinerja pembangunan pendidikan terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 2. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
 3. Program Pembinaan Perpustakaan
 4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 6. Program Pengembangan Kebudayaan
 7. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 2) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kesehatan
Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan, dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatkan
Kinerja Pembangunan Kesehatan Tahun 2021

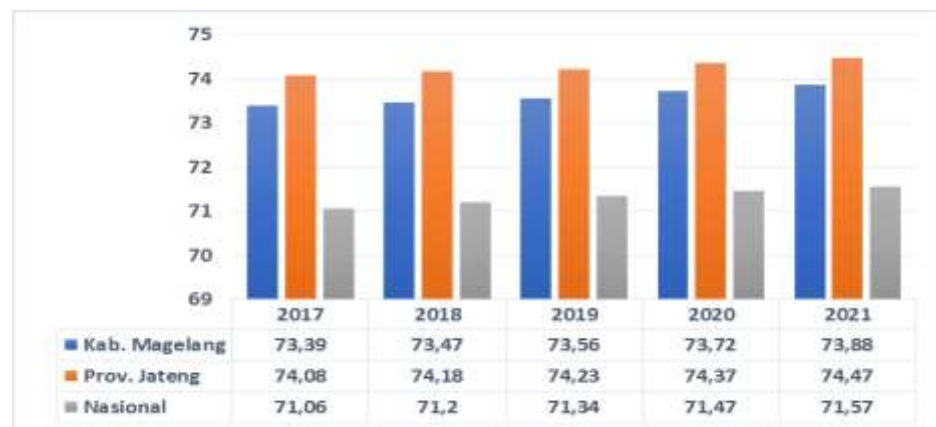
Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Angka Harapan Hidup	tahun	73,72	73,61	73,88	100,37	73,75	100,18
					100,37		100,18



Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2021 sebesar 100,37% (sangat tinggi) dan dapat melampaui target yang ditetapkan di tahun bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100,18% (sangat tinggi).

Umur Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2021 Kabupaten Magelang mencapai 73,88 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2017 yang sebesar 73,39. Kenaikan UHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah pertumbuhan UHH Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022

Gambar 2.9.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan Rp.234.682.716.963 dengan realisasi sebesar Rp.168.498.121.043 (71,80%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan terdiri:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
- 3) Sasaran: Menurunnya Jumlah PMKS



Capaian kinerja sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Menurunnya
Jumlah PMKS Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)		
			Target	Capaian	%	Target	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Persentase penurunan PMKS	persen	0,63	0,58	0,62	106,90	0,58	106,90
						106,90		106,90

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan pada tahun 2021 sebesar 106,90% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 106,90% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Penanganan PMKS dibagi ke dalam dua kelompok yaitu PMKS potensial dan non potensial. Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 jumlah PMKS yang ditangani mengalami kecenderungan naik. Dari 38.001 orang pada tahun 2017, menjadi 147.162 orang pada tahun 2021. Kenaikan yang cukup tajam ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di awal tahun 2020.

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diketahui dari jumlah persentase yang ditangani dibagi dengan jumlah PMKS yang ada. Berdasarkan data tahun 2017-2021, persentase PMKS yang tertangani mengalami tren yang meningkat. Lebih jelasnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.26.
Penanganan PMKS di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	PMKS yang tertangani	Orang	38.001	79.069	67.715	143.179	147.162
2.	PMKS yang ada	Orang	131.222	170.684	136.993	136.993	170.685
3.	Penanganan PMKS	%	28,95	46,32	42,13	104,52	86,22

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022



Perkembangan penanganan PMKS di Kabupaten Magelang dari tahun 2017-2021 cenderung fluktuatif, hal ini disebabkan karena permasalahan sosial bersifat sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Adanya kemajuan teknologi dan perbaikan kesejahteraan tidak secara signifikan akan mengurangi masalah sosial, karena kemajuan teknologi dan peningkatan kesejahteraan bisa menyebabkan permasalahan sosial baru. Adapun kenaikan penanganan PMKS yang cukup tajam, tetapi pada tahun 2021 menjadi 86,22% diakibatkan karena tidak ada bantuan sosial terencana kepada PMKS.

Adapun faktor pendorong tercapainya indikator kinerja persentase penurunan PMKS dan kategori kabupaten layak anak adalah:

1. Tersedianya sumber daya yang memadai dalam penanganan PMKS di Kabupaten Magelang;
2. Peran lintas sektor non pemerintahan dalam kontribusi dalam penanganan PMKS khususnya dari sisi pembiayaan;
3. Adanya regulasi daerah yang mendukung pencapaian kabupaten layak anak berupa peraturan daerah dan peraturan bupati.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis menurunnya jumlah PMKS sebesar Rp649.067.000,00 dengan realisasi sebesar Rp635.729.662,00 (97,95%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kinerja pembangunan kesehatan terdiri dari:

1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 4) Sasaran Strategis: Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPKMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks Ketahanan Pangan	Angka (0-100)	79,51	79,47	81,27	102,27	82,62	98,37
					102,27		98,37

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, 2022



Catatan: **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah pada tahun 2021 sebesar 102,27% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,37% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah. Hal tersebut tergambar dalam beberapa hal berikut.

1. Regulasi Ketahanan Pangan

Untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap ketahanan pangan daerah, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menyusun regulasi terkait ketahanan pangan. Regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Magelang diwujudkan dalam bentuk peraturan bupati yang untuk pertama kalinya diundangkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang. Sehubungan dengan adanya perubahan SOTK baru, peraturan bupati tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Magelang.

2. Ketersediaan Pangan Utama Beras

Ketersediaan pangan utama beras selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang baik. Maka secara ketersediaan, Kabupaten Magelang sudah mencukupi kebutuhan pangan rakyatnya, jika dibandingkan dengan kebutuhan beras perkapita per tahun.

3. Pola Pangan Harapan (PPH)

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Pola Pangan Harapan (PPH). Terdapat dua pola pangan harapan, yaitu PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi.

4. Stabilitas Harga Pangan

Stabilitas harga pangan adalah kepentingan bersama antara produsen pangan dan konsumen. Kepentingan produsen pangan adalah menginginkan adanya kepastian usaha karena harga yang stabil dapat meningkatkan perencanaan produksi dan tentu saja adalah *output* yang lebih baik. Stabilitas Harga Pangan



Kabupaten Magelang dari tahun 2016 sampai dengan 2021 cenderung fluktuatif.

5. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras di Kabupaten Magelang. Konsumsi beras tahun 2021 berdasarkan hasil prognosis terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 111,58 kg/perkapita/tahun. Daya dukung pangan yang dihitung berdasarkan rasio perbandingan kebutuhan beras terhadap produksi beras, yaitu indeks Daya Dukung Lahan untuk pangan (DDL).

6. Ketersediaan komoditas selain beras

Pada tahun 2021 ketersediaan komoditas selain beras mengalami surplus kecuali untuk kedelai, kacang hijau, gula, daging sapi, susu dan Bawang merah defisit.

7. Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan (JEP 1)

Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (JEP 1) merupakan hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan serta hasil peternakan, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas lingkungan untuk mendukung penyediaan pangan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan daerah sebesar Rp817.690.027,00 dengan realisasi sebesar Rp797.732.652,00 (97,56%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terdiri dari:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

5) Sasaran strategis: Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas, dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Layanan Hunian Yang Layak Dan Berkualitas Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Cakupan hunian layak dan berkualitas	persen	67,73	68,66	73,11	106,48	95,81	76,31
					106,48		76,31

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas pada tahun 2021 sebesar 106,48% (sangat tinggi) capaian kinerja tersebut melampaui target kinerja pada tahun yang bersangkutan, sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 76,31% (tinggi). Upaya mewujudkan sasaran daerah bidang perumahan tersebut diantaranya melalui penyediaan dan peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh dan penyediaan sarana dan prasarana perumahan. Peningkatan rumah layak huni diarahkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin yang didasarkan pada hasil verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang tidak masuk pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari perangkat daerah pelaksana;
3. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
4. Pemenuhan SPM Perumahan Rakyat (Permen PUPR Nomor 29/2018) tentang penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten.



Tabel 2.29.
Kondisi Perumahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penanganan RTLH	Unit	14.624	20.737	29.240	32.852	36.628
2.	Jumlah RTLH Yang Harus Ditangani	Unit	66.273	65.830	65.830	65.830	65.830
3.	Penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Unit	13	9	-	-	-
4.	Jumlah rumah rusak akibat bencana	Unit	13	11	-	-	-
5.	Jumlah Rumah Layak Huni	Unit	277.495	291.398	310.722**	318.930	321.467
6.	Jumlah Rumah	Unit	337.246	349.150	341.893**	360.079	360.079
7.	Rasio Rumah Layak Huni	-	0,82	0,83	0,91**	0,885	0,892

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2022

**) sensus BPS 2019

Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang sejak tahun 2008, melalui sumber pendanaan baik yang berasal dari APBD dan APBN. Selama periode 2008 sampai dengan 2021, pemerintah telah melakukan penanganan RTLH sebanyak 36.628 unit. Berdasarkan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, data *backlog* rumah di Kabupaten Magelang mencapai 55.735 unit, dimana dari 419.671 KK yang terdata, baru 360.079 unit rumah yang terbangun. Sedangkan jumlah perumahan yang telah dibangun di Kabupaten Magelang hingga tahun 2020 sebesar 113 perumahan. Dari 113 perumahan yang dibangun, baru ada satu perumahan yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kabupaten Magelang. Hal itu menyebabkan pemerintah daerah belum optimal mengalokasikan anggaran dalam pemeliharaan sarana dan prasarannya.

Tabel 2.30.
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Kawasan kumuh	Ha	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20
2.	Luas Kawasan kumuh yg sudah tertangani (Simulasi perhitungan pengurangan kumuh sesuai PermenPU 14/PRT/M/2018)	Ha		66,53	77,74	77,74	97,20
3.	Persentase kawasan kumuh tertangani	%		68,45	79,98	79,98	100
4.	Luas Kawasan kumuh yg belum tertangani	Ha		30,67	19,46	19,46	0



No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
5.	Persentase kawasan kumuh yang belum tertangani	%		31,55	20,02	20,02	0

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2022

Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Magelang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/498/KEP/25/2014 tanggal 8 Desember 2014 sebesar 85,09 ha, meliputi 9 kawasan yang tersebar di Kecamatan Secang, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Muntilan, dan Kecamatan Borobudur. Melalui penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) pada tahun 2017, luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan diverifikasi menjadi 97,2 ha. Berdasarkan data tahun 2021, capaian penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah mencapai 100% (97,2). Sehingga pada tahun tersebut, Kabupaten Magelang menyusun dokumen RP2KPKP (Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh), dimana dokumen ini disusun dengan tujuan mereview luasan Kawasan kumuh.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, baik melalui dana APBN maupun APBD. Sampai dengan tahun 2021, upaya pengurangan kawasan kumuh mengalami kenaikan yang signifikan. Hasil pengurangan atau penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang yang dilakukan berdasarkan simulasi perhitungan pengurangan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang ditunjukkan seperti pada tabel di atas. Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Magelang dilaksanakan melalui penataan lingkungan dan melalui peningkatan rumah tidak layak huni atau peningkatan kualitas rumah swadaya. Upaya lain dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan mencegah munculnya permukiman kumuh yang baru adalah dengan penyediaan sarana prasarana perumahan melalui pembangunan Prasarana Sarana Utilitas (PSU).

Salah satu PSU yang perlu dibangun seiring dengan tumbuhnya perumahan di Kabupaten Magelang adalah Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh pemerintah. TPU ini dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan PSU bagi warga pendatang atau warga yang tinggal di perumahan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas sebesar



Rp1.902.697.507,00 dengan realisasi sebesar Rp1.767.877.035,00 (92,91%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas terdiri:

1. Program Pengembangan Perumahan
2. Program Kawasan Permukiman
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

- 6) Sasaran strategis: Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka
Capaian kinerja sasaran strategis terkendalnya tingkat pengangguran terbuka, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ^{*)}	persen	4,27	2,25-2,65	5,03	10,19	2,25-2,55	2,75
					10,19		2,75

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis terkendalnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 10,19% (sangat rendah), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 2,75% (sangat rendah), rendahnya tingkat pengangguran tersebut sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dimana terjadi penutupan tempat usaha yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja.

Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Magelang cenderung naik. Jika pada tahun 2017 TPT mencapai 2,44% maka pada tahun 2021 menjadi 5,03%. Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah penduduk angkatan kerja meningkat sebesar 52.295 orang. Jika pada tahun 2017 jumlah penduduk angkatan kerja mencapai 722.295 orang maka pada tahun 2021 meningkat menjadi 774.590 orang. Data tingkat pengangguran terbuka disajikan pada tabel berikut.

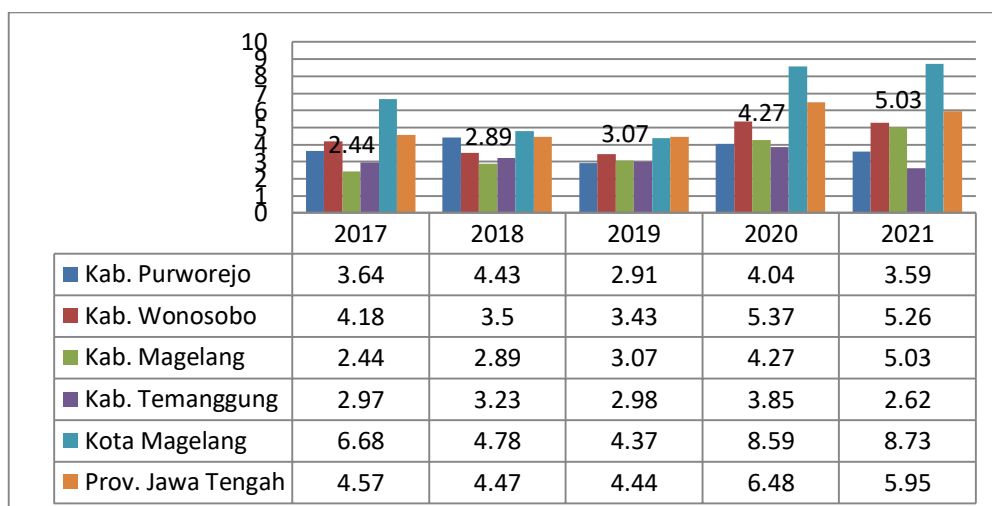


Tabel 2.32.
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	17.644	20.401	23.114	33 080	38.980
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	722.295	699.907	741.101	774.364	774.590
3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Magelang	%	2,44	2,91	3,12	4,27	5,03
4	Tingkat Pengangguran Terbuka Prov. Jateng	%	4,57	4,51	4,49	6,48	5,95
5	Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional	%	5,33	5,13	5,01	7,07	NA

Sumber: BPS Kabupaten Magelang dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Perbandingan tingkat pengangguran terbuka pada Kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 2.10.
Perbandingan TPT Kabupaten/Kota
di Karesidenan Kedu dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Posisi relatif TPT Kab. Magelang antar tahun 2017-2021 dibandingkan dengan rata-rata TPT Kabupaten/Kota di Karesidenan Kedu, selalu lebih rendah dari TPT Kota Magelang dan selalu lebih tinggi daripada Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Purworejo kecuali pada tahun 2017 dan 2018. Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkendalinya tingkat pengangguran terbuka sebesar Rp1.625.097.770,00 dengan realisasi sebesar



Rp1.558.127.236,00 (95,88%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terkendalinya tingkat pengangguran terbuka terdiri dari:

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial

7) Sasaran strategis: Meningkatnya Keberdayaan Gender

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Keberdayaan Gender Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	angka (0-100)	69,03 ^{**)}	69,63	69,65 ^{**)}	100,46	70,53	98,75
2 Kategori Kabupaten Layak Anak	kategori	Nindya ^{**)}	Nindya	Nindya	100,00	Utama	75,00
					100,23		86,88

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Catatan: **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender pada tahun 2021 sebesar 100,23% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 86,88% (tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut sesuai dengan target pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD.

Upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berdasarkan data tahun 2017-2021, perkembangan angka IDG di Kabupaten Magelang cenderung fluktuatif, adapun capaian terakhir tahun 2020 sebesar 69,65. Perbandingan capaian IDG Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah



dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.34.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Magelang
Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Kabupaten Magelang	62,43	71,21	67,74	69,65	NA
Provinsi Jawa Tengah	75,10	74,03	72,18	71,73	NA
Nasional	71,74	72,10	75,24	75,57	NA

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Pada tahun 2017-2021, capaian IDG Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif, mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 69,65 menjadi 69,65 pada tahun 2020. Jika dibandingkan capaian provinsi dan nasional, IDG Kabupaten Magelang Tahun 2020 berada pada posisi yang lebih rendah. Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan politik, pengambilan keputusan (sosial) dan aksesibilitas terhadap sumber daya ekonomi.

Kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Sampai dengan tahun 2021, tingkat desa layak anak di Kabupaten Magelang selalu meningkat tetapi untuk Kecamatan Layak Anak pada tahun 2021 tidak ada peningkatan. Hal ini terjadi karena masih ada pandemi Covid-19, sehingga terjadi *refocusing* terhadap anggaran dimaksud.

Dukungan pemerintah Kabupaten Magelang dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah melalui pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Magelang dengan penguatan gugus tugas kabupaten, kecamatan dan desa, serta meningkatkan pencapaian hasil kegiatan dari klaster-klaster KLA sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kabupaten Layak Anak, meningkatkan peran dan dukungan dunia usaha yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Magelang, serta meningkatkan peran dan dukungan media.



Jumlah desa dan kecamatan layak anak di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.35.
Desa, Kecamatan dan Kabupaten Layak Anak
di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No	Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tingkat Pratama	Desa	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Desa	14	92	94	0	0
3.	Tingkat Nindya	Desa	0	0	0	98	100
4.	Tingkat Utama	Desa	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kecamatan	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kecamatan	5	13	17	17	17
3.	Tingkat Nindya	Kecamatan	0	0	0	0	0
4.	Tingkat Utama	Kecamatan	0	0	0	0	0
1.	Tingkat Pratama	Kabupaten	0	0	0	0	0
2.	Tingkat Madya	Kabupaten	1	1	1	0	0
3.	Tingkat Nindya	Kabupaten	0	0	0	1	1
4.	Tingkat Utama	Kabupaten	0	0	0	0	0

Sumber: Dinsos PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender Rp8.265.799.170,00 dengan realisasi sebesar Rp6.854.823.296,00 (82,93%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya keberdayaan gender terdiri dari:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 2. Program Perlindungan Perempuan
 3. Program Pengendalian Penduduk
 4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 6. Program Perlindungan Khusus Anak
- 8) Sasaran strategis: Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik
- Capaian kinerja sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Tercapainya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Baik Tahun 2021



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	angka (0-100)	71,3	72,14	71,41	98,99	72,20	98,91
					98,99		98,91

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik pada tahun 2021 sebesar 98,99% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 98,91% (sangat tinggi), capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD. Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik Rp16.941.602.576,00 dengan realisasi sebesar Rp14.766.110.073,00 (87,16%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH
 7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 9. Program Pengelolaan Persampahan
- 9) Sasaran strategis: Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur
Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Cakupan Layanan Infrastruktur Tahun 2021



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	persen	69,9	73,81	63,725	86,34	94,38	67,52
					86,34		67,52

Sumber: DPUPR, DPRKP dan Dishub Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur pada tahun 2021 sebesar 86,34% (tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 67,52% (sedang). Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur wilayah dapat dilihat dari cakupan pembangunan infrastruktur wilayah. Cakupan pembangunan infrastruktur wilayah merupakan komposit dari cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan. Baik cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang, serta cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan memiliki komponen/unsur pembentuk.

Komponen/unsur pembentuk cakupan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:

- 1) Cakupan peningkatan ketersediaan jalan dan bangunan pelengkap jalan;
- 2) persentase jalan dan bangunan pelengkap jalan dalam kondisi baik; cakupan layanan jaringan irigasi;
- 3) cakupan layanan sumber daya air;
- 4) cakupan pembangunan gedung pemerintah dan publik;
- 5) persentase terbangunnya *Landmark*;
- 6) cakupan bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik;
- 7) cakupan layanan air minum;
- 8) cakupan layanan sanitasi;
- 9) cakupan sarana prasarana ke PU-an;
- 10) cakupan layanan jasa konstruksi;
- 11) persentase dokumen rekomendasi perijinan;
- 12) persentase kesesuaian tata ruang; dan
- 13) cakupan kinerja pertanahan.



Sedangkan cakupan pembangunan infrastruktur perhubungan dibentuk oleh komponen/unsur:

- 1) persentase peningkatan ketersediaan prasarana angkutan jalan;
- 2) persentase peningkatan ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan pendukung pengamanan dan keselamatan lalu lintas;
- 3) persentase peningkatan masyarakat sadar bidang keselamatan berlalu lintas; dan
- 4) persentase peningkatan angkutan umum layak jalan.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur sebesar Rp134.958.049.933,00 dengan realisasi sebesar Rp128.965.912.515,00 (95,56%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya cakupan layanan infrastruktur terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Program Pengembangan Permukiman
5. Program Penataan Bangunan Gedung
6. Program Penyelenggaraan Jalan
7. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
8. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
9. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10) Sasaran Strategis: Meningkatnya daya saing ekonomi daerah

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2021



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Nilai PDRB sektor perdagangan	milyar rupiah	4.306,14	5208,43	4306,14**)	82,68	6227,11	69,15
2 Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	milyar rupiah	6.914,81	7748,63	6914,81**)	89,24	8875,03	77,91
3 Nilai PDRB sektor industri pengolahan	milyar rupiah	7.264,81	8139,8	5160,44	63,40	9613,39	53,68
4 Nilai PDRB sektor pariwisata	milyar rupiah	1.416,24	1630,14	1416,24**)	86,88	1951	72,59
5 Pertumbuhan Investasi	persen	13,00	5	12,56	251,20	5	251,20
6 Cakupan ketentraman & ketertiban masyarakat	persen	83,44	87,21	95,88	109,94	87,76	109,25
7 Indeks Desa Membangun	angka (0-1)	0,688	0,69	0,6953	100,77	0,72	96,57
					112,01		104,34

Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya daya saing ekonomi daerah pada tahun 2021 sebesar 112,01% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 104,34% (sangat tinggi). capaian pada sasaran strategis tersebut dapat terlampaui pada tahun yang bersangkutan maupun pada akhir periode RPJMD. Faktor pendorong tercapainya indikator kinerja pembangunan aspek daya saing adalah:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh OPD di Kabupaten Magelang;
2. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dokumen perencanaan pembangunan berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
4. Adanya transparansi dalam tatakelola pemerintahan;
5. Dukungan kompetensi SDM yang memadai;

Faktor penghambat belum tercapainya indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah belum optimalnya peningkatan pelayanan publik yang efisien dan efektif dikarenakan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan belum sepenuhnya tertata dengan baik.



Adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2021 menimbulkan kerugian secara sosial ekonomi. Akibat yang terjadi saat ini di Kabupaten Magelang antara lain:

1. Aktivitas kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara menurun.
2. Industri meeting, incentive, conference & exhibition mengalami kelesuan
3. Pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran mengalami penurunan tingkat kunjungan
4. Sektor manufaktur, utamanya yang selama ini mengandalkan bahan baku impor mengalami kekurangan bahan baku
5. Sektor transportasi umum mengalami kelesuan
6. Terjadi inflasi pada barang-barang pabrikan
7. Naiknya harga-harga bahan pokok penting
8. Banyak orang kehilangan pekerjaan
9. Timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di seputaran kita atau yang baru kita kenal
10. Kebijakan belajar dari rumah menimbulkan beberapa kesulitan baru bagi kalangan tertentu
11. Rawannya resiko terkena Covid-19 bagi masyarakat khususnya tenaga Kesehatan

Kerugian-kerugian di atas membawa dampak negatif di Kabupaten Magelang, diantaranya adalah:

1. Pengangguran meningkat
2. Kemiskinan meningkat
3. Kesejahteraan masyarakat turun
4. Kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan menurun

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah sebesar Rp114.381.152.362,00 dengan realisasi Rp105.171.246.125,00 (91,95%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya daya saing ekonomi daerah terdiri dari:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
5. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
6. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian



7. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
8. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Perizinan Usaha Pertanian
15. Program Penyuluhan Pertanian
16. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
17. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
18. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
19. Program Pemasaran Pariwisata
20. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
21. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
22. Program Pelayanan Penanaman Modal
23. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
24. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
25. Program Perekonomian dan Pembangunan
26. Program Peningkatan ketenteraman dan Ketertiban Umum
27. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
28. Program Penanggulangan Bencana
29. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
30. Program Penanganan Bencana
31. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
32. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
33. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
34. Program Peningkatan Kerjasama Desa
35. Program Administrasi Pemerintahan Desa
36. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
37. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
38. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
39. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi



11) Sasaran Strategis: Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Nilai AKIP	angka (0-100) (huruf)	60,33(B)	65,02 (B)	60,33(B)**	92,79	71,00 (BB)	84,97
					92,79		84,97

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2022

Catatan: **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2019) karena data belum keluar/ada.

Dikarenakan nilai AKIP tahun 2021 dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum keluar, maka data capaian kinerja tahun 2021 mengacu pada hasil penilaian tahun 2020. Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan pada tahun 2021 sebesar 92,79% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 84,65% (tinggi).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Nilai AKIP Kabupaten Magelang pada tahun 2014 sebesar 51,06 sedangkan di tahun 2018 berada di angka 59,05 (CC), tahun 2019 sebesar 60.10 (B). Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebesar Rp327.164.245.590,00 dengan realisasi Rp245.557.288.358,00 (75,06%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Program Penyelenggaraan Pengawasan
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
7. Program Pengelolaan Arsip
8. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

12) Sasaran strategis: Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan
Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPJMD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka (0-5)	2,94	2,51-2,61	2,67	106,37	2,86-3,1	93,36
					106,37		93,36

Sumber: Diskominfo Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada tahun 2021 sebesar 106,37% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 93,36% (sangat tinggi).

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pada tahun 2021, evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan mendasarkan pada PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, semula penghitungan SPBE mendasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik



(SPBE). Dengan demikian terjadi perubahan nama indikator dari SPBE menjadi indeks tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Indeks tingkat kematangan SPBE didefinisikan sebagai suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan. Untuk tahun 2021, indeks tingkat kematangan SPBE Kabupaten Magelang adalah 2,67 (masuk kategori baik), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 2,94. Penurunan ini dikarenakan adanya perbedaan indikator penilaian yaitu yang tadinya 35 indikator menjadi 47 indikator. Secara substansi sebenarnya bukan mutlak terjadi penurunan nilai, akan tetapi dikarenakan perbedaan indikator penilaian.

Secara umum kekuatan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Magelang adalah pada “domain layanan SPBE dan domain tata kelola SPBE”, dimana tata kelola SPBE secara makro didukung oleh adanya Perda TIK Nomor 3 Tahun 2019. Ada beberapa domain yang menjadi aspek penilaian dalam SPBE yang masih harus diperbaiki yaitu domain kebijakan SPBE dan domain manajemen SPBE. Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp8.892.831.715,00 dengan realisasi Rp8.620.012.349,00 (96,93%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi terdiri dari:

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik
2. Program Aplikasi Informatika
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
5. Program Pencatatan Sipil
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

13) Sasaran Strategis: Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah



Capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Opini BPK	-	WTP ^{**})	WTP	WTP ^{**})	100,00	WTP	100,00
					100,00		100,00

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2021

Catatan: **) Capaian mengacu tahun sebelumnya (2020) karena data belum keluar/ada.

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah pada tahun 2021 sebesar 100% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 100% (sangat tinggi). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Tabel 2.42.
Opini BPK di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021

No.	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: BPPKAD Kabupaten Magelang, 2022

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang sejak tahun 2017 hingga 2021 selalu memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berarti laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi keuangan entitas sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAP). Diharapkan ke depannya hal ini bisa dipertahankan dalam pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip akuntansi yang baik dan wajar sehingga terus memperoleh



hasil WTP. Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah sebesar Rp741.031.332.643,00 dengan realisasi Rp702.889.611.753,00 (94,85%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah terdiri dari:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

14) Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka (0-100)	83,69	83,75	84,22	100,56	86,00	97,93
					100,56		97,93

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, 2022

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2021 sebesar 100,56% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir rpjmd tahun 2024 sebesar 97,93% (sangat tinggi).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan semakin meningkat. Pada Tahun 2014, IKM Kabupaten



sebesar 75,93 atau cukup, pada tahun 2018 sebesar 82,01 atau baik, tahun 2019 sebesar 83,03 (B), tahun 2020 sebesar 83,69 (B) dan 2021 sebesar 84,22 (B). Hal ini mencerminkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Magelang semakin baik. Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik sebesar Rp1.446.958.127,00 dengan realisasi Rp1.411.605.679,00 (97,56%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik terdiri dari:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
2. Program Pendaftaran Penduduk

15) Sasaran strategis: Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Sistem Manajemen Kepegawaian Tahun 2021

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020	Tahun 2021			Akhir RPMJD (2024)	
			Target	Capaian	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Indeks Sistem Merit	angka (0-1)	0,60	0,60	0,58	96,67	0,71	81,69
					96,67		81,69

Sumber: BKPPD Kabupaten Magelang, 2022

Catatan : ***) Angka sementara, nilai resmi dari BKN belum keluar

Berdasarkan tabel di atas rata-rata persentase kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian pada tahun 2021 sebesar 96,67% (sangat tinggi), sedangkan capaian terhadap akhir RPJMD tahun 2024 sebesar 81,69% (tinggi). Penghitungan di atas bersifat sementara berdasarkan penilaian mandiri dan hasil penilaian dari BKN belum keluar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN, sistem merit didefinisikan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. Saat ini



Pemerintah Kabupaten Magelang sudah berusaha menerapkan merit sistem secara proporsional.

Selanjutnya, Indeks Profesionalitas ASN digunakan untuk mengukur kualitas aparatur negara. Hal ini mencerminkan kompetensi, prestasi kerja, gaji/tunjangan, dan pelanggaran disiplin. Nilai Indeks profesionalisme ASN Kabupaten Magelang pada tahun 2017 sebesar 88,29, pada tahun 2018 sebesar 63, dan pada tahun 2019 sebesar 63. Angka IP ASN tahun 2018 dan 2019 lebih kecil daripada tahun 2017. Angka ini tidak bisa dibandingkan karena terjadi perubahan rumus dan cara perhitungan nilai IP pada tahun 2017 dan tahun 2018/2019.

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian sebesar Rp6.509.169.240,00 dengan realisasi Rp5.949.457.143,00 (91,40%). Program yang mendukung pencapaian sasaran strategis meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Untuk mengetahui tingkat efektifitas penggunaan sumberdaya maka perlu dilakukan analisis efesensi terhadap pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam analisis efesensi dilakukan perbandingan antara pencapaian kinerja sasaran strategis dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran untuk yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis tersebut. Penghitungan analisis efesensi dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan capaian indikator kinerja dengan tingkat capaian mencapai 100% atau lebih. Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis dan capaian kinerja yang tidak mencapai 100% tidak dilakukan analisis efesensi.

Tingkat efesensi pencapaian kinerja dibandingkan realisasi anggaran pada tahun 2021 sebesar 13,61%, tingkat efesensi ini belum menunjukkan tingkat efesensi penggunaan anggaran secara riil. Hal ini dikarenakan sisa anggaran belum tentu adanya efesensi dalam penggunaan anggaran tetapi dimungkinkan kegiatan yang direncana tidak terlaksana dan rendahnya serapan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Analisis efesensi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.45.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi		
				Program	Anggaran	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	MISI I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia									
1	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	100,42						
	1	Meningkatnya kinerja pembangunan pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	97,38	Program Pengelolaan Pendidikan	164.154.596.074	158.084.437.357	96,30	TE
			2	Harapan Lama Sekolah	97,14	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	200.000.000	200.000.000	100,00	TE
						Program Pembinaan Perpustakaan	676.481.855	576.965.002	85,29	TE
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	585.584.095	559.388.935	95,53	TE
						Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.544.856.000	3.129.121.305	88,27	TE
						Program Pengembangan Kebudayaan	2.506.461.352	2.451.846.110	97,82	TE
			3	Persentase SD dan SMP yang berakreditasi minimal B	97,76	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	51.900.534.500	47.557.909.400	91,63	TE
	2	Meningkatnya kinerja pembangunan kesehatan	4	Angka Harapan Hidup	100,37	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	219.105.652.251	158.377.278.664	72,28	27,72
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	15.351.643.942	10.033.696.129	65,36	34,64
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	225.420.770	87.146.250	38,66	61,34
2	Meningkatnya Paritas	2	Inflasi	145,50						



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi		
				Program	Anggaran	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Daya Beli Masyarakat	3	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan	95,27						
		4	Angka Kemiskinan	78,22						
	3	Menurunnya jumlah PMKS	5	Persentase penurunan PMKS	106,90	Program Pemberdayaan Sosial	126.000.000	126.000.000	100,00	0,00
						Program Rehabilitasi Sosial	284.877.500	273.513.014	96,01	3,99
						Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	238.189.500	236.216.648	99,17	0,83
	4	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	6	Indeks Ketahanan Pangan	102,27	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	758.283.576	738.482.408	97,39	2,61
						Program Penanganan Kerawanan Pangan	4.170.000	4.149.150	99,50	0,50
						Program Pengawasan Keamanan Pangan	55.236.451	55.101.094	99,75	0,25
	5	Meningkatnya layanan hunian yang layak dan berkualitas	7	Cakupan hunian layak dan berkualitas	106,48	Program Pengembangan Perumahan	44.193.000	20.741.805	46,93	53,07
						Program Kawasan Permukiman	1.317.239.007	1.308.344.610	99,32	0,68
						Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	506.095.500	426.646.550	84,30	15,70
						Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	35.170.000	12.144.070	34,53	65,47
	6	Terkendalnya Tingkat Pengangguran Terbuka	8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,19	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	511.237.990	490.138.715	95,87	TE
						Program Penempatan Tenaga Kerja	992.589.000	954.889.861	96,20	TE
Program Hubungan Industrial						121.270.780	113.098.660	93,26	TE	
3	Meningkatnya Pembangunan Berbasis Gender	5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	99,68						
		7	Meningkatnya keberdayaan gender	9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100,46	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	37.650.000	37.649.870	100,00



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi		
				Program	Anggaran	Realisasi	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
				Program Perlindungan Perempuan	225.915.000	50.517.700	22,36	77,64		
				Program Pengendalian Penduduk	97.033.500	92.674.167	95,51	4,49		
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.538.071.000	6.459.549.452	85,69	14,31		
		10	Kategori Kabupaten Layak Anak	100,00	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	141.214.670	139.196.957	98,57	1,43	
					Program Perlindungan Khusus Anak	225.915.000	75.235.150	33,30	66,70	
B MISI II: Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Pada Potensi Lokal dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup										
1	Meningkatnya Daya Saing Daerah	6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	-29,47						
		7	PDRB Per Kapita	88,41						
		8	Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan	91,61						
	8	Tercapainya kualitas lingkungan hidup yang baik	11	IKLH	98,99	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	291.960.000	290.128.040	99,37	TE
						Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	604.228.775	599.710.222	99,25	TE
						Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	2.455.446.200	2.157.019.184	87,85	TE
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.675.230.000	674.764.000	40,28	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	59.726.500	59.647.788	99,87	TE
				Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	355.685.490	329.692.338	92,69	TE
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	178.388.600	178.330.985	99,97	TE
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	17.500.000	17.499.015	99,99	TE
				Program Pengelolaan Persampahan	11.303.437.011	10.459.318.501	92,53	TE
9	Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur	12 Cakupan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	86,34	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.506.280.605	6.605.048.936	87,99	TE
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.104.900.145	8.091.466.855	99,83	TE
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.738.826.115	4.737.231.164	99,97	TE
				Program Pengembangan Permukiman	82.185.000	82.100.160	99,90	TE
				Program Penataan Bangunan Gedung	45.129.549.960	44.923.955.850	99,54	TE
				Program Penyelenggaraan Jalan	45.508.507.818	41.003.683.275	90,10	TE
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	18.479.610	18.459.610	99,89	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	221.245.760	146.049.248	66,01	TE
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.648.074.920	23.355.453.386	98,76	TE
10	Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	13 Nilai PDRB sektor perdagangan	82,68	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	63.326.685	63.323.660	100,00	TE
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.631.312.479	4.865.005.361	73,36	TE
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	197.297.584	186.438.273	94,50	TE
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	218.606.498	213.420.159	97,63	TE
				Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	33.863.050	33.626.450	99,30	TE
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	190.304.000	190.124.800	99,91	TE
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	15.000.000	13.549.150	90,33	TE
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.025.077.445	941.749.946	91,87	TE
		14 Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	89,24	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.344.103.719	1.250.520.350	93,04	TE
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	752.251.775	740.606.020	98,45	TE
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	23.652.247.355	21.914.080.484	92,65	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi
				Program	Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.454.207.379	6.333.982.812	98,14	TE
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	99.116.942	97.326.060	98,19	TE
				Program Perizinan Usaha Pertanian	23.995.825	22.477.815	93,67	TE
				Program Penyuluhan Pertanian	745.472.966	735.731.860	98,69	TE
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	588.353.465	569.087.996	96,73	TE
		15	63,40	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.003.804.930	676.639.380	67,41	TE
		16	86,88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	12.512.896.491	9.970.671.511	79,68	TE
				Program Pemasaran Pariwisata	318.902.039	316.214.174	99,16	TE
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	9.514.000	9.511.960	99,98	TE
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.106.875.684	898.699.105	81,19	TE
		17	251,20	Program Pelayanan Penanaman Modal	247.255.000	245.596.181	99,33	0,67
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	372.462.000	203.722.345	54,70	45,30
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	26.250.000	26.091.047	99,39	0,61



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	7.164.723.954	6.515.933.779	90,94	9,06	
		18	Cakupan ketentraman dan ketertiban masyarakat	109,94	Program Peningkatan ketenteraman Dan Ketertiban Umum	2.926.443.500	2.789.938.246	95,34	4,66
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	599.154.000	593.493.700	99,06	0,94
					Program Penanggulangan Bencana	2.123.174.000	2.016.034.231	94,95	5,05
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.271.783.000	7.216.002.068	99,23	0,77
					Program Penanganan Bencana	52.803.700	52.800.100	99,99	0,01
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	285.868.715	177.817.320	62,20	37,80
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	3.165.443.180	3.130.635.440	98,90	1,10
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.086.000	27.870.000	75,15	24,85
		19	Indeks Desa Membangun	100,77	Program Peningkatan Kerjasama Desa	30.670.565	27.762.770	90,52	9,48
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.435.083.283	4.980.433.375	91,63	8,37



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.967.332.593	1.943.371.484	98,78	1,22	
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.859.776.390	18.470.707.589	97,94	2,06	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	6.359.062.371	6.244.076.934	98,19	1,81	
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	466.749.800	462.672.190	99,13	0,87	
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	3.500.000	3.500.000	100,00	0,00	
C MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah									
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	9	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	93,32					
11	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	20	Nilai AKIP	92,79	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota **)	310.037.126.158	231.616.263.168	74,71	TE
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	611.299.915	589.496.533	96,43	TE
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	931.745.955	927.368.048	99,53	TE
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	846.636.010	803.393.136	94,89	TE
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	340.792.800	327.108.455	95,98	TE
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	360.818.000	357.341.610	99,04	TE



No	Misi/Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2021				Tingkat Efisiensi	
				Program	Anggaran	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				Program Pengelolaan Arsip	184.101.252	180.221.396	97,89	TE	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	13.851.725.500	10.756.096.012	77,65	TE	
12	Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	21	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	106,37	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.351.603.582	1.285.457.454	95,11	4,89
					Program Aplikasi Informatika	5.675.974.000	5.570.431.565	98,14	1,86
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	284.589.110	212.220.068	74,57	25,43
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	514.174.450	506.803.338	98,57	1,43
					Program Pencatatan Sipil	259.050.442	253.375.213	97,81	2,19
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	706.744.148	693.775.608	98,17	1,83
					Program Pengelolaan Profil Kependudukan	100.695.983	97.949.103	97,27	2,73
13	Meningkatnya pengelolaan pendapatan, Keuangan dan aset daerah	22	Opini BPK	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	729.675.527.549	693.684.480.488	95,07	4,93
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.063.964.495	2.255.522.991	55,50	44,50
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.291.840.599	6.949.608.274	95,31	4,69
14	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	23	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,56	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	634.281.527	611.903.022	96,47	3,53
					Program Pendaftaran Penduduk	812.676.600	799.702.657	98,40	1,60
15	Meningkatnya kinerja sistem manajemen kepegawaian	24	Indeks Sistem Merit	96,67	Program Kepegawaian Daerah	6.509.169.240	5.949.457.143	91,40	8,60
Jumlah/Rata-rata:					1.013.902.212.525	841.533.748.439	83,00	13,61	

Keterangan: TE (Tidak ada efisiensi)



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Tahun 2021 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.1.1. Target Kinerja

Pada Tahun 2021 Kabupaten Magelang tidak ada Tugas Pembantuan Mandiri. Kabupaten Magelang hanya melaksanakan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah. Dengan jumlah anggaran sebesar Rp8.437.403.000,00. Program kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura, kegiatannya meliputi pengembangan Kawasan bawang putih seluas 141 ha di 20 kelompok tani pada Kecamatan Windusari dan Kecamatan Pakis. Selain itu untuk pengembangan Kawasan kelengkeng seluas 30 hektar di 3 kelompok tani yang ada di Kecamatan Salaman.



Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, kegiatannya meliputi fasilitasi pengembangan sistem pertanian terpadu dataran tinggi kepada 32 kelompok masyarakat yang ada di Kecamatan Bandongan, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Grabag. Membangun daerah irigasi yang ada di Kabupaten Magelang. Fasilitasi pupuk dan pestisida kepada 21 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang dan asuransi usaha tani padi sebanyak 1 paket di wilayah Kabupaten Magelang.

Tugas Pembantuan dari Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, kegiatannya meliputi pembentukan peta ketahanan dan kerentanan pangan sebanyak 1 dokumen. Pembinaan kepada kelompok pertanian berupa penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan pekarangan pangan lestari di wilayah Kabupaten Magelang.

Program ini dilaksanakan dalam kegiatan pengembangan kawasan bawang putih seluas 141 hektar di 20 kelompok tani pada Kecamatan Windusari dan Kecamatan Pakis. Selain itu untuk pengembangan Kawasan kelengkeng seluas 30 ha di 3 kelompok tani yang ada di Kecamatan Salaman. Program ini juga melaksanakan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat sebanyak 33 kelompok masyarakat. Juga pelaksanaan pendataan penerima pupuk bersubsidi sejumlah 2.031.641 orang.

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini dilaksanakan untuk mendukung penyusunan laporan keuangan dan administrasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan dengan output dokumen laporan.

c. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Program ini berupa sarana angkutan pascapanen, pemasaran sesuai dengan *Good Handling Practices*, dan pemanfaatan sarana pascapanen untuk penanganan pemasaran hasil hortikultura yang dilaksanakan untuk 1 kelompok tani yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ngablak.

3.1.2. Realisasi Kinerja

Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan Kabupaten Magelang mempunyai anggaran sebesar Rp8.437.403.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp7.925.377.000,00 atau sebesar 93,93% dan realisasi fisik sebesar 100%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan tugas pembantuan Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Magelang sebagaimana pada tabel 3.1.



Tabel.3.1.
Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Kementerian/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	
1.	Kementerian Pertanian, Ditjen Hortikultura	SK KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 911/037/V/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Kabupaten Magelang	Dinas Pertanian dan Pangan						
			1. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura								
			Sarana pascapanen hortikultura	Kecamatan Ngablak		53.430.000	28.110.000	52,61	1 paket	100	
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
			1. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat								
			Pengembangan kawasan bawang putih	Kecamatan Windusari, Kecamatan Pakis		1.800.000	1.800.000	100	141 ha	100	
			2. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura								
			Pengembangan kawasan kelengkeng	Kecamatan Salaman		459.750.000	435.765.000	94,78	30 ha	100	
			Program Dukungan Manajemen								
			1. Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya								
Layanan Perkantoran	Kabupaten Magelang		19.400.000	16.100.000	82,99	1 dokumen	100				



No	Kementerian/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	
2.	Kementerian Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	DIPA No. 4730/018-08.4.01/13/2020 tanggal 27 Desember 2020 Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
			1. Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian								
			Fasilitas Pengembangan sistem pertanian terpadu dataran tinggi	Kecamatan Bandongan, Kecamatan Sawangan, Kecamatan Grabag		2.313.940.000	1.923.371.000	83,12	32 kelompok masyarakat	100	
			Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Daerah irigasi Kabupaten Magelang		974.000.000	942.950.000	96,81	1 unit	100	
			OM Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Kabupaten Magelang		1.875.000.000	1.875.000.000	100	545 unit	100	
			2. Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian								
			Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Kabupaten Magelang		598.000.000	581.319.300	97,21	1 rekomendasi kebijakan	100	
			3. Fasilitas Pupuk dan Pestisida								
			Pelayanan kepada masyarakat	21 kecamatan		280.140.000	275.060.000	98,19	1 paket	100	
			Pelayanan publik lainnya	21 kecamatan		157.310.000	144.560.000	91,89	1 paket	100	
			4. Fasilitas Pembiayaan Pertanian								
			Prasarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup	Kabupaten Magelang		16.048.000	15.998.000	99,69	1 paket premi asuransi	100	
			Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Kab. Magelang		100.800.000	100.800.000	100	1 paket premi asuransi	100	
			Program Dukungan Manajemen								
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian											
Layanan Perkantoran	Kabupaten Magelang		85.850.000	82.680.000	96,31	1 dokumen	100				
3	Kementerian Pertanian,		Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								



No	Kementerian/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	
	Badan Ketahanan Pangan		1. Pemantapan ketersediaan dan penanganan pangan rawan								
			Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan	Kabupaten Magelang		28.460.000	28.417.000	99,85	1 dokumen	100	
			2. Pemantapan panganeekaragaman konsumsi dan kemandirian pangan								
			Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Kabupaten Magelang		285.400.000	285.371.700	99,99	28 kelompok	100	
			3. Pendampingan P2L								
			Pendampingan pekarangan pangan lestari tahap pengembangan	Kabupaten Magelang		850.500.000	850.500.000	100	1 paket	100	
			Program Dukungan Manajemen								
			Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan Layanan Perkantoran	Kabupaten Magelang		18.900.000	18.900.000	100	1 dokumen	100	
4	Kementerian Pertanian	SK KPA Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 911/037/V/2021	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
			1. Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi Tanaman Pangan	Kabupaten Magelang		210.000.000	210.000.000	100	1 paket	100	
			2. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia Tanaman Pangan	Kabupaten Magelang		108.675.000	108.675.000	100	1 paket	100	
			TOTAL			8.437.403.000	7.925.377.000	93,93		100	

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022



3.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

3.2.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Magelang sebesar Rp 95.532.059.000 terdiri dari:

- 1) Operasional KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) sebesar Rp 1.835.000.000 yang diberikan kepada 367 desa masing-masing Rp5.000.000,00
- 2) Desa Wisata sebesar Rp24.000.000.000,00 untuk Kecamatan Borobudur terdiri dari Desa Tanjungsari, Desa Tegalarum, Desa Karangrejo, Desa Kebonsari, Desa Wanurejo, Desa Kenalan, Desa Kembanglimus, Desa Karanganyar, Desa Sambeng. Selain itu juga untuk Desa Banyuroto, Kecamatan Sawangan, Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik, Desa Seloprojo Kecamatan Ngablak, Desa Sumber Kecamatan Dukun, Desa Kembangkuning Kecamatan Windusari dan Desa Bawang Kecamatan Tempuran.
- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebesar Rp150.000.000,00 di 3 desa pada Kecamatan Ngablak (Desa Girirejo, Desa Jogoyasan dan Desa Pandean).
- 4) Peningkatan sarana prasarana pedesaan sebanyak 493 titik dengan anggaran sebesar Rp69.547.059.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp68.347.059.000,00 dan realisasi fisik sebanyak 487 titik.

3.2.2. Realisasi Kinerja

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2021 mempunyai anggaran sebesar Rp95.532.059.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp94.332.059.000,00 atau sebesar 99,56% dan realisasi fisik sebesar 99,69%. Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa se-Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagaimana pada tabel 3.2.



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah kepada Desa
se-Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan	Kegiatan	Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%
1	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020	1. Operasional KPMD	367 desa	1.835.000.000	1.835.000.000	100	367 desa	100
			2. Desa Wisata	Kecamatan Borobudur: 1. Desa Tanjungsari 2. Desa Tegalarum 3. Desa Karangrejo 4. Desa Kebonsari 5. Desa Wanurejo 6. Desa Kenalan 7. Desa Kembanglimus 8. Desa Karanganyar 9. Desa Sambeng Kecamatan Sawangan: 1. Desa Banyuroto Kecamatan Kaliangkrik: 1. Desa Mangli Kecamatan Ngablak: 1. Desa Seloprojo Kecamatan Dukun: 1. Desa Sumber Kecamatan Windusari: 1. Desa Kembangkuning Kecamatan Tempuran: 1. Desa Bawang	24.000.000.000	24.000.000.000	100	15 desa	100
			3. Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kecamatan Ngablak: 1. Desa Girirejo 2. Desa Jogoyasan 3. Desa Pandean	150.000.000	150.000.000	100	3 desa	100
			4. Peningkatan Sarpras Perdesaan	493 titik	69.547.059.000	68.347.059.000	98,27	487 titik	98,78
			JUMLAH		95.532.059.000	94.332.059.000	99,56		99,69

Sumber: Bappeda dan Litbangda Kabupaten Magelang, 2022



Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2021 juga memberikan bantuan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa sebesar Rp34.800.000.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2020, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Desa adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Jenis bantuan keuangan terdiri atas pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, jalan usaha tani, jembatan desa, jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier, sarana dan prasarana air bersih pedesaan, bantuan operasional PAUD dan pengadaan mobil ambulans desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Magelang kepada pemerintah desa sebesar Rp34.800.000.000 dengan realisasi keuangan Rp. 34.600.000.000 atau sebesar 99,43%.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan pada Kegiatan Pengembangan Hortikultura dijumpai kendala dan permasalahan, antara lain:

1. Proses penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) terlambat karena adanya perubahan-perubahan kebijakan khususnya *refocusing* dan banyaknya usulan kelompok tani yang masuk dalam e-proposal.
2. Pengadaan barang mendekati waktu tanam dan mendekati akhir tahun anggaran.
3. Karena adanya pandemi Covid-19, banyak kegiatan yang terhambat dan tidak bisa dilaksanakan, seperti perjalanan dinas dan pertemuan.
4. Keterbatasan SDM petani dalam budidaya yang sesuai dengan norma budidaya tanaman yang baik (*good agriculture practices*).

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Upaya penyelesaian permasalahan di atas, antara lain:

1. Agar penetapan CPCL tidak maka proses penetapan CPCL sebaiknya dilaksanakan pada akhir bulan Desember dan kelompok tani penerima bantuan diprioritaskan kelompok tani yang belum pernah memperoleh bantuan.
2. Proses penyiapan administrasi untuk pengadaan barang akan dilaksanakan pada awal tahun selama tidak ada *refocusing*.
3. Proses pengadaan dilaksanakan dengan metode tender cepat dan e-katalog.
4. Untukantisipasi agar pelaksanaan fisik sesuai dengan tahun anggaran akan dibuatkan jadwal palang sebagai pedoman pelaksanaan fisik dan surat pernyataan dari kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal tanam yang disepakati.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pelayanan Dasar di bidang pendidikan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian SPM	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	Pagu 2021
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.742	38.742	100	26.553.234.200
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	181.626	181.626	100	130.473.548.803
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.266	4.266	100	7.127.813.071
Jumlah			224.634	224.634	100	164.154.596.074

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

4.1.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 4.2.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Anggaran 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	Anggaran 2021	
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	38.742	26.553.234.200	35.273	24.098.799.720	92,21
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	181.626	150.275.575.091	161.277	127.366.147.189	88,80
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	4.266	7.127813.071	4.266	6.832.335.878	100
Jumlah/Rata-rata			224.634	164.154.596.074	200.816	158.297.282.787	91,66

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.3.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	26.553.234.200	24.098.799.720	90,76
2.	Pendidikan Dasar	130.473.548.803	127.366.147.189	97,62
3.	Pendidikan Kesetaraan	7.127.813.071	6.832.335.878	95,85
Jumlah		164.154.596.074	158.297.282.787	96,43

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, 2022

4.1.5. Dukungan Personil

Personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan sangat banyak, mulai dari Pegawai pada kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, UPT Dinas Pendidikan Kecamatan, satuan pendidikan serta dukungan Pemerintah dan juga tak bisa lepas dari dukungan masyarakat.



4.1.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Luas dan kondisi geografis wilayah Kabupaten Magelang.
- 2) SPM pendidikan melibatkan dua Kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, dalam hal ini bidang pendidikan di Kabupaten Magelang melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kantor Kementerian Agama, sementara untuk penghitungan penganggaran baru diperhitungkan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saja.
- 3) Belum mempunyai dan kesulitan dalam melakukan pendataan Anak Tidak Sekolah.
- 4) Belum mempunyai data anak Kabupaten Magelang yang bersekolah di kabupaten/kota lain.
- 5) Ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
- 6) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran.

b. Solusi

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng Kementerian Agama yang juga mengelola pendidikan berbasis keagamaan untuk bersama sama merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pemenuhan SPM bidang pendidikan.
- 2) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat *mensupport* data anak tidak sekolah dari hasil sinkroniasi data Dapodik, Emis dan Data NIK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga kabupaten/kota bisa lebih cepat dalam proses verifikasi data Anak Tidak Sekolah dan menyusun program /kegiatan untuk penanganannya.
- 3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat *mensupport* Data anak Kabupaten Magelang yang sekolah di kabupaten/kota lain sebagai dasar perhitungan indikator dan mendukung tercapainya satu data pendidikan, sehingga penghitungan angka partisipasi sekolah benar benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- 4) Mengintensifkan koordinasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kantor Kementerian Agama.



- 5) Memberikan bantuan bagi siswa dari keluarga miskin yang belum tercover KIP.
- 6) Sosialisasi serta memberikan motivasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan agar minimal masyarakat tuntas wajib belajar 9 tahun.

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Pelayanan Dasar di Bidang Kesehatan yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.4.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian	Anggaran 2021
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	18.136	18.136	100	100.000.000
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	16.404	16.404	100	2.676.865.387
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	16.315	16.315	100	100.000.000
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87.910	87.910	100	90.000.000
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	179.116	179.116	100	69.301.080
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	805.244	805.244	100	45.830.465
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	182.917	182.917	100	90.000.000
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	390.338	390.338	100	60.000.000
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	18.249	18.249	100	60.000.000
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.226	3.226	100	148.949.410
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14.082	14.082	100	200.000.000
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	17.739	17.739	100	110.038.676
Jumlah			1.749.676	1.749.676	100	3.750.985.018

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022



4.2.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Anggaran 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	Anggaran 2021	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	18.135	100.000.000	17.054	94.791.775	94,03
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	16.404	2.676.865.387	16.361	1.275.996.845	99,74
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	16.315	100.000.000	16.247	90.973.380	99,58
4.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang berumur 0 - 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	87.910	90.000.000	74.382	81.861.915	84,61
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	179.116	69.301.080	99.185	60.735.945	55,37
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	805.244	45.830.465	163.472	26.049.305	20,30
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	182.917	90.000.000	88.075	80.549.385	48,15
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	390.338	60.000.000	43.053	33.379.710	11,03
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	18.249	60.000.000	10.904	34.623.870	59,75



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021 (%)
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Anggaran 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	Anggaran 2021	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	3.226	148.949.410	2.025	148.319.410	62,77
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	14.082	200.000.000	3.526	167.180.981	25,04
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah orang terduga Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	17.739	110.038.676	17.294	55.803.630	97,49
Jumlah			1.749.676	3.750.985.018	551.578	2.150.266.151	63,16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2021 dengan sumber dana APBD dan DAK sebagai berikut:

Tabel 4.6.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100.000.000	94.791.775	94,79
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2.676.865.387	1.275.996.845	47,67
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100.000.000	90.973.380	90,97
4.	Pelayanan kesehatan balita	90.000.000	81.861.915	90,96
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	69.301.080	60.735.945	87,64
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	45.830.465	26.049.305	56,84
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	90.000.000	80.549.385	89,50
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	60.000.000	33.379.710	55,63



No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	60.000.000	34.623.870	57,71
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	148.949.410	148.319.410	99,58
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	200.000.000	167.180.981	83,59
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	110.038.676	55.803.630	50,71
Jumlah		3.750.985.018	2.150.266.151	57,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

4.2.5. Dukungan Personil

Penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten Magelang didukung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Adapun tenaga kesehatan yang terlibat dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

Tabel 4.7.
Tenaga Kesehatan yang Terlibat Dalam Penerapan dan Pencapaian SPM Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Tenaga Kesehatan	Jumlah
1	Dokter Spesialis Kandungan	2
2	Dokter Umum	73
3	Dokter Gigi	38
4	Dokter Spesialis Anak	4
5	Bidan	452
6	Perawat	405
7	Perawat Gigi	4
8	Apoteker	29
9	Tenaga Teknis Kefarmasian	63
	Jumlah	1.070

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2022

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Adanya Pandemi Covid-19 mempengaruhi capaian SPM bidang kesehatan. Dengan adanya aturan PPKM pelaksanaan seperti skrining kesehatan, pengobatan rutin dan kunjungan rumah menjadi terbatas, kegiatan belajar mengajar yang belum sepenuhnya tatap muka ikut berpengaruh dalam capaian SPM pelayanan kesehatan usia dasar.
- 2) Adanya *refocusing* anggaran yang bersumber dana dari APBD yang digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang.
- 3) Pelaporan dari fasilitas kesehatan baik tingkat pertama.



b. Solusi

Dalam rangka peningkatan realisasi kegiatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan pada masa pandemi Covid-19 perlu dilakukan antara lain:

- 1) Impelementasi digitalisasi sektor kesehatan guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan terutama dalam situasi pandemi Covid-19.
- 2) Pelaksanaan *skrining* tetap dilaksanakan dengan memperhatikan sumber daya yang ada.
- 3) Penggunaan *biosafety cabinet* untuk mengamankan pekerja yang bekerja dengan sampel material, lingkungan dan sampel material dari kemungkinan bahaya terkontaminasi atau menimbulkan penyebaran bakteri atau virus yang bersifat patogen.

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	Anggaran 2021
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1.310.512	1.310.512	100	25.936.671.249
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	1.310.512	1.310.512	100	14.238.826.115
Jumlah			1.310.512	1.310.512	100	40.175.497.364

Sumber DPUPR Kabupaten Magelang, 2022



4.3.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.9.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Anggaran 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	Anggaran 2021	
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	1.310.512	25.936.671.249	1.182.175	25.922.937.959	90,21
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.310.512	14.238.826.115	1.184.171	14.237.231.164	90,36
Jumlah/Rata-rata			1.310.512	40.175.497.364	1.183.173	40.160.169.123	90,28

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari	25.936.671.249	25.922.937.959	99,95
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	14.238.826.115	14.237.231.164	99,98
Jumlah		40.175.497.364	40.160.169.123	99,96

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

4.3.5. Dukungan Personil

Dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pekerjaan umum didukung oleh personil-personil yang terlibat dalam program dan kegiatan. Adapun personil yang terlibat yakni:



Tabel 4.11.
Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Golongan	Jumlah (Orang)	%
1.	Golongan IV	8	4%
2.	Golongan III	53	32%
3.	Golongan II	102	60%
4.	Golongan I	8	4%
JUMLAH		171	100%

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

Kegiatan Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di bidang pekerjaan umum diampu oleh Seksi Air Minum Penyehatan Lingkungan (AMPL), Bidang Cipta Karya dan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KPSPAM) dan Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KPP) Sarana Sanitasi yang terdiri dari:

Tabel 4.12.
Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Jabatan	Orang
1.	Kepala Bidang Cipta Karya	1
2.	Kepala Seksi AMPL	1
3.	Staf AMPL	5
4.	Supporting Staf	2
5.	KPSPAM	2.907
6.	KPP	999
JUMLAH		3.915 orang

Sumber: DPUPR Kabupaten Magelang, 2022

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Dalam rangka upaya percepatan capaian layanan air minum dan sanitasi sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum yaitu penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, capaian target belum maksimal dikarenakan pada tahun 2021 masih adanya pandemi Covid-19 sehingga alokasi anggaran yang dialokasikan untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum khususnya Dana yang bersumber dari APBD terdampak *refocusing*.



- 2) Dalam penilaian capaian layanan pengelolaan air limbah domestik terdapat perbedaan kriteria penilaian, pada tahun 2020 penilaian dihitung berdasarkan capaian akses layanan dalam STBM yaitu Akses Jamban Sehat Permanen (JSP), Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP), dan *Sharing* serta Akses IPAL Komunal, sedangkan untuk penilaian akses capaian layanan air limbah domestik tahun 2021 hanya berdasarkan capaian akses layanan dalam STBM yang sudah akses Jamban Sehat Permanen (JSP) dan akses Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan akses IPAL Komunal dan Individual sedangkan akses *sharing* tidak dihitung.
- 3) Kabupaten Magelang sampai dengan tahun 2021 ini belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

b. Solusi

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya mengusulkan kembali kegiatan-kegiatan yang sempat tertunda pada tahun 2021 pada tahun anggaran berikutnya secara bertahap, dan berupaya melalui kolaborasi pendanaan baik APBN, APBD dan *Sharing* APBDes, serta swadaya masyarakat.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang mengusulkan kembali Pembangunan IPLT.

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan rakyat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar di bidang perumahan rakyat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.13.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	APBD 2021
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	NA	NA	NA	NA
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA	NA
Jumlah			NA	NA	NA	NA

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

4.4.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat Kabupaten Magelang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.14.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2021	
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	NA	NA	NA	NA	NA
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	NA	NA	NA	NA	NA
Jumlah/Rata-rata			NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2022

Jumlah orang yang terlayani sebagai target dan realisasi pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat tidak tersedia dikarenakan tidak ada target (rumah korban bencana) yang harus dilayani. Tidak ada data korban bencana yang harus mendapatkan layanan karena bencana yang terjadi hanya menyebabkan kerusakan ringan dan sedang yang segera diperbaiki oleh pemilik rumah dan warga. Sedangkan anggaran yang ada pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp25.101.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.779.385,00 atau sebesar 50,91 % digunakan untuk kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, hasil dari kegiatan ini adalah:



- 1) data perumahan di lokasi rawan bencana, lahan potensial sebagai lokasi relokasi;
- 2) data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani;
- 3) data tingkat kerusakan rumah akibat bencana.

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Magelang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.15.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	NA	NA	NA
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	NA	NA	NA
Jumlah		NA	NA	NA

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2022

4.4.5. Dukungan Personil

Proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat diampu oleh Seksi Pengembangan Perumahan pada Bidang Perumahan dan didukung oleh personil-personil bidang perumahan sebagai berikut:

Tabel 4.16.
Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Bidang Tugas	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Kepala Dinas	1	-	-		1
2	Bid. Perumahan	-	1	2	3	6
	Jumlah					7

Sumber: DPRKP Kabupaten Magelang, 2021

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Belum ada data yang valid mengenai jumlah korban bencana terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- 2) Lahan relokasi yang aman dari resiko bencana sangat jauh dari lokasi rawan bencana atau lokasi bencana;



- 3) Tidak ada masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
- 4) Pengumpulan data terkendala oleh kekurangan personil pendataan.

b. Solusi

- 1) Berkoordinasi lebih intensif dengan SKPD yang menangani kebencanaan.
- 2) Bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mencari lokasi yang aman atau beresiko rendah.

4.5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pelayanan Dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi;
- b. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu;
- c. Pelayanan informasi rawan bencana;
- d. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- f. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:



Tabel 4.17.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	APBD 2021
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	NA	NA	NA	NA
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	177	177	100	156.457.500
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.363.290	1.363.290	100	85.968.000
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	31	31	100	347.985.000
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	290	290	100	915.952.800
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3.784	3.784	100	252.430.000
Jumlah			1.367.572	1.367.572	100	1.758.793.300

Sumber: Satpol PP dan PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2022

Keterangan:

1. Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2021 belum dianggarkan (NA) dikarenakan belum ada rekening pada aplikasi SIPD (NA);
2. Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum perda dan perkara, sehingga capaian (NA).

4.5.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:



Tabel 4.18.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2021	Jumlah Orang yang Terlayani	APBD 2021	
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	NA	NA	0	0	n/a
2.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	177	156.457.500	177	148.228.771	100
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.363.290	85.968.000	1.363.290	74.074.075	100
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	31	347.985.000	31	346.713.304	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	290	915.952.800	290	881.852.360	100
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	3.784	252.430.000	3.784	242.610.155	100
Jumlah/Rata-rata			1.367.572	1.758.793.300	1.367.572	1.693.478.665	100

Sumber: Satpol PP dan PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2022

Keterangan:

1. Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2021 belum dianggarkan (NA) dikarenakan belum ada rekening pada aplikasi SIPD (NA);
2. Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum perda dan perkada, sehingga capaian (NA).



4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.19.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	NA	NA	NA
2.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	156.457.500	148.228.771	94,74
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	85.968.000	74.074.075	86,16
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	347.985.000	346.713.304	99,63
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	915.952.800	881.852.360	96,28
6.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	252.430.000	242.610.155	96,11
Jumlah		1.758.793.300	1.693.478.665	96,29

Sumber: Satpol PP dan PK, BPBD Kabupaten Magelang, 2022

4.5.5. Dukungan Personil

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan SPM bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Magelang tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20.
Dukungan Personil Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Magelang Tahun 2021

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	39 PNS Pol PP 2 tenaga kontrak 40 SS Banpol PP
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	13 PNS 247 THL damkar
Total		341 orang

Sumber: Satpol PP dan PK Kabupaten Magelang, 2022

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SPM bidang trantibumlinmas sub urusan bencana di Kabupaten Magelang berjumlah 22 ASN dan 38 non ASN dibantu oleh 45 Tim Reaksi Cepat (TRC) dan 4.103 Relawan serta 10 sektor penanggulangan bencana dibantu oleh 42 Tim Reaksi Cepat (TRC) dan 4.103 Relawan serta seluruh Perangkat Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.



4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2021 belum dianggarkan dikarenakan belum ada rekening pada aplikasi SIPD.
- 2) Tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat dari penegakan hukum perda dan perkara, sehingga capaian 0%.
- 3) Capaian SPM pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Jumlah Warga Negara yang mendapat pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tingkat kabupaten/kota sebanyak 3784 orang, dari jumlah warga negara yang mejadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran tingkat kabupaten/kota sebanyak 3784 orang (dari 108 kejadian kebakaran) yang tertangani oleh Petugas damkar 85 kejadian (78,7) % dan yang tertangani oleh relawan 23 (21,3%) kejadian sehingga total capaian capaian 100% tertangani dalam tingkat waktu tanggap (15 menit).
- 4) Setiap tahun ditargetkan tidak terjadi korban bencana namun realisasinya terdapat 31 korban bencana dan sudah dapat terlayani sehingga capaiannya 100 %.
- 5) Setiap tahun ditargetkan tidak terjadi warga yang mengungsi pada tahun 2021 namun realisasinya terdapat 290 pengungsi dan sudah dapat terlayani sehingga capaiannya 100 %.

b. Solusi

- 1) Anggaran untuk ganti rugi (fisik dan material) akibat dari penegakan perda pada tahun 2022 sudah dianggarkan walaupun secara prosentase sesuai Permendagri belum memenuhi 2,5 %.
- 2) Meningkatkan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan perda dan perkara sehingga diharapkan terjadi penurunan pelanggaran perda dan perkara.
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas SDM penegak perda dan perkara.
- 4) Melaksanakan penegakan perda dan perkara sesuai dengan SOP, sehingga meminimalisir terjadinya gangguan trantibum akibat penegakan perda dan perkara.
- 5) Pemenuhan pos wilayah manajemen kebakaran (WМК) dan juga sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran, serta peningkatan kualitas SDM pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang berlaku yaitu wilayah manajemen kebakaran di setiap kecamatan (21 kecamatan).
- 6) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kebakaran.
- 7) Dengan penyebaran informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana yang lebih baik untuk setiap warga negara diharapkan tidak terjadi bencana yang menimbulkan korban bencana baik korban meninggal, luka-luka maupun adanya pengungsi.



4.6. Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan pembangunan bidang sosial di Kabupaten Magelang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA. Pelayanan Dasar di bidang sosial yang sudah memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel 4.21.
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	Capaian (%)	APBD 2021
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	126	126	100	25.830.860
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	35	35	100	25.830.860
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	28	28	100	25.830.860
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	37	37	100	25.830.860
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	347	347	100	181.803.700
Jumlah			573	573	100	285.127.140

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2021



4.6.3. Realisasi

Realisasi Standar Pelayanan Minimal bidang sosial Kabupaten Magelang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.22.
Realisasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Rencana Target Capaian SPM		Realisasi Capaian SPM		Capaian SPM 2021
			Jumlah Orang Yang Akan Terlayani	APBD 2021	Jumlah orang yang Terlayani	APBD 2021	
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	126	25.830.860	126	25.830.860	100
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	35	25.830.860	35	19.407.337	100
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	28	25.830.860	28	22.569.315	100
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	37	25.830.860	37	17.664.315	100
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	347	181.803.700	347	170.968.100	100
Jumlah/Rata-rata			573	285.127.140	573	256.439.067	100

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran untuk memenuhi penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.23.
Alokasi Anggaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	25.830.860	25.830.860	100
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	25.830.860	19.407.337	75,13
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	25.830.860	22.569.315	87,37
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	25.830.860	17.664.315	68,38
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	181.803.700	170.968.100	94,04
Jumlah		285.127.140	256.439.067	89,94

Sumber: Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, 2022



4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai yang menangani penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Magelang berjumlah 33 orang yang terdiri dari PNS 7 orang dan tenaga honorer dan relawan sebanyak 26 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten Magelang tahun 2021 mengalami kendala untuk memenuhi kebutuhan dasar karena anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Magelang yang masih minim, hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang belum juga usai.

b. Solusi

Untuk berusaha memenuhi kebutuhan dasar pada sasaran SPM, meskipun tidak maksimal, Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang ikut berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar sasaran.

4.7. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 di Kabupaten Magelang disajikan dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 4.24.
Program dan Kegiatan yang Terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
di Kabupaten Magelang Tahun 2021

No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	38,742	35,723	92.21	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	26,553,234,200	24,098,799,720	90.76
			Buku Gambar	35,723	35,723	100		Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan PAUD	545,000,000	545,000,000	100.00
			Alat Mewarnai	35,723	35,723	100		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	412,799,100	405,653,300	98.27
			satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	453	171	37.75		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	7,208,354,500	6,706,199,350	93.03
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	242,930,600	242,636,200	99.88
			Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	453	400	88.3		Pengadaan Mebel PAUD	280,000,000	275,000,000	98.21
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1,201	956	79.6		Pengelolaan Dana BOP PAUD	17,864,150,000	15,924,310,870	89.14
			jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	874	874	100		Pengadaan Perlengkapan PAUD	545,000,000	545,000,000	
		Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	181,626	161,277	88.8		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	89,881,001,648	88,076,404,039	97.99
			Buku Teks Pelajaran	161,277	161,277	100		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2,841,888,100	2,790,602,628	98.20



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Perlengkapan Belajar	161,277	161,277	100		Penyediaan Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	167,475,000	166,650,000	99.51
			Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	733	544	74.22		Penambahan Ruang Kelas Baru	425,000,000	425,000,000	100.00
			Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1,108	1,108	100		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	11,743,183,040	10,396,313,878	88.53
			jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	5,546	5,546	100		Pembangunan Perpustakaan Sekolah (SD)	937,555,000	934,570,455	99.68
			satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	733	732	99.86		Pembangunan Sarana Prasarana, dan Utilitas Sekolah (SD)	1,973,000,000	1,923,901,790	97.51
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	1,795	1,795	100		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang guru/Kepala Sekolah/TU (SD)	914,765,000	902,052,915	98.61
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	7,914	6,839	86.42		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SD)	435,924,000	427,918,900	98.16
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)	615,565,700	609,508,775	99.02
								Pengadaan Mebel Sekolah (SD)	2,638,658,320	2,605,030,905	98.73
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik (SD)	1,237,873,000	1,020,462,125	82.44



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (SD)	64,768,772,288	64,768,772,288	100.00
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1,181,342,200	1,105,619,380	93.59
								Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	40,592,547,155	39,289,740,150	96.79
								Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Pesonil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1,627,000,000	1,311,490,100	80.61
								Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	91,800,000	91,411,350	99.58
								Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1,211,327,500	1,020,555,400	84.25
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	234,399,700	120,476,800	51.40
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2,190,588,100	1,853,440,030	84.61
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	1,172,500,000	1,164,219,250	99.29
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah (SMP)	235,642,545	218,011,600	92.52
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit	35,121,300	34,854,900	99.24



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
								Kesehatan Sekolah (SMP)			
								Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah (SMP)	751,046,210	651,135,200	86.70
								Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium (SMP)	1,105,104,725	1,012,953,145	91.66
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)	24,063,000	23,929,700	99.45
								Pengadaan Mebel Sekolah (SMP)	600,600,000	597,106,000	99.42
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	29,895,076,475	29,895,076,475	100.00
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	793,562,000	741,981,800	93.50
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU (SMP)	502,743,100	432,364,900	86.00
								Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah (SMP)	121,972,500	120,733,500	98.98
		Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	36,547	4,266	11.67		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7,127,813,071	6,832,335,878	95.85



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Modul Belajar	4,266	4,266	100		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	203,037,400	196,036,150	96.55
			Perlengkapan Belajar	4,266	4,266	100		Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	815,382,716	770,781,400	94.53
								Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	459,348,870	443,412,407	96.53
			jumlah rombongan belajar di PKBM	154	154	100		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	171,156,520	169,202,050	98.86
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0		Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	80,405,700	80,144,550	99.68
			Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	401	319	79.55		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	5,024,063,065	4,870,996,806	96.95
			Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	20	18	90		Pembangunan Laboratorium	374,418,800	301,762,515	80.59
			Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	20	20	100					
			PKBM Terakreditasi minimal C	20	16	80					
	Bidang Urusan Pendidikan					91,66	Jumlah Anggaran Bidang Urusan Pendidikan		164,154,596,074	158,297,279,787	96.4



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
2.	Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	18.136	17.054	94,03	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,000,000	94,791,775	94.79
			Vaksin Tetanus Difetri (Td)	18.136	17.553	96,79		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100,000,000	94,791,775	94.79
			Tablet Tambah Darah	18.136	17.054	94,03					
			Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan *Pemeriksaan HB* Pemeriksaan Golongan Darah*Pemeriksaan Glukoprotein Urin	0	0	0					
			Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	0	0	0					
			Buku KIA	18.136	17.054	94,03					
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	16.404	16.361	99,74		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2,676,865,387	1,275,996,845	47.67
			Formulir Fotograf	0	0	0		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2,676,865,387	1,275,996,845	47.67
			Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	0	0	0					
			Buku KIA	16.404	16.361	99,74					
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	16.315	16.247	99.58		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,000,000	90,973,380	90.97



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Vaksin Hepatitis BO	0	0	0		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100,000,000	90,973,380	90.97
			Vitamin K1 Injeksi	0	0	0					
			Salep/Tetes Mata Antibiotik	0	0	0					
			Formulir Bayi Baru Lahir	0	0	0					
			Formulir MTBM	0	30	0					
			Buku KIA	16.315	16.247	99.58					
		Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	87.910	74.382	84.61		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	90,000,000	81,861,915	90.96
			Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	0	0	0		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	90,000,000	81,861,915	90.96
			Formulir DDTK	0	0	0					
			Buku KIA	87.910	74.382	84.61					
			Vitamin A Biru	18.966	18.966	100					
			Vitamin A Merah	75.545	71.487	94.63					
			Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubella	0	0	0					
			Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib*Campak Rubella	0	0	0					
			Jarum Suntik dan BHP	0	0	0					
			Peralatan Anafilaktik	0	0	0					
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	179.116	99.185	55.37		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	69,301,080	60,735,945	87.64



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Buku Raport Sehatanku	0	0	0		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	69,301,080	60,735,945	87.64
			Buku Pemantauan Kesehatan	0	0	0					
			Kuesioner Skrining Kesehatan	0	0	0					
			Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	0	0	0					
			Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	0	0	0					
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	805.244	163.472	20.30		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	45,830,465	26,049,305	56.84
			Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * *Alat Ukur Lingkar Perut* Tensimeter* Glukometer* Tes Strip Gula Darah * Lancet* Kapas Alkohol* KIT IVA Tes	15.000	15.000	100		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	45,830,465	26,049,305	56.84
			Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	805.244	163.472	20.30					
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	182.917	88.075	48.15		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	90,000,000	80,549,385	89.50



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	0	0	0		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	90,000,000	80,549,385	89.50
			Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	0	0	0					
			Buku Kesehatan Lansia	0	0	0					
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	390.338	43.053	11.03		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60,000,000	33,379,710	55.63
			Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	390.336	43.053	11.03		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	60,000,000	33,379,710	55.63
			Tensimeter	390.336	43.053	11.03					
			Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	390.336	43.053	11.03					
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	18.249	10.904	59.75		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	60,000,000	34,623,870	57.71
			* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	18.249	10.904	59.75		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	60,000,000	34,623,870	57.71



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	18.249	10.904	59.75					
			Pedoman dan Media KIE	18.249	10.904	59.75					
		Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	3,226	2.025	62.77		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	148,949,410	148,319,410	99.58
			Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	3,226	2.025	62.77		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	148,949,410	148,319,410	99.58
			Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	0	0	0					
			Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan dan Media KIE	0	0	0					
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tubercolusis yang mendapatkan layanan kesehatan	14.082	1.951	13.85		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200,000,000	167,180,981	83.59
			Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	14.082	1.951	13.85		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	200,000,000	167,180,981	83.59
			Reagen Zn TB	2.886	479	16.60					
			Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	2.934	489	16.67					
			Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	14.082	1.951	13.85					



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Catridge Tes Cepat Molekuler	14.082	1.951	13.85					
			Formulir Pencatatan dan Pelaporan	14.082	1.951	13.85					
			Pedoman/Standar Operasional Prosedur	33	33	100					
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	17.739	17.294	97.49		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	110,038,676	55,803,630	50.71
			Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	17.739	17.294	97.49		Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	110,038,676	55,803,630	50.71
			Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	17.739	17.294	97.49					
			Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	17.739	17.294	97.49					
	Bidang Urusan Kesehatan					63,16	Jumlah Anggaran Bidang Urusan		3,750,985,018	2,150,266,151	57.33



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
							Kesehatan				
3.	Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	1.310.512	1.182.175	90.21	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	8,104,900,145	8,091,166,855	99.83
			Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	529.971	478.071	90.21		Sub Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1,106,246,965	1,096,502,738	99.12
								Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6,728,653,180	6,724,664,117	99.94
								Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	270,000,000	270,000,000	100
			Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	652.241	588.368	90.21	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.310.512	1.184.171	90.36	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,738,826,115	4,737,231,164	99.97
			Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	1.273.032	1.150.170	90.35		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	4,238,826,115	4,237,231,164	99.96



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	1.067.674	953.849	89.34		Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	500,000,000	500,000,000	100
			Pelayanan Penyediaan prasaran dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	37.480	34.001	90.72					
								Kegiatan Lainnya	27,331,771,104	27,331,771,104	100
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Sanitasi Reguler (APBN)	500,000,000	500,000,000	100
							Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum				
								Sanitasi Perdesaan Padat Karya	5,000,000,000	5,000,000,000	100
								Sanitasi Perdesaan PEN	4,000,000,000	4,000,000,000	100
								PAMSIMAS Reguler, HID, HKP	12,380,795,000	12,380,795,000	100



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
								PAMSIMAS Sharing APBDes	2,698,090,004	2,698,090,004	100
								SPAM DAK Sharing APBDes	2,167,886,100	2,167,886,100	100
								Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih (Bantuan Keuangan Khusus) Desa	585,000,000	585,000,000	100
	Bidang Urusan Pekerjaan Umum					90.28	Jumlah Anggaran		40,175,497,364	40,160,169,123	99.96
4.	Perumahan Rakyat	Penyediaan & rehatiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	0	0					
			Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0					
			Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0					
			Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0					
			Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0					
							Program Pengembangan Perumahan	Kegiatan Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten atau Kota	25,101,000	12,779,385	50.91



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
								Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	8,673,000	5,484,055	63.23
								Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	2,640,000	949,680	35.97
								Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	5,908,000	2,430,875	41.15
								Pendataan Tingkat Rumah Kerusakan Rumah Akibat Bencana	7,880,000	3,914,775	49.68
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0					
			Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	0	0	0					
			Subsidi Uang Sewa	0	0	0					
			Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0					
	Bidang Urusan Perumahan Rakyat					100	Jumlah Anggaran Bidang Urusan Perumahan Rakyat		25,101,000	12,779,385	50.91



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
5	Trantibuml inmas	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	0	0	0					
			warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0					
			warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0					
		Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Pelayanan	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	177	177	100					
			Penegakan Perda sesuai SOP	177	177	100	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penanganan Ganggusan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2,769,986,000	2,641,709,475	95.37
			Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	177	177	100		Sub Kegiatan Penanganan Ganggusan Keamanan dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah	2,769,986,000	2,641,709,475	95.37



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
								Kabupaten/Kota			
			Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	177	177	100		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	156,457,500	148,228,771	94.74
								Sub Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	156,457,500	148,228,771	94.74
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	31	31	100	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	347,985,000	346,713,304	99.63
								Sub Kegiatan			
								Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
								Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0	0
								Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
								Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0	0	0
								Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	204,830,000	203,746,540	99.47
								Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	143,155,000	142,966,764	99.87



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
		Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	1.363.290	1.363.290	100		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
								Sub Kegiatan			
			Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1.363.290	1.363.290	100		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0
			Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.363.290	1.363.290	100		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	85,968,000	74,074,075	86.16
			Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1.363.290	1.363.290	100					
			Melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	126.068	126.068	100					
			Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0					
			Jumlah warga Negara yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	1.363.290	1.363.290	100					
			Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1.363.290	1.363.290	100					



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1.363.290	1.363.290	100					
			Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1.363.290	1.363.290	100					
			Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	126.068	126.068	100					
			Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	0	0	0					
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	573	573	100		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
			Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	290	290	100		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	174,262,000	165,893,085	95.20
			Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	290	290	100		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	0	0	0
			Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	573	573	100		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	741,690,800	715,959,275	96.53
			Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	100		Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	0	0	0



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	290	290	100					
			Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	1	1	100					
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	3.784	3.784	100	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	252,430,000	242,610,155	96.11
			Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	3.784	3.784	100		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	252,430,000	242,610,155	96.11
	Bidang Urusan Trantibumlinmas					100		Jumlah Anggaran Bidang Urusan Trantibumlinmas	4,528,779,300	4,335,188,140	95.73
6.	Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	126	126	100	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	25,830,860	25,830,000	100
			Layanan Data dan Pengaduan	22	22	100		Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyangga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	25,830,860	25,830,000	100



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	22	22	100					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0					
			Penyediaan Permakanan	22	22	100					
			Penyediaan Sandang	22	22	100					
			Penyediaan Alat bantu	1	1	100					
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0					
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	126	126	100					
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	10	10	100					
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0					
			Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0					



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	22	22	100					
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	10	100					
			Layanan Rujukan	22	21	95.45					
			Layanan Data dan Pengaduan	22	22	100					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	22	22	100					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0					
			Penyediaan Perumahan	22	22	100					
			Penyediaan Sandang	22	22	100					
			Penyediaan Alat bantu	1	1	100					
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0					
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	126	126	100					



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	10	10	100					
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0					
			Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0					
			Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	22	22	100					
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	10	10	100					
			Layanan Rujukan	22	21	95.45					
			Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	22	22	100					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	35	35	100		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia terlantar Di Luar Panti Sosial	25,830,860	22,569,315	87.37
			Layanan Data dan Pengaduan	35	35	100		Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	25,830,860	22,569,315	87.37



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	3	3	100					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0					
			Penyediaan Permakanan	3	3	100					
			Penyediaan Sandang	3	3	100					
			Penyediaan Alat bantu	0	0	0					
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0					
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	35	35	100					
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	35	35	100					
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	3	3	100					
			Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0					



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	3	3	100					
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1	1	100					
			Layanan Rujukan	2	2	100					
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	37	37	100		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	25,830,860	17,664,315	68.38
			Layanan Data dan Pengaduan	37	37	100		Sub Kegiatan Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan masyarakat	25,830,860	17,664,315	68.38
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	9	9	100					
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0					



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0					
			Penyediaan Perumahan	9	9	100					
			Penyediaan Sandang	9	9	100					
			Penyediaan Alat bantu	0	0						
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0					
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	37	37	100					
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	4	4	100					
			Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0					
			Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0					
			Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	9	9	100					
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4	4	100					
			Layanan Rujukan	5	5	100					
		Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	347	347	100	Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	181,803,700	170,968,100	94.04



No	Bidang	Jenis Layanan SPM	Indikator Kinerja	Indikator Pencapaian/Output		Total Pencapaian	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Perencanaan dan Pelaksanaan		Total Serapan
				Jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani				Pagu	Realisasi	
			Penyediaan Permakanan	347	347	100		Penyediaan permakanan	181,803,700	170,968,100	94.04
			Penyediaan Sandang	0	0	0					
			Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9	9	100					
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	145	145	100					
			Pelayanan Dukungan Psikososial	239	239	100					
			Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	347	347	100					
			Penyediaan Permakanan	347	347	100					
			Penyediaan Sandang	0	0	0					
			Peyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9	9	100					
			Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	145	145	100					
			Pelayanan Dukungan Psikososial	239	239	100					
	Bidang Urusan Sosial					100	Jumlah Anggaran Bidang Urusan Sosial		285,127,140	256,439,067	89.94

Sumber: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>, 2022



BAB V

PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini disusun sebagai dasar evaluasi pemerintah pusat untuk menilai kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini diharapkan dapat laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Magelang Tahun 2021, karena di dalamnya juga memuat Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP).

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini disampaikan. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021. Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sebagaimana semestinya.



LAMP IRAN

LAMPIRAN 2.2.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
PENDIDIKAN PAUD								
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan	Unit	607.00	607.00	DISDIKBUD
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	18,902.00	18,902.00	
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	26,372.00	26,372.00	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	2,349.00	2,349.00	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	1,642.00	1,642.00	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikolog dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	Orang	498.00	498.00	
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	399.00	399.00	
PENDIDIKAN DASAR								

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)	Unit	732.00	732.00	DISDIKBUD
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	92,428.00	92,428.00	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	38,286.00	38,286.00	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	80,074.00	80,074.00	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	25,605.00	25,605.00	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	5,523.00	5,523.00	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2,872.00	2,872.00	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	4,720.00	4,720.00	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2,195.00	2,195.00	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1,664.00	1,664.00	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1,252.00	1,252.00	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	782.00	782.00	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	653.00	653.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan. Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	Orang	2,200.00	2,200.00	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1,337.00	1,337.00	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	436.00	436.00	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	108.00	108.00	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	782.00	782.00	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	653.00	653.00	
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA								
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)	Unit	732.00	732.00	DISDIKBUD
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	92,428.00	92,428.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	38,286.00	38,286.00	
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	80,074.00	80,074.00	
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	25,605.00	25,605.00	
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	5,523.00	5,523.00	
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2,872.00	2,872.00	
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	4,720.00	4,720.00	
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2,195.00	2,195.00	
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	1,664.00	1,664.00	
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	1,252.00	1,252.00	
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	782.00	782.00	
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	653.00	653.00	
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	2,200.00	2,200.00	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	1,337.00	1,337.00	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	436.00	436.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	108.00	108.00	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	782.00	782.00	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	653.00	653.00	
PENDIDIKAN KESETARAAN								
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Yang dimaksud dengan akreditasi adalah suatu penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan satuan pendidikan usia dini dan non formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan. Jumlah sekolah terakreditasi yang dimaksud adalah seluruh sekolah yang sudah terakreditasi, baik A, B atau C (dibuat terpisah)	Orang	15.00	15.00	DISDIKBUD
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	4,941.00	4,941.00	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	4,941.00	4,941.00	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	401.00	401.00	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	401.00	401.00	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pendidikan formal di tempat penugasan Kualifikasi akademik diperoleh melalui Pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional	Orang	304.00	304.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	436.00	436.00		
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	18.00	18.00		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan							
		1	Jumlah RS Rujukan kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar (negeri dan Swasta)	Sarana, Prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku	Unit	6.00	6.00	DINKES	
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh RS yang sudah/sedang mengikuti persiapan akreditasi	Unit	2.00	2.00		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	6.00	6.00	DINKES	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,024.00	1,024.00		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	3.00	3.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,026.00	1,026.00		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	5.00	5.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,026.00	1,026.00		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	3.00	3.00		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar		1,210.00	1,210.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	1.00	1.00	
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,064.00	1,064.00	
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	set	349.00	349.00	
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	117.00		
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	set	349.00	349.00	
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	set	349.00	349.00	
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	3.00	3.00	
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar								
1			Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	11.00	11.00	
2			Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Dibuat dalam bentuk daftar	paket	5.00	5.00	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Dibuat dalam bentuk daftar	Orang	1,022.00	1,022.00	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		Ha	0.00	0.00	DPRKP
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		M	0.00	0.00	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)		Ha	0.00		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)		M	0.00	0.00	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m) iii. Kanal bajir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)	Jumlah	0.00		
		2. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	Ha	0.00		DPRKP
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	M	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kota (ha)	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	Ha	0.00		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kota (m)	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	M	0.00	0.00	
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kota	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	Ada/Tidak	Tidak		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kota	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota	Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan	Jumlah	0.00		
3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi								
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	%	14,636.00	62.00	DPUPR
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		23,608.00		
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi	%	591,707.00	66.70	
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		887,117.00		
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	%	273,773.00	60.30	
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		453,986.00		
4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan								
		1	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	DPUPR
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) kota		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaraan SPAM		BUMD/UPTD	0.00	0.00	
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	0.00	0.00	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	0.00	0.00	
5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik								
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	391,722.00	391,722.00	DPUPR
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	6,905.00	6,905.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	398,627.00	398,627.00	
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	0.00	0.00	
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	0.00	0.00	
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	398,627.00	398,627.00	
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	391,772.00	0.00	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		441,157.00		
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	348,429.00	0.00	
				rumah di wilayah pengembangan IPLT		441,157.00		
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	6,905.00	0.00	
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		441,157.00		
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	391,722.00	0.00	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		441,157.00		
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	0.00	0.00	
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		0.00		
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	0.00	0.00	
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		0.00		
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	391,772.00	0.00	
				jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota		441,157.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	0.00		
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		0.00		
6. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota								
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	0.00	0.00	DPMPTSP
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		0.00		
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		Izin	395.00	395.00	DPMPTSP
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	DPUPR
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	127.00	127.00	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota		Bangunan	3.00	3.00	
		7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Bangunan	12,448.00	12,448.00	
		8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	12,448.00	12,448.00	
7. Tingkat kemantapan jalan kabupaten								
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota		KM	1,000.83	1,000.83	DPUPR
		2	Panjang jalan yang dibangun		KM	0.00	0.00	
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	55.00	55.00	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		KM	2,662.00	2,662.00	
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	64.00	64.00	
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	2,662.00	2,662.00	
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	64.00	64.00	
		8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	120.37	120.37	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	0.00	0.00	
8. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi								
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten		Orang	52.00	52.00	DPUPR
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten		Orang	7.00	7.00	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten		Orang	7.00	7.00	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBD kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Ada	Ada	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Ada/Tidak	Ada	Ada	
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	29.00	29.00	
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		Badan Usaha	0.00	0.00	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		Badan Usaha	29.00	29.00	
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Badan Usaha	81.00	81.00	
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	0.00	0.00	
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksiesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	0.00	0.00	
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	0.00	0.00	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten						
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	360,079.00	360,079.00	BPBD
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	997.00	997.00	
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa Korban yang rumahnya terkena bencana alam		Unit	997.00	997.00	
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	997.00	997.00	
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit	20.00	20.00	
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit	0.00	0.00	
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit	0.00	0.00	
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang	3,908.00	3,908.00	
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha	0.00		
		2. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kota						
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0.00	0.00	DPRKP
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0.00	0.00	
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0.00	0.00	
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	0.00	0.00	
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha	0.00	0.00	
3. Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani								
		1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		Ha	85.09	85.09	
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	2,537.00	2,537.00	
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	85.09	85.09	
4. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)								
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	360,079.00	360,079.00	DPRKP
		2	Jumlah unit PK RTLH		Rumah	2,537.00	2,537.00	
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	41,149.00	41,149.00	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	0.00	0.00	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	419,671.00	1.17	
				Jumlah total unit rumah		360,079.00		
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			458.00	458.00	
5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)								
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	38.00	38.00	DPRKP
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	3,423.00	3,423.00	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	3,423.00	3,423.00	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	3,423.00	3,423.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	0.00	0.00	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	3,423.00	3,423.00	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	0.00	0.00	
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	0.00	0.00	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	0.00	0.00	
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan						
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani		Jumlah	125.00	125.00	SATPOL PP
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	80.00	142.00	
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Jumlah	12.00	12.00	
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		Perda&Perkada	2.00	2.00	
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		SOP	2.00	2.00	
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	Dibuat dalam bentuk daftar	Ada/Tidak	Ada	Ada	
		2. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana						
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1.00	1.00	BPBD
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan		1.00		
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	126,038.00	9.61	
				Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		1,311,044.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana								
1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun		%	1.00	1.00	BPBD	
		Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan			1.00			
2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun		%	3.00	3.00		
		Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah			1.00			
3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan		%	1,514.00	0.00		
		Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan			1,311,044.00			
4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan		%	1,514.00	0.00		
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			1,311,044.00			
5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops		%	126,038.00	9.61		
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			1,311,044.00			
6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan		%	91.00	0.00		
		Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana			1,311,044.00			
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana								
1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB		%	1.00	100.00	BPBD	
		Jumlah seluruh penetapan status KLB			1.00			
2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana		%	3.00	1.00		
		Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana			3.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	2,465.00	100.00	
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat		2,465.00		
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	306.00	100.00	
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		306.00		
5. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran								
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		Layanan	1,139.00	1,429.00	SATPOL PP
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	7.00	7.00	
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	83.00	83.00	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	0.00	0.00	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Dibuat dalam bentuk daftar	Sarpras	653.00	232.00	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	207.00	219.00	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	2,900.00	2,900.00	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		Kegiatan	4.00	1.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
			1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)					
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		Jumlah	226.00	226.00	DINSOS PPKB PPPA
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		Orang	226.00	226.00	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Orang	0.00	0.00	
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau		Orang	226.00	226.00	
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		unit	1.00	1.00	
6	Sosial	6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		Orang	47.00	47.00	
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		jumlah	1.00	1.00	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		Orang	47.00	47.00	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		Orang	1.00	1.00	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		buah	6.00	6.00	
		11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia		Paket	0.00	0.00	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang		Orang	0.00	0.00	
		13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		Orang	2.00	2.00	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		Orang	27.00	27.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		Orang	226.00	226.00		
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		bimbingan sosial	70.00	70.00		
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		Orang	3.00	3.00		
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar		Orang	1.00	1.00		
		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		Orang	48.00	48.00		
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		Orang	22.00	22.00		
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		Orang	38.00	38.00		
		2. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten							
		1	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan		Orang	347.00	347.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang	0.00	0.00		
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	9.00	9.00		
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket	145.00	145.00		
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang	239.00	239.00		
		6	Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	94.00	94.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
7	Tenaga Kerja	1. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja							
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten	Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah disusun dengan peraturan perundangan yang berlaku	Ada/Tidak	Ada	Ada	DISPERINNAKER	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%			#DIV/0!		
				Realisasi Indikator-target indikator	%	0.00	0.00		
				Realisasi		0.00	0.00		
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Jumlah seluruh perusahaan yang melaporkan penyusunan RTK pada tahun pelaporan	Perusahaan	0.00	0.00		
		2. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi							
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi	%	11.00	100.00	DISPERINNAKER	
				keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n		11.00			
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n	%	28.00	87.50		
				jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n		32.00			
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n	%	32.00	18.18		
				jumlah peserta pelatihan pada tahun n		176.00			
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n	%	6.00	7.79		
				jumlah seluruh LPK pada tahun n		77.00			
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	%	75.00	97.40		
				jumlah LPK yang terdata pada tahun n		77.00			
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	360.00	360.00		
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	170.00	96.59		
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan		176.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja				
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja	%	16.00	9.09				
				jumlah lulusan		176.00					
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	0.00	#DIV/0!				
				Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi		0.00					
		10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang	ΣCPMI dilatih	%	102.00	0.00				
				ΣCPMI terdaftar		102.00					
		11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			102.00	102.00				
		3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja									
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan	%	0.00	0.00		DISPERINNAKER		
				jumlah perusahaan pada tahun n		0.00					
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi(pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		0.00	0.00				
Pertumbuhan ekonomi				0.00	0.00						
pertumbuhan modal				0.00	0.00						
pertumbuhan tenaga kerja				0.00	0.00						
4. Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)											
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun n	%	101.00	26.10	DISPERINNAKER					
		Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		387.00							
2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun n	%	18.00	36.00						
		Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		50.00							
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	50.00	50.00						
4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	58.00	48.74						
		Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		119.00							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD		
						Elemen data	Capaian Kinerja			
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	0.00	#DIV/0!			
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		0.00				
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	8.00	2.07			
				Jumlah perusahaan pada tahun 2020		387.00				
		7	Jumlah mogok kerja		Mogok	1.00	1.00			
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan	5.00	5.00			
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan	0.00	0.00			
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Perselisihan	0.00	0.00			
		11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	8.00	8.00			
		12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		Orang	126.00	126.00			
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Perselisihan	79.00	79.00			
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	Ada/tidak	LKS	42.00	42.00			
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	%	5.00	62.50			
				Jumlah kasus perselisihan		8.00				
		5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota								
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten		Lowongan Kerja	901.00	901.00	DISPERINNAKER		
				2		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	Orang		2,301.00	2,301.00
				3		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	BKK		38.00	38.00
				4		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kota	Orang		0.00	0.00
				5		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	Orang		2.00	2.00
				6		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	Lembaga		1.00	1.00
				7		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota	Perjanjian		0.00	0.00
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	0.00	0.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	0.00	0.00		
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	102.00	102.00		
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	Σfasilitasi PMI yang dipulangkan	%	0.00	0.00		
				ΣPMI yang pulang		0.00			
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	ΣPMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%	102.00	100.00		
				ΣPMI/TKI		102.00			
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Σ PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%	0.00	0.00		
				Σ PMI/TKI purna dan keluarganya		0.00			
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	ΣLTSA yang terbentuk	%	0.00	0.00		
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI		0.00			
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase ARG pada belanja langsung APBD							
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		Lembaga	48.00	48.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		Prog/Keg	104.00	104.00		
		2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota							
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	0.00	0.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Lembaga	4.00	4.00		
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	57.00	1.00		
				jumlah korban kekerasan anak di tingkat kabupaten		57.00			
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	4.00	4.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		Lembaga	0.00	0.00		
		3. Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000 anak							
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kota yang mendapatkan pelatihan		Organisasi	37.00	37.00	DINSOS PPKB PPPA	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten yang sudah dilatih		Orang	219.00	219.00		
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	37.00	37.00		
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten		Lembaga	3.00	3.00		
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/ Program	1.00	1.00		
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		Lembaga	4.00	4.00		
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang,mendapatkan layanan	%	64.00	100.00		
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		64.00			
9	Pangan	1. Persentase Cadangan Pangan							
		1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada/Tidak	Ada	Ada	DISTAN PANGAN	
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	Ada	Ada		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah	Ada/Tidak	Ada	Ada		
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada	Ada		
10	Pertanahan	1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan							
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	0.00	100.00	DPMPTSP	
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		0.00			
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee	%	0.00	0.00	DPMPTSP	
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		0.00		DPUPR	
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee	%	0.00	0.00		
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		0.00			
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya	%	0.00	0.00		
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun		0.00			
		4	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%	0.00	0.00		
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun		0.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
11	Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kota							DLH
		1	Hasil Perhitungan kota terhadap :						
			a) Indeks Kualitas Air, (IKA)			51.54	51.54		
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)			91.68	91.68		
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			68.05	68.05		
		2. Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah kota							DLH
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota	Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	%	0.05	0.05		
				Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah	hari	0.00	0.00		
				Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	%	1:365160	1:365160		
		3. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota							DLH
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota	%	17.00	100.00		
				jumlah usulan permohonan yang teregistrasi		17.00			
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kota	Jumlah PPLHD yang ada	%	0.00	#DIV/0!		
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota		0.00			
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten dalam 1 kabupsten	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda	%	0.00	0.00		
				Jumlah usulan MHA		0.00			
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan	%	0.00	0.00		
		Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada		0.00					
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana	%	0.00	#DIV/0!				
		target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat		0.00					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	%	9.00 9.00	100.00		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	1. Perekaman KTP Elektronik							
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	%	218.00 418,182.00	0.05	DISDUKCAPIL	
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan Peristiwa Perceraian yang dilaporkan	%	34.00 14,675.00	0.23		
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan Peristiwa kematian yang dilaporkan	%	11,909.00 11,909.00	100.00		
		4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kota kota dalam satu tahun	%	1.00	1.00		
13	Pemberdayaa Masyarakat dan Desa	1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal							
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	17.00	17.00	DISPERMADES	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	4.00	4.00		
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	0.00	0.00		
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	17.00	17.00		
		2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri							
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	17.00	17.00	DISPERMADES	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	4.00	4.00	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	0.00	0.00	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan		Desa	17.00	17.00	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. TFR (Angka Kelahiran Total)						
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	Tidak	Tidak	DINSOS PPKB PPPA
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	21.00	21.00	
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	ASFRi ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun		41.00	41.00	DINKES
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE		180,525.00	88.34	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE		204,345.00		
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder	11,517.00	11,517.00	
		2. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	%	52.00	96.30	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah faskes		54.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD			
						Elemen data	Capaian Kinerja				
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	132,236.00	64.64				
				Jumlah PUS		204,578.00					
		3	Pemerintah Daerah kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPk yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPk yang efektif		1,797.00					
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	2,870.00	17.49				
				jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		16,406.00					
		3. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)									
		1	Persentase kesertaan KB di kabupaten dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota	%	168.00	45.16				
				Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		372.00					
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	31,650.00	5.65				
				Jumlah Keluarga PBI		560,386.00					
15	Perhubungan	1. Rasio konektivitas kabupaten									
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	173.40	28.90	DISHUB					
		Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		6.00							
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%	16,162.00	68.56						
		Jumlah kendaraan wajib uji		23,572.00							
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	0.00	#DIV/0!						
		Jumlah lintas penyeberangan dalam kabupaten		0.00							
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%	330.67	47.24						
		Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		7.00							

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		2. V/C Ratio di Jalan kota						
		1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten	%	330.67	47.24	
				Target kebutuhan perlengkapan jalan kabupaten		7.00		
		1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo						
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	48.00	100.00	DISKOMINFO
				Jumlah Perangkat Daerah		48.00		
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	48.00	100.00	
				Jumlah Perangkat Daerah		48.00		
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan dinas kominfo (berbasis suara, video, teks, data, dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada/Tidak	ada	ada	
		2. Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi						
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	19.00	39.58	DISKOMINFO
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		48.00		
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	48.00	100.00	Bag Organisasi
				Jumlah Perangkat Daerah		48.00		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	17.00	35.42	DISKOMINFO
				Jumlah Perangkat Daerah		48.00		Bag Organisasi
16	Komunikasi dan Informatika	4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	7.00	100.00	DISKOMINFO
				Jumlah layanan		7.00		Bag Organisasi
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	0.00	0.00	DISKOMINFO
				Jumlah layanan		0.00		Bag Organisasi
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	3.00	100.00	DISKOMINFO
				Jumlah sistem elektronik		3.00		
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	10.00	100.00	DISKOMINFO
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		10.00		Bag Organisasi
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	44.00	91.67	DISKOMINFO
				Jumlah perangkat daerah		48.00		Bag Organisasi
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	%	44.00	91.67	DISKOMINFO
				Jumlah perangkat daerah		48.00		Bag Organisasi
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	%	48.00	100.00	DISKOMINFO		
		Jumlah perangkat daerah		48.00		Bag Organisasi		
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	%	1,384.00	100.00	DISKOMINFO		
		Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah		1,384.00				
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	%	25.00	52.08	DISKOMINFO		
		Jumlah perangkat daerah		48.00		Bag Organisasi		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	%	6.00	100.00	DISKOMINFO	
				Jumlah ASN Pengelola TIK		6.00			
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	Ada	Ada		
3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah kota									
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah	%	36.00	97.30	DISKOMINFO	
				Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah kabupaten		37.00			
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	%	7.00	100.00		
				Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kota		7.00			
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	7.00	100.00		
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		7.00			
17	Koperasi dan UKM	1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas							
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	0.00	0.00	DPMPTSP	
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		0.00			
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	0.00	0.00		
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		0.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	75.00	17.28	DISDAGKOP UKM
				Jumlah koperasi yang ada		434.00		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	85.00	46.96	
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		181.00		
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	26.00	5.99	
				Jumlah koperasi yang ada		434.00		
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	75.00	0.05	
				Jumlah anggota koperasi yang ada		159,534.00		
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	3.00	0.69	
				Jumlah koperasi yang ada		434.00		
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan				Tidak Perlu Diisi	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	%	132.00	30.41	
Jumlah koperasi yang ada				434.00				
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	3.00	0.69			
		Jumlah koperasi yang ada		434.00				
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	0.00	0.00			
		Jumlah koperasi yang ada		434.00				
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	147.00	33.87			
		Jumlah koperasi yang ada		434.00				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan Jumlah koperasi yang ada	%	0.00 434.00	0.00	
2. Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha								
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru Jumlah wirausaha yang ada	%	99.00 106,637.00	0.09	DISDAGKOP UKM
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) Jumlah usaha mikro yang ada	%	106,341.00 106,637.00	99.72	DPMPTSP
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra Jumlah usaha mikro yang ada	%	45.00 106,637.00	0.04	DISDAGKOP UKM
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	%	299.00 0.00	0.00	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	%	45.00 106,592.00	0.04	
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan Jumlah usaha mikro yang ada	%	523.00 106,637.00	0.49	
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha mikro yang ada	%	523.00 106,637.00	0.49	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
18	Penanaman Modal	1. Persentase peningkatan investasi di kota							DPMPTSP
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah koabupaten	Jumlah fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada/Tidak	Tidak	Tidak		
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal pertahun	Jumlah Laporan	0.00	0.00		
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	Jumlah kegiatan seminar bisnis/ <i>business</i> forum, <i>one on one meeting</i>	Jumlah Kegiatan	4.00	4.00		
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah Kegiatan	0.00	0.00		
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah Kegiatan	0.00	0.00		
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Konsultasi	44.00	44.00		
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah Perizinan dan Non	3,970.00	3,970.00		
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten	Jumlah Realisasi (Rupiah)	2,803,105,619,670.00	2,803,105,619,670.00		
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kota serta kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Jumlah Aparatur	2.00	2.00		
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Perusahaan	4.00	4.00		
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kota kota dalam 1 (satu) daerah kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi	%	1,140.00	100.00		
Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima		1,140.00							
19	Kepemudaan dan Olahraga	1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri							DISPARPORA
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	0.00	0.00		
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
			2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	30.00	30.00		
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	0.00	0.00		
			3. Peningkatan Prestasi Olahraga						
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	Orang	6.00	6.00		
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	5.00	5.00		
20	Statistik		1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	Tidak	Tidak	DISKOMINFO	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	1.00	1.00		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Kompilasi	1,384.00	1,384.00		
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	0.00	0.00		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah Kompilasi	0.00	0.00		
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	%	1.00	100.00		
				Jumlah kegiatan statistik sektoral		1.00			
		7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	%	6.00	100.00		
				jumlah indikator statistik sektoral		6.00			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
21	Persandian	1. Tingkat keamanan informasi pemerintah							DISKOMINFO
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	%	1.00	100.00		
				Jumlah kegiatan strategis yang ada		1.00			
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian	%	0.00	0.00		
				Jumlah SE yang ada		0.00			
		3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	%	4.00	100.00		
				Jumlah SE yang ada		4.00			
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	%	0.00	0.00		
				Jumlah titik pada PHKS		0.00			
22	Kebudayaan	1. Terlestarikannya Cagar Budaya							DISDIKBUD
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan)	Obyek	1,030.00	1,030.00		
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	Obyek	0.00	0.00		
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Obyek	165.00	165.00		
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Orang	90.00	90.00		
		5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan	Cagar Budaya	0.00	0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		6	Perlindungan cagar budaya kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	Cagar Budaya	1.00	1.00	
		7	Layanan perizinan membawa cagar budaya kota ke luar kota dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten	Cagar Budaya	0.00	0.00	
		8	Pengembangan cagar budaya kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Cagar Budaya	0.00	0.00	
		9	Pemanfaatan cagar budaya kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Cagar Budaya	0.00	0.00	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	Koleksi	0.00	0.00	
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	Orang	0.00	0.00	
			Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	Orang	0.00	0.00	
		12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum				Tidak Perlu Diisi	
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	Tim	0.00	0.00	
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	Tim	1.00	1.00	
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Orang	0.00	0.00	
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	Orang	90.00	90.00	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Orang	0.00	0.00	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	Unit	0.00	0.00	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Kegiatan	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
23	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat							
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	%	45,658.00	3.48	DISPUSPA	
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1,311,044.00			
		2	Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	53,093.00	4.05		
				Jumlah penduduk di wilayahnya		1,311,044.00			
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	%	391.00	0.03		
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1,311,044.00			
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	26.00	2.94		
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		884.00			
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat			219.00	219.00		
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat							
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	2.00	2.00	DISPUSPA	
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Yang dimaksud naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan	Naskah Kuno	2.00	2.00		
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	Budaya Etnis	712.00	712.00		

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
24	Kearsipan		1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	1,839.00	68.11	DISPUSPA	
				Jumlah seluruh arsip aktif		2,700.00			
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	7,255.00	100.00	DISPUSPA	
				Jumlah seluruh arsip inaktif		7,255.00			
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	4,428.00	100.00	DISPUSPA	
				Jumlah seluruh arsip Statis		4,428.00			
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	58.00	0.34	DISPUSPA	
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kota		16,845.00			
			2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat						
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip	Jumlah Arsip	0.00	0.00	DISPUSPA	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana	Jumlah Arsip	0.00	0.00		
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah	Jumlah Arsip	0.00	0.00		
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik	Jumlah Arsip	5,165.00	5,165.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Arsip	0.00	0.00		
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Jumlah Arsip	0.00	0.00		
Urusan Pilihan									
25	Kelautan Perikanan	1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kota/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)							
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			181.00	143.00	DISPETERIKAN	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	%	0.00	0.00		
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah kabupaten		0.00			
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kota/ kota yang diterbitkan		Izin	28.00	28.00		
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya	440.00	440.00		
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih	2,207,858,240.00	2,207,858,240.00		
26	Pariwisata	1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan							
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		11.00	11.00	DISPARPORA	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	*Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata		0.00	0.00	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten	Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha : • Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa	TDUP	6.00	6.00	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		orang	902.00	902.00	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Kegiatan	6.00	6.00	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten		orang	0.00	0.00	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata	Industri	0.00	0.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	%	0.00	#DIV/0!	
				Jumlah tenaga kerja pariwisata Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah : <input checked="" type="checkbox"/> Sub sektor biro perjalanan wisata <input checked="" type="checkbox"/> Sub sektor hotel dan restoran <input checked="" type="checkbox"/> Sub sektor spa <input checked="" type="checkbox"/> Sub sektor restoran, bar dan jasa boga <input checked="" type="checkbox"/> Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader) <input checked="" type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata selam <input checked="" type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata <input checked="" type="checkbox"/> Bidang kependuan ekowisata <input checked="" type="checkbox"/> Bidang arung jeram <input checked="" type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata agro <input checked="" type="checkbox"/> Bidang jasa boga <input checked="" type="checkbox"/> Bidang kependuan wisata goa <input checked="" type="checkbox"/> Bidang manajerial spa <input checked="" type="checkbox"/> Bidang MICE		0.00		
		9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	%	138.00	100.00	
			Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan		138.00			
		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Lokasi	0.00	0.00	
27	Pertanian	1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun						
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		Unit	189.00	189.00	DISTAN PANGAN
		2	Prasarana pertanian yang digunakan			14.00	14.00	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dokumen	3.00	3.00	
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	14.00	66.67	
				Jumlah prasarana yang dibangun		21.00		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kabupaten	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	3.00	100.00	
				Jumlah usulan usaha pertanian		3.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		2. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular						
		1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana (bencana pertanian dan penyakit menular)	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	Unit	118.42	118.42	
				Luas area terkena bencana		118.42	118.42	
28	Kehutanan	1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Dokumen	0.00	0.00	DISTAN PANGAN
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			0.00	0.00	
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura			0.00	0.00	
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA			0.00	0.00	
29	ESDM	1. Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kota						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak	0.00	0.00	DPUPR
30	Perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	%	11.00	100.00	DPMPTSP
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		11.00		
				Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	%	11.00	100.00	
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		11.00		
		2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	8.00	100.00	
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		8.00		
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	%	0.00	#DIV/0!	
				Jumlah gudang yang ada di Kab		0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :					
			a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0.00		
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		0.00		
			b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0.00	0.00	
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		0.00		
			c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%	0.00	0.00	
				Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri		0.00		
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah kab	%	0.00	0.00	DISDAGKOP UKM
				Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer		0.00		DPMPSTP
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam	%	0.00	0.00	DISDAGKOP UKM
				Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		0.00		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribus perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	0.50	100.00		
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	0.02	0.02		
2. Persentase kinerja realisasi pupuk									
		1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = a/(b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		14,974.00	14,974.00	DISTAN PANGAN	
3. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku									
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	9,194.00	43.39	DISDAGKOP UKM	
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab		21,190.00			
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	21.00	100.00		
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		21.00			
31	Perindustrian	1. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten							
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	0.00	0.00	DISPERINNAKER	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk					

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
2. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP								
1			Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	%	50.00	0.00	
3. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait								
1			Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	59.00	29.65	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			199.00	
4. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) bagi Industri kecil yang dikeluarkan oleh instansi terkait								
1			Persentase jumlah izin perluasan industri IPIU) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	0.00	0.00	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			0.00	
5. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini								
1			Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di kota di SIINas	%	59.00	0.25	
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di kota			23,744.00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		SKPD
						Elemen data	Capaian Kinerja	
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	Kawasan	0.00	0.00	DISPERINNAKER
		2	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga	Permukiman	0.00	0.00	
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman	0.00	0.00	

LAMPIRAN 2.2.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	☒ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga penduduk usia 5-6 tahun di Daerah Provinsi tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ☒ Yang dimaksud dengan anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 5-6 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan anak usia dini sebelumnya ☒ Yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, dengan prioritas usia 5 dan 6 tahun. ☒ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	35,723.00	93.002%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			38,411.00		DISDUKCAPIL
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	☒ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-12 tahun di Daerah kabupaten tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ☒ Yang dimaksud dengan anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 7-12 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan dasar ☒ Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jalur pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi ☒ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	112,681.00	92.179%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			122,242.00		DISDUKCAPIL
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	☒ Yang dimaksud dengan warga negara adalah warga negara/penduduk/anak usia 13-15 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ☒ Yang dimaksud dengan anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat adalah anak usia 13-15 tahun yang sudah menyelesaikan pendidikan menengah pertama pertama ☒ Yang dimaksud dengan pendidikan menengah pertama termasuk di antaranya SMP, MTs atau satuan pendidikan formal lain yang sederajat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau yang diakui sama/setara SD, MI ☒ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan n ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	48,596.00	80.907%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan			60,064.00		DISDUKCAPIL

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan warga negara adalah penduduk usia 7-18 tahun di Daerah Kabupaten/Kota tersebut (sesuai dengan data kependudukan), baik yang bersekolah di daerah Kabupaten/Kota tersebut atau di daerah Kabupaten/Kota lainnya ☒ Yang dimaksud dengan 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah adalah anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah atau belum menempuh pendidikan dasar dan menengah. 	,, , , , , ,, , , %	4,266.00	100.000%	DISDIKBUD
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang mencakup program paket A dan B dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. ☒ Cakupan perhitungan adalah satuan pendidikan negeri maupun swasta. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		4,266.00		DISDIKBUD
		5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan rumah sakit rujukan adalah rumah sakit rujukan kabupaten/kota yang menjadi rujukan lintas kecamatan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. ☒ Puskesmas dimasukkan ke dalam perhitungan apabila ditetapkan sebagai fasilitas kesehatan rujukan oleh Bupati/Walikota. 	,, , , , , ,, , , %	500.00	0.038	DINKES
				Jumlah Penduduk kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan daya tampung adalah jumlah tempat tidur ☒ Cakupan perhitungan adalah rumah sakit negeri dan swasta. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		1,311,044.00		DISDUKCAPIL
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi minimal Tingkat Utama	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Akreditasi RS adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan RS setelah dilakukan penilaian bahwa RS telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit. ☒ Akreditasi yang dibutuhkan minimal utama ☒ Cakupan perhitungan rumah sakit negeri dan swasta ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , , %	4.00	66.667%	DINKES
				Jumlah RS di kabupaten			6.00		DINKES
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (K4) ☒ Yang dimaksud dengan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar adalah ibu hamil yang telah selesai menjalani masa kehamilannya (bersalin) di akhir tahun berjalan ☒ Ibu hamil yang belum selesai menjalani masa kehamilannya pada akhir tahun berjalan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, namun dihitung pada tahun berikutnya. ☒ Yang dimaksud dengan jumlah ibu hamil di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama ☒ Ibu hamil yang masuk dalam perhitungan adalah seluruh ibu hamil yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut. ☒ Ibu hamil dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu hamil tersebut. ☒ Cakupan perhitungan adalah fasilitas layanan kesehatan negeri dan 	,, , , , , ,, , , %	17,054.00	94.034%	DINKES
				Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota			18,136.00		DINKES

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
2	Kesehatan	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ☒ Ibu bersalin dimasukkan ke dalam perhitungan adalah ibu bersalin yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.☒ Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut. ☒ Ibu bersalin di rumah dan/atau dukun beranak tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. ☒ Ibu bersalin di polindes atau poskesdes tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan, KEQUALI Pemda dapat menjamin Polindes dan Poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana prasarana sesuai standar pelayanan persalinan. ☒ Cakupan perhitungan fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , , .%	16,361.00	99.738%	DINKES
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ☒ Ibu bersalin dimasukkan ke dalam perhitungan adalah ibu bersalin yang berdomisili di Kabupaten/Kota tersebut.☒ Ibu bersalin dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal ibu bersalin tersebut. ☒ Ibu bersalin di rumah dan/atau dukun beranak tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan. ☒ Ibu bersalin di polindes atau poskesdes tidak dimasukkan ke dalam cakupan perhitungan, KEQUALI Pemda dapat menjamin Polindes dan Poskesdes telah dilengkapi SDM, sarana prasarana sesuai standar pelayanan persalinan. ☒ Cakupan perhitungan fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , , .%	16,404.00		DINKES
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal. ☒ Yang dimaksud dengan jumlah bayi lahir di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ☒ Bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , , .%	16,247.00	99.583%	DINKES
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah bayi berusia 0-28 hari yang mendapatkan kunjungan neonatal (KN) minimal 3 kali selama periode neonatal. ☒ Yang dimaksud dengan jumlah bayi lahir di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ☒ Bayi baru lahir dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal bayi baru lahir tersebut. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , , .%	16,315.00		DINKES

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ☒ Yang dimaksud dengan jumlah balita di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran balita di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 	,, , , , , ,, , . %	74,382.00	84.612%	DINKES
				Jumlah balita di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Balita dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal balita tersebut. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, polindes, poskesdes, pustu. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		87,910.00		DINKES
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah anak berusia 7-15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ☒ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan. ☒ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut dan penilaian ketajaman indera. ☒ Yang dimaksud dengan tindak lanjut skrining kesehatan meliputi memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan rujukan apabila diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan 	,, , , , , ,, , . %	99,185.00	55.375%	DINKES
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan jumlah anak usia pendidikan di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran anak usia pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. ☒ Cakupan perhitungan adalah data/informasi dari pelayanan kesehatan di satuan pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTS dan di luar satuan pendidikan dasar seperti pondok pesantren, panti/LKSA, lapas/PLKA dan lainnya ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		179,116.00		DINKES

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan (keluarga berencana) dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular. ☒ Pelayanan skrining faktor resiko usia produktif dilakukan minimal satu kali dalam setahun sedangkan pelayanan edukasi pada usia produktif adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM ☒ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko. ☒ Yang dimaksud dengan jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 15-59 tahun di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. ☒ Warga negara usia produktif dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia produktif tersebut. 	,, , , , , ,, , , %	163,472.00	20.301%	DINKES
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. ☒ Warga negara usia produktif dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia produktif tersebut. 		805,244.00		DINKES
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor resiko penyakit menular dan tidak menular. ☒ Pelayanan skrining faktor resiko usia lanjut dilakukan minimal satu kali dalam setahun ☒ Yang dimaksud dengan skrining kesehatan meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. ☒ Pelayanan edukasi pada usia lanjut adalah edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah. ☒ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang usia 60 tahun ke atas di wilayah kerja kabupaten/kota tertentu dalam kurun waktu satu tahun yang sama. ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. ☒ Warga negara usia lanjut dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia lanjut tersebut. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. 	,, , , , , ,, , , %	88,075.00	48.150%	DINKES
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Penetapan sasaran dapat menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survey atau riset yang terjamin validitasnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan dari Dinas Dukcapil yang berasal dari SIAK. ☒ Warga negara usia lanjut dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara usia lanjut tersebut. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. 		182,917.00		DINKES

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>☒ Yang dimaksud dengan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>☒ Pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal 1 kali 1 bulan di Fasyankes, edukasi perubahan gaya hidup atau patuhan minum obat dan melakukan rujukan apabila diperlukan</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</p>	,, , , , , ,, , , %	43,053.00	11.030%	DINKES
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten	<p>☒ Penetapan estimasi penderita hipertensi di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p>☒ Warga negara penderita hipertensi dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara hipertensi tersebut.</p> <p>☒ Dibuktikan</p>		390,338.00		DINKES
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<p>☒ Yang dimaksud dengan penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (pembilang) adalah penderita DM berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>☒ Pelayanan kesehatan meliputi pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita DM di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah estimasi penderita DM usia 15 tahun ke atas yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama</p>	,, , , , , ,, , , %	10,904.00	59.751%	DINKES
				Jumlah penderita DM di kabupaten	<p>☒ Penetapan estimasi penderita DM di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.</p> <p>☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya.</p> <p>☒ Warga negara penderita DM dari luar wilayah kerja Kabupaten/Kota tetap dilayani dan dicatat tetapi tidak termasuk ke dalam cakupan perhitungan dan dilaporkan kepada Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tinggal warga negara penderita DM tersebut.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>		18,249.00		DINKES

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan (pembilang) adalah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. ☒ Yang dimaksud dengan ODGJ Berat adalah psikotik akut dan schizofrenia. ☒ Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat ☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita ODGJ Berat di kabupaten/kota adalah jumlah proyeksi penderita ODGJ Berat yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam waktu kurun waktu satu tahun yang sama ☒ Penetapan proyeksi penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , . %	2,025.00	62.771%	DINKES
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Penetapan proyeksi penderita ODGJ Berat di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar terbaru yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		3,226.00		DINKES
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar adalah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun ☒ Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya ☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita TBC di kabupaten/kota adalah jumlah sasaran orang terduga TBC yang menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , . %	3,526.00	25.039%	DINKES
				Jumlah penderita TBC di kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan jumlah penderita TBC di kabupaten/kota adalah jumlah sasaran orang terduga TBC yang menggunakan data orang yang kontak erat dengan penderita TBC dan ditetapkan oleh Kepala Daerah ☒ Cakupan perhitungan adalah data dari fasilitas layanan kesehatan negeri dan swasta, puskesmas dan jaringannya. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		14,082.00	DINKES	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Setiap orang dengan resiko terinfeksi HIV berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi skrining (deteksi dini) yang dilakukan dengan pemeriksaan Tes Cepat HIV minimal 1 kali 1 tahun dan edukasi perilaku beresiko dan pencegahan penularan. ☒ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penjaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan pemasyarakatan. ☒ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang terduga HIV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang beresiko terinfeksi HIV ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , . %	17,294.00	97.491%	DINKES
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota (penyebut) adalah jumlah sasaran orang terduga HIV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan orang yang beresiko terinfeksi HIV ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		17,739.00	DINKES	

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD		
							Elemen data				
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	<p>☒ Yang dimaksud dengan wilayah sungai (WS) adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan kawasan permukiman rawan banjir adalah kawasan permukiman rawan bencana banjir yang ditetapkan melalui RTRW Provinsi dan Peta Rawan Bencana Banjir pada kawasan Permukiman.</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengendalian banjir meliputi : bangunan perkuat tebing, tanggul sungai, kanal banjir, pintu air atau bendungan pengendali banjir, pompa banjir, polder atau kolam retensi dan lain-lain.</p> <p>☒ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , , ,, , , %	0.00	0.000%	DPUPR		
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)		0.00	DPUPR				
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)		<p>☒ Yang dimaksud dengan wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2. Penetapan wilayah sungai dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. .</p> <p>☒ Pengamanan pantai diselenggarakan berdasarkan zona pengamanan pantai dan mempertimbangkan wilayah sungai, pola serta rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan infrastruktur pengaman pantai meliputi : breakwater, seawall dan lain-lain.</p> <p>☒ Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan harus menyertakan surat keterangan</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , , ,, , , %	0.00	0.000%	DPUPR	
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)			0.00	DPUPR			
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting			<p>☒ Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi</p> <p>☒ Cakupan perhitungan adalah data/informasi jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting.</p> <p>☒ Daerah yang tidak memiliki irigasi harus menyertakan surat keterangan</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , , ,, , , %	2,858.30	8.015%	DPUPR
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten				35,662.45	DPUPR		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD	
							Elemen data			
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan Sistem Penyediaan Air Minum/SPAM merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum baik melalui Jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. <input checked="" type="checkbox"/> Untuk data total rumah tangga (penyebut), selain proyeksi, data riil total rumah tangga di Kabupaten-Kota juga dapat digunakan.	,, , , , ,, , .%	397,955.00	90.207%	DPUPR	
				Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	<input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		441,157.00		DPUPR	
		23	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan cubluk adalah tempat penampungan tinja atau disebut juga tanki septik (septic tank) <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan IPLT/Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja merupakan instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub sistem pengolahan setempat <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan IPALD/Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.	,, , , , ,, , .%	Unit	398,627.00	90.359%	DPUPR
				Jumlah rumah di Kabupaten	<input checked="" type="checkbox"/> Data ini bersifat Akumulatif dan Alternatif, yang artinya bisa salah satu baik Cubluk, IPLT dan IPALD, atau Ketiga-tiganya. <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per kecamatan					441,157.00
		24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	<input checked="" type="checkbox"/> Seluruh Jenis IMB Baik Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci	,, , , , ,, , .%		395.00	100.000%	DPUPR
				Jumlah IMB yang berlaku						395.00
		25	Tingkat kemandapan jalan	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah panjang jalan dan jembatan <input checked="" type="checkbox"/> Kemandapan jalan adalah panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci	,, , , , ,, , .%		889.015	88.828%	DPUPR
				Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota						1,000.825
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan tenaga kerja konstruksi yang terlatih adalah tenaga operator/teknisi/analisis (tenaga terampil) di bidang jasa konstruksi yang meliputi layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan termasuk sertifikat kompetensi kerja yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci	,, , , , ,, , .%		52.00	100.000%	DPUPR
				Jumlah kebutuhan teknis/analisis di wilayah kabupaten						52.00

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD			
							Elemen data					
4		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	<input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci per jenis Konstruksi	,, , , , ,, , .%	108.00	100.000%	DPUPR			
				Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			108.00		DPUPR			
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	<input checked="" type="checkbox"/> Jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Dilakukan pada saat masa pasca bencana 2. Terdapat surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota 3. Dampak bencana di daerah administrasi Kabupaten <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan rumah korban bencana yang ditangani (pembilang) meliputi : 1. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana 2. Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana 3. Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana 4. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana 5. Kriteria pemberian penerima layanan dan kualitas layanan dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku. <input checked="" type="checkbox"/> Data Total Rencana Unit Rumah korban bencana yang akan ditangani berdasarkan Rencana Program dan Anggaran <input checked="" type="checkbox"/> Kualitas rumah layak huni dapat melihat peraturan perundangan yang berlaku (Permen PU Nomor 29/2018) <input checked="" type="checkbox"/> Apabila tidak terjadi bencana selama 3 tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah dapat memberikan surat keterangan	,, , , , ,, , .%	0.00	0.000%	DPRKP			
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			0.00		DPRKP			
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni			<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan relokasi program Pemerintah Daerah berpedoman peraturan perundangan yang berlaku <input checked="" type="checkbox"/> Apabila Pemda tidak memiliki program relokasi, Pemda dapat menyertakan surat keterangan bahwa sudah dilakukan pendataan perumahan pada lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya, perumahan pada lahan bukan fungsi pemukiman dan relokasi masyarakat terkena program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		,, , , , ,, , .%	0.00	0.000%	DPRKP
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan						0.00		DPRKP
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)			<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman kumuh yaitu pemukiman tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. <input checked="" type="checkbox"/> Data/informasi yang digunakan adalah total luas kawasan kumuh, bukan jumlah titik kawasan kumuh <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		,, , , , ,, , .%	85.09	100.000%	DPRKP
				Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha						85.09		DPRKP

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah kumuh/tidak layak huni	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , % Unit	41,149.00	11.428%	DPRKP
				Jumlah total unit rumah Kabupaten			360,079.00		DPRKP
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang dibangun oleh Pelaku Pembangunan (Pengembang/Developer) <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan pemukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian <input checked="" type="checkbox"/> Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap sambungan atau jaringan PSU meliputi : 1. Jalan 2. RTNH (Ruang Terbuka Non Hijau) 3. Penerangan Jalan Umum (PJU) 4. Sanitasi 5. Jaringan Air Minum <input checked="" type="checkbox"/> Unit rumah yang sudah dibangun terfasilitasi PSU juga dimasukkan ke dalam perhitungan. <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , % Unit	3,423.00	0.951%	DPRKP
				Jumlah unit rumah kab/kota			360,079.00		DPRKP
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang diselesaikan	<input checked="" type="checkbox"/> Gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan tindakan atau upaya yang memiliki sifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi terwujudnya kondisi tertib dan tenteram berdasarkan ruang lingkup yang ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan kepala daerah <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , % Unit	125.00	100.000%	SATPOL PP
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk			125.00		SATPOL PP
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	<input checked="" type="checkbox"/> Penegakan Perda atau Perkada dilakukan atas terjadinya pelanggaran terhadap aturan yang memuat sanksi. <input checked="" type="checkbox"/> Kewenangan penegakan Perda diberikan kepada PPNS. Dalam penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , % Unit	12.00	100.000%	SATPOL PP
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi			12.00		SATPOL PP

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		<p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana adalah jumlah warga negara/penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana</p> <p>☒ Kegiatan pemberian informasi rawan bencana dapat meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana 2. Sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia 3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik <p>☒ Perhitungan dapat menggunakan angka estimasi atau data riil jumlah rumah tangga yang berada di kawasan rawan bencana yang menjadi target sosialisasi</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi jenis bencana, bentuk sosialisasi, jumlah peserta</p>	Orang	126,038.00	126,038	BPBD
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		<p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah jumlah warga di kawasan rawan bencana yang memperoleh pelatihan, memperoleh layanan pusdalops dan memperoleh peralatan perlindungan sesuai dengan jenis ancaman bencana</p> <p>☒ Data yang diambil adalah data tahun berkenaan berdasarkan Program dan Anggaran.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, bentuk dan jenis pencegahan dan kesiapsiagaan, dan jumlah peserta</p>	Orang	91.00	91	BPBD
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		<p>☒ Yang dimaksud dengan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana.</p> <p>☒ Apabila tidak terdapat bencana, perhitungan dilakukan dengan melihat keberadaan alokasi anggaran untuk antisipasi terjadinya bencana.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban dan jenis bencana</p>	Orang	306.00	30,600	BPBD
					Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan	dokumen	1.00		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi ☒ Yang dimaksud tingkat waktu tanggap adalah waktu minimal yang diperlukan dimulainya menerima informasi dari warga negara atau penduduk sampai tiba di tempat kejadian serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran. ☒ Relawan kebakaran harus tercatat dan diformalkan oleh Pemda melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah setidaknya melalui pemberian tanda pengenal relawan kebakaran ☒ Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan secara terperinci minimal memuat informasi lokasi kegiatan, tanggal kejadian, jumlah korban, dan waktu respon yang dibutuhkan 	, , , , , , , , , . %	108.00	100.000%	Satpol PP
				Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten			108.00		Satpol PP
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran		<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan rata-rata waktu tanggap adalah jumlah total waktu tanggap seluruh kejadian kebakaran dalam waktu satu tahun dibagi dengan jumlah seluruh kejadian kebakaran ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	Menit	9.82	9.82	Satpol PP
	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas, lanjut usia, lanjut usia terlanjar, anak terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas, lanjut usia terlanjar, lanjut usia terlanjar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. ☒ Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. ☒ Yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 tahun ke atas. ☒ Yang dimaksud dengan gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. ☒ Yang dimaksud dengan terlanjar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus. ☒ Yang dimaksud dengan pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 	, , , , , , , , , . %	226.00	100.000%	DINSOS PPKB PPPA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
6				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	<p>mendapatkan belas kasihan orang lain.</p> <p>☒ Kriteria populasi tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19-60 tahun (termasuk istri/suami dan anaknya) 2. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus 3. Tidak memiliki tempat tinggal tetap 4. Masih ada perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang peduli <p>☒ Kriteria populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di luar panti meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara dan tidak terurus 2. Masih ada perseorangan, keluarga dan atau masyarakat yang mengurus <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci berdasarkan kategori penerima yakni penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis.</p>		226.00		DINSOS PPKB PPPA
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	<p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan perlindungan dan jaminan sosial setelah tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana.</p> <p>☒ Bencana alam terdiri dari : gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan termasuk siklon tropis/putting beliung dan/atau kekeringan.</p> <p>☒ Bencana sosial terdiri dari : konflik sosial, aksi terror, kebakaran pemukiman dan Gedung, wabah/epidemi, gagal teknologi dan/atau kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>☒ Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1-50 orang 2. Dampak bencana meliputi 1 Kabupaten/Kota dan/atau 3. Ada surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci minimal memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana.</p>	,,,,, ,,,%	347.00	100.000%	DINSOS PPKB PPPA	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<p>☒ Kriteria penerima perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah per satu kejadian bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1-50 orang 2. Dampak bencana meliputi 1 Kabupaten/Kota dan/atau 3. Ada surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait disajikan terperinci minimal memuat informasi lokasi bencana, jumlah korban bencana penerima bantuan, dan jenis bencana.</p>		347.00		DINSOS PPKB PPPA	

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	<p>☒ Yang dimaksud dengan rencana tenaga kerja adalah hasil kegiatan perencanaan tenaga kerja yang memuat perkiraan dan rencana persediaan tenaga kerja, kebutuhan akan tenaga kerja serta neraca dan program ketenagakerjaan</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , , ,, , . %	12.00	100.000%	DISPERINNAKER
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten			12.00		DISPERINNAKER
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	<p>☒ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan. (apakah jumlah tenaga kerja dimaksud, sama dengan jumlah tenaga kerja pada IKK Outcome sebelumnya)</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)</p>	,, , , , , ,, , . %	176.00	0.023%	DISPERINNAKER
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan			774,589.00		DISPERINNAKER
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	<p>☒ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan tenaga kerja adalah seluruh orang yang bekerja di Kabupaten/Kota pada tahun pelaporan.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>		23,661,710,000.00	3,054,743.871	DISPERINNAKER
				Jumlah tenaga kerja			774,589.00		DISPERINNAKER
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak		,, , , , , ,, , . %	58.00	14.987%	DISPERINNAKER
				Jumlah Perusahaan			387.00		DISPERINNAKER
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	<p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan minimal memuat informasi penempatan per bulan (dalam dan luar negeri)</p>	,, , , , , ,, , . %	901.00	39.157%	DISPERINNAKER
				Jumlah pencaker yang terdaftar			2,301.00		DISPERINNAKER

LAPORAN PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	, , , , , , , , .%	225,975,586,403.00	11.811%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD			1,913,214,805,157.00		BPPKAD
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud adalah perhitungan adalah seluruh anak korban kekerasan di Kabupaten/Kota. Korban kekerasan yang belum ditangani/didampingi Kabupaten/Kota juga dimasukkan dalam perhitungan. Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	, , , , , , , , .%	57.00	0.017%	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			340,465.00		DISDUKCAPIL
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	Per 100.000	64.00	9.845	DINSOS PPKB PPPA
				Jumlah penduduk perempuan			650,080.00		DISDUKCAPIL
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan pangan adalah beras dan jagung. Bahan pangan pokok lainnya juga dimasukkan ke dalam perhitungan, apabila ada. Metode perhitungan cadangan pangan harus berdasarkan Permentan No 1 tahun 2018 Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	, , , , , , , , .%	207,179.00	181.846	DISTAN PANGAN
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten			113,931.00		DISTAN PANGAN
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi adalah luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi. Yang dimaksud dengan luas tanah yang diberikan izin lokasi adalah luas tanah yang telah diterbitkan izin lokasinya. Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat, luas tanah dan jenis usaha. 	, , , , , , , , .%	893,802.00	100.000%	DPMPTSP
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi			m2		893,802.00
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum selesai tepat waktu adalah luas tanah untuk kepentingan umum yang telah diperoleh sesuai dengan jangka waktu izin lokasi/penetapan lokasi. Yang dimaksud dengan luas pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah luas tanah yang sesuai dengan dokumen perencanaan pengadaan tanah Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	, , , , , , , , .%	29.00	131.818%	DPUPR
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			22.00		DPUPR

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD		
							Elemen data				
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , .%	893,802.00	100.000%	DPMPTSP		
				Luas izin lokasi yang diterbitkan			893,802.00		DPMPTSP		
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan tanah objek landreform adalah tanah yang dikuasai negara yang akan didistribusikan kepada petani penggarap <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan tanah kelebihan maksimum adalah tanah yang melebihi batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau keluarga <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan tanah absentee adalah tanah pertanian yang pemilikinya bertempat tinggal di luar kecamatan letak tanah tersebut dan/atau kecamatan letak tanah tidak berbatasan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang memuat informasi lokasi/alamat penerima,	,, , , , , ,, , , .%	0.00	0.000%	DPUPR		
				Jumlah penerima tanah obyek landreform			0.00		DPUPR		
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	<input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , .%	0.00	0.000%	DPUPR		
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			0.00		DPUPR		
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas. <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan mediasi adalah cara penyelesaian sengketa dan konflik melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , .%	3.00	100.000%	BAGIAN PEMERINTAHAN		
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			3.00				
		11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , .%	71.41	71.41	DLH
						Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)			51.54		DLH
Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)	91.68					DLH					
Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)	68.05					DLH					

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,,%	365,160.60	38.185%	DLH
				Total vol timbunan sampah Kabupaten			956,300.00		DLH
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	☑ Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan ☑ Yang dimaksud dengan izin pplh (perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,,%	16.00	40.000%	DLH
				Jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			40.00		DLH
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,,%	967,137.00	98.178%	DISDUKCAPIL
				Jumlah penduduk wajib KTP-el			985,089.00		DISDUKCAPIL
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	☑ Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kab ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,,%	259,177.00	76.124%	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0-17 tahun			340,465.00		DISDUKCAPIL
		62	Kepemilikan Akte Kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,,%	334,464.00	92.749%	DISDUKCAPIL
				Jumlah anak usia 0-18 tahun			360,612.00		DISDUKCAPIL
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	☑ Yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,,%	7.00	14.583%	DISDUKCAPIL		
		Jumlah OPD			48.00		BAGIAN ORGANISASI		

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD	
							Elemen data			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	<p>☑ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa</p> <p>☑ 5 (lima) Klasifikasi Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun :</p> <p>1. Desa Mandiri atau Desa Sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya, kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.</p> <p>2. Desa Maju atau Desa Pra-Sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.</p> <p>3. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.</p> <p>4. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.</p> <p>5. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak mampu mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , ,, , .%	10.00	58.824%	DISPERMADES	
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		17.00	DISPERMADES			
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun		<p>☑ Yang dimaksud dengan Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi desa</p> <p>☑ Desa dengan status Desa Maju pada awal tahun pelaporan juga dimasukkan ke dalam perhitungan</p> <p>☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , ,, , .%	235.00	101.732%	DISPERMADES
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)			231.00	DISPERMADES		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	5 Σ ASFR	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		2.14	2.14	DINSOS PPKB PPPA	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , ,, , .%	132,236.00	64.638%	DINSOS PPKB PPPA	
				Jumlah Pasangan Usia Subur		204,578.00	DINSOS PPKB PPPA			
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , ,, , .%	36,743.00	17.960%	DINSOS PPKB PPPA	
				Jumlah Pasangan Usia Subur		204,578.00	DINSOS PPKB PPPA			

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	<p>IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)</p> <p>Keterangan:</p> <p>IK1 (Angkutan Jalan)</p> <p>Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP</p> <p>Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <p>Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil</p> <p>Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p> <p>Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:</p> <p>1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)</p> <p>2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</p> <p>3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</p> <p>4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</p> <p>Bobot Trayek atau Lintas:</p> <p>a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1</p> <p>b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot =0.8</p> <p>c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5</p> <p>Keterangan :</p> <p>Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat trayek angkutan darat dan angkutan</p>		45.67	45.67	DISHUB
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		NA	NA	DISHUB
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , %	48.00	100.000%	DISKOMINFO
				Jumlah OPD			48.00		DISKOMINFO

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD				
							Elemen data						
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	<p>☒ Yang dimaksud dengan layanan publik yang diselenggarakan secara online adalah layanan publik berbasis elektronik yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan layanan publik terintegrasi adalah layanan yang prosesnya saling terhubung dan menyatu ke dalam beberapa layanan SPBE lainnya ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dengan memuat nama-nama jenis layanan publik</p>	,, , , , ,, , .%	18.00	100.000%	DISKOMINFO				
				Jumlah Layanan Publik			18.00		DISKOMINFO				
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten		<p>☒ Jumlah penduduk yang dimaksud adalah penduduk usia 17 tahun keatas</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , ,, , .%		970,579.00	100.000%	DISKOMINFO		
				Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)					970,579.00		DISDUKCAPIL		
		17	Koperasi dan UKM	74		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset		☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , ,, , .%	151.00	34.793%	DISDAGKOP UKM
							Jumlah seluruh koperasi				434.00		DISDAGKOP UKM
75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha			Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	<p>☒ Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.</p> <p>☒ Yang dimaksud dengan usaha mikro yang menjadi wirausaha adalah pelaku usaha mikro yang telah mendaftarkan usahanyadan telah mendapatkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha)</p>	,, , , , ,, , .%	99.00	0.093%		DISDAGKOP UKM			
				Jumlah usaha mikro keseluruhan			106,637.00			DISDAGKOP UKM			
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten	<p>☒ Yang dimaksud jumlah investasi adalah jumlah proyek investasi di kabupaten/kota baik PMDN dan PMA</p> <p>☒ Jumlah PMDN dan PMA untuk disebutkan sebagai keterangan</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci dalam satuan Rupiah</p>	,, , , , ,, , .%	312,884,060,000.00	12.565%	DPMPTSP				
				Jumlah investasi tahun n di			2,803,105,219,670.00		DPMPTSP				
				Jumlah investasi tahun n-1 di			2,490,221,159,670.00		DPMPTSP				
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	<p>☒ Yang dimaksud dengan pemuda yang berwirausaha adalah pemuda (16-30 tahun) yang terdaftar sebagai pelaku usaha di Lembaga Perizinan Usaha</p> <p>☒ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK</p> <p>☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	,, , , , ,, , .%	26.00	0.009%	DISPARPORA				
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten			299,270.00		DISDUKCAPIL				

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. ☒ Organisasi kepemudaan sekurang-kurangnya memiliki : keanggotaan, kepengurusan, tata laksana kesekretariatan dan keuangan dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ☒ Organisasi sosial kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. ☒ Jumlah pemuda 16-30 tahun berdasarkan data kependudukan yang terdaftar pada SIAK ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		26,000.00	8.688%	DISPARPORA
			Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten				299,270.00		DISDUKCAPIL
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Dibuat dalam daftar terpisah (emas, perak, perunggu) ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	20	20.00	20.00	DISPARPORA
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis ☒ Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral ☒ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,,,,, ,,,%	48.00	100.000%	DISKOMINFO
			Jumlah OPD				48.00		DISKOMINFO
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis ☒ Data statistik yang dimaksud adalah data statistik sektoral ☒ Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan atau unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. ☒ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,,,,, ,,,%	48.00	100.000%	DISKOMINFO
			Jumlah OPD				48.00		DISKOMINFO
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	<ul style="list-style-type: none"> ☒ Yang dimaksud dengan Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah dilihat dari Indeks KAMI. ☒ Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi ☒ Indeks KAMI menilai 5 area pengamanan informasi yaitu <ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola keamanan informasi 2. Pengelolaan resiko keamanan informasi 3. Kerangka kerja keamanan informasi 4. Pengelolaan aset informasi 5. Teknologi dan keamanan informasi 		0.00	0.000%	DISKOMINFO

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
				Jumlah area penilaian	<p>5. Teknologi dan keamanan informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indeks KAMI dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota secara self assessment untuk kemudian diverifikasi oleh BSSN <input checked="" type="checkbox"/> Hasil verifikasi dapat berupa laporan hasil verifikasi BSSN atau sertifikat indeks KAMI yang berlaku satu tahun <input checked="" type="checkbox"/> Daerah yang belum pernah melaksanakan/mengukur Indeks KAMI dapat membuat surat keterangan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		0.00		DISKOMINFO
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait secara terperinci yang tersebar di kecamatan pada Kab 	,, , , , , ,, , , %	1,030.00	100.000%	DISDIKBUD
				Jumlah cagar budaya yang terdata			1,030.00		DISDIKBUD
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat diukur menggunakan metode survey, melalui kajian dengan mengukur sejumlah variabel utama seperti: frekuensi membaca per minggu, lama membaca per hari dan jumlah buku yang ditamatkan per tahun <input checked="" type="checkbox"/> Metode survey tersebut di atas dapat dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut : <input checked="" type="checkbox"/> Penetapan sampel (5% dari total populasi usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun) <input checked="" type="checkbox"/> Menghitung tingkat kegemaran membaca masyarakat melalui pengukuran indikator sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> 1. Indikator Frekuensi Membaca 2. Indikator Durasi Membaca 3. Indikator Jumlah Bahan Bacaan <input checked="" type="checkbox"/> Melakukan analisis statistik terhadap 3 indikator di atas <input checked="" type="checkbox"/> Daerah yang belum melaksanakan survei untuk mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat dapat menyertakan surat keterangan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 		45.90	45.90	DISPUSPA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	<p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)</p> <p>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat =</p> $\frac{\sum UPLM}{U_{ALM}} \times 100$ <p>ALM</p>	<p>UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan</p> <p>UPLM 2 = Ketercukupan koleksi</p> <p>UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan</p> <p>UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan</p> <p>UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP</p> <p>UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan</p> <p>UPLM 7 = Anggota perpustakaan</p> <p>Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat diambil dari Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional</p> <p>☐ Bagi Daerah yang belum memiliki nilai indeks pembangunan literasi masyarakat, maka dapat memberikan surat keterangan</p> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>		238.67	238.67	DISPUSPA
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip</p> <p>a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip</p> <p>s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik</p> <p>j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p>	<p>☐ Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.</p> <p>☐ Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun</p> <p>☐ Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau Lembaga kearsipan</p> <p>☐ Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) adalah sistem informasi arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI yang menggunakan sarana JIKN</p> <p>☐ Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI</p> <p>☐ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait</p>	%	67.11	67.11	DISPUSPA
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$	<p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	%	1,025.00	1,025.00	DISPUSPA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
25	Kelautan dan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	☑ Sumber data utama menggunakan One Data KPP ☑ Apabila data dari One Data KKP belum tersedia atau belum terupdate, dapat menggunakan data riil dari Perangkat Daerah yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Ton	20,585.39	20,585.39	DISPETERIKAN
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n- Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1	☑ Data yang digunakan adalah angka total wisatawan mancanegara yang masuk ke Kabupaten/Kota. Kebangsaan wisatawan mancanegara dimasukkan sebagai keterangan tambahan ☑ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		-0.98	-97.606%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan tahun n		902.00	DISPARPORA		
				Jumlah wisatawan tahun n-1		37,681.00	DISPARPORA		
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun n - Jumlah wisatawan tahun n-1)/Jumlah wisatawan tahun n-1	☑ Data yang digunakan adalah angka total wisatawan nusantara yang masuk ke Kabupaten/Kota. ☑ Yang dimaksud dengan wisatawan adalah setiap pengunjung yang melakukan perjalanan ke suatu tempat kurang dari satu tahun didorong untuk oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur atau tujuan pribadi lainnya selain untuk bekerja) yang tinggal paling sedikit 24 jam ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		-0.39	-38.591%	DISPARPORA
				Jumlah wisatawan tahun n		871,150.00	DISPARPORA		
				Jumlah wisatawan tahun n-1		1,418,608.00	DISPARPORA		
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	☑ Yang dimaksud dengan akomodasi meliputi hotel, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan caravan, apartemen servis, vila, kondominium hotel, hunian wisata senior/lanjut usia dan rumah wisata. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , .%	50,482.00	29.883%	DISPARPORA
				Jumlah kamar yang tersedia		168,933.00	DISPARPORA		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata (dalam satuan rupiah)	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Rupiah	1,366,000,000.00	4.00%	Bappeda dan Litbangda
				Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)		Rupiah	34,176,310,000.00		Bappeda dan Litbangda
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Realisasi PAD dari Sektor Pariwisata Tahun n	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , , .%	1,196,863,960.00	0.32%	BPPKAD
				Realisasi PAD Tahun n		375,381,255,028.00	BPPKAD		
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	☑ Yang dimaksud dengan pertanian pangan adalah beras dan bahan pangan pokok lainnya ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Ton/Ha	431,123.34	738.061	DISTAN PANGAN
				Luas Panen (ha)			58,413.00		DISTAN PANGAN

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	%		0.000%	DISPETERIKAN
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t			0.00		DISPETERIKAN
				Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun t-1			0.00		DISPETERIKAN
28	Kehutanan	96		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , %	0.00	0.000%	DISTAN PANGAN
				Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga			0.00	0.000%	
				Pemulihan ekosistem pada Tahura			0.00	0.000%	
				Menurunnya gangguan kawasan Tahura			0.00	0.000%	
29	ESDM	97	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin	☑ Izin pemanfaatan panas bumi yang dimaksud adalah izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam kabupaten/kota ☑ Daerah yang tidak memiliki panas bumi dapat memberikan surat keterangan	, , , , , %	0.00	0.000%	DPUPR
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi			☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		0.00
30	Perdagangan	98	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	☑ Yang dimaksud dengan pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertical maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang		5,772.00	5.413%	DPMPSTP
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten			☑ Definisi toko swalayan sama dengan toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan) menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store hypermarket atau grosir yang berbentuk perkulakan ☑ Yang dimasukkan ke dalam perhitungan adalah seluruh toko modern/swalayan ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		106,637.00
		99	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	☑ Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian yang ditetapkan secara manual dan atau melalui sistem elektronik. ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , %	14,974.00	42.976%	DISTAN PANGAN
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)		34,843.00	DISTAN PANGAN						

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		100	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Yang dimaksud dengan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UU 2/1981 tentang Metrologi Legal ☑ Yang dimaksud dengan Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai ☑ Yang dimaksud dengan Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera ☑ Data yang dimasukkan seluruh data tera sah masih berlaku pada tahun pelaporan ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , .%	9,194.00	43.388%	DISDAGKOP UKM
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten			21,190.00		
31	Perindustrian	101	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun n - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun n-1) / Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun n-1)	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Klasifikasi Usaha Industri berdasarkan Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi (Permenperin 64/2016) ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , .%	1,848.00	8.408%	DISPERINNAKER
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n			23,744.00		DISPERINNAKER
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1			21,979.00		DISPERINNAKER
		102	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan	Jumlah Target Jenis Industri Prioritas kabupaten yang ditetapkan	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ☑ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait 	,, , , , , ,, , .%	50.00	50.000%	DISPERINNAKER
				Jumlah Realisasi Jenis Industri Prioritas kabupaten			100.00		DISPERINNAKER
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , .%	59.00	29.648%	DISPERINNAKER
Jumlah izin yang dikeluarkan	199.00			DISPERINNAKER					

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,.%	0.00	0.000%	DISPERINNAKER
							0.00		DISPERINNAKER
		105	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,,,,, ,,.%	0.00	0.000%	DISPERINNAKER
							0.00		DISPERINNAKER
		106	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak menyampaikan informasi industri (0%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	☑ Informasi Industri adalah hasil pengolahan data industri dan data kawasan industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya ☑ Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		100.00	100.00	DISPERINNAKER

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
32	Transmigrasi	107		1.Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya 2.Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya 3.Jumlah satuan pemukiman yang dibina			0.00		DISPERINNAKER

LAMPIRAN 2.2.3. INDIKATOR KINERJA KUNCI UNTUK FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
1	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	<input type="checkbox"/> Seluruh komponen belanja pegawai (gaji, tunjangan, honorarium) di luar guru dan tenaga kesehatan <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , %	221,269,009,376.00	9.387%	BPPKAD
				Jumlah APBD (realisasi)			2,357,261,319,314.00		BPPKAD
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	<input type="checkbox"/> Yang benar adalah PDRB Non Migas (total seluruh PDRB dikurangi sektor pertambangan migas dan sektor industri pengolahan migas). <input type="checkbox"/> Yang digunakan adalah PDRB Harga Berlaku <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , %	375,381,255,028.00	1.514%	BPPKAD
				Jumlah PDRB non migas			24,796,090,000,000.00		BPPKAD
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	<input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Level	3.00	3.00	INSPEKTORAT
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	<input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	Level	3.00	3.00	INSPEKTORAT
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures (realiasi)	<input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal <input type="checkbox"/> Angka yang diambil adalah angka realisasi <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , %	1,327,362,019,359.00	56.309%	BPPKAD
Jumlah belanja APBD (realisasi)	2,357,261,319,314.00			BPPKAD					
6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	<input type="checkbox"/> Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	WTP	5.00	5.00	INSPEKTORAT		
				WDP	5.00	5.00	INSPEKTORAT		
				TW	0.00	0.00	INSPEKTORAT		
				TMP	0.00	0.00	INSPEKTORAT		
2	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	<input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan kontrak infrastruktur adalah kontrak proyek konstruksi infrastruktur <input type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah proyek konstruksi yang ditandatangani pada kuartal pertama (Januari-Maret) akan tetapi sampai dengan akhir tahun pelaporan belum selesai pembangunannya <input type="checkbox"/> Kontrak konstruksi dengan nilai besar adalah kontrak konstruksi dengan nilai di atas 50 Milyar Rupiah <input type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , %	0.00	0.00%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n			1,339.00		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD	CAPAIAN	SKPD
							Elemen data		
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	<input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan metode kompetitif dan non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	118.00	9.664%	BAGIAN PENGADAAN
				Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif			1,221.00		BAGIAN PENGADAAN
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	<input checked="" type="checkbox"/> Yang dimaksud dengan belanja langsung adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal <input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada <input checked="" type="checkbox"/> Angka yang diambil adalah angka realisasi <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	419,886,121,406.00	21.947%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
				Total belanja langsung			1,913,214,805,157.00		BPPKAD
3	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Perguruan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	6,261.00	531.043%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			1,179.00		BKPPD
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	<input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	541.00	21.815%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			2,480.00		BKPPD
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	<input checked="" type="checkbox"/> Cakupan perhitungan adalah seluruh ASN di seluruh perangkat daerah di luar guru dan tenaga kesehatan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	296.00	15.653%	BKPPD
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			1,891.00		BKPPD
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus <input checked="" type="checkbox"/> Total belanja APBD adalah total anggaran belanja APBD sebelum perubahan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	2,357,261,319,314.00	6.6929%	BPPKAD
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)			2,526,347,858,335.00		BPPKAD
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai absolut yang dimaksud adalah tidak ada angka yang bernilai minus <input checked="" type="checkbox"/> Total PAD dalam APBD adalah total anggaran PAD dalam APBD sebelum perubahan <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	,, , , , , ,, , . %	375,381,255,028.00	28.7988%	BPPKAD
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)			291,447,681,781.00		BPPKAD

No.	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	KETERANGAN DATA DUKUNG	SATUAN	Data LPPD		CAPAIAN	SKPD
							Elemen data			
		15	Assets management	Apakah ada daftar asset tetap?	<input checked="" type="checkbox"/> Cakupan Perhitungan adalah seluruh perangkat daerah	Jumlah	1.00	100.00%	BPPKAD	
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset	<input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		1.00	100.00%	BPPKAD	
				Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)			1.00	100.00%	BPPKAD	
		16	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	<input checked="" type="checkbox"/> Yang digunakan SiLPA dan total belanja APBD tahun sebelumnya	, , , , , %	356,337,607,742.00	15.464%	BPPKAD	
Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)	<input checked="" type="checkbox"/> Angka yang diambil adalah angka realisasi <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				2,304,375,917,161.00	BPPKAD				
5	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	<input checked="" type="checkbox"/> Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.	, , , , , , , , . %	540,599,605.00	100.995%	BPPKAD	
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	<input checked="" type="checkbox"/> Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait		535,276,145.00		BPPKAD	
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	<input checked="" type="checkbox"/> Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD <input checked="" type="checkbox"/> Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait	, , , , , , , , . %	12.00	100.00%	BPPKAD	
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci			12.00		BPPKAD	

Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2021



01. Penghargaan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Keuangan



02. Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2021 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)



03. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2021



04. Penghargaan Gerakan Menuju Smart City 2021 dimensi Smart Environment-Program Bank Pohon dari Kementerian Kominfo



05. Penghargaan dari Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) atas keberhasilannya menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN Tahun 2021 dengan predikat “Baik”

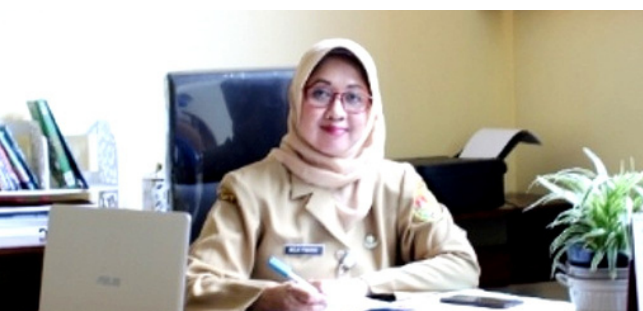


06. Penghargaan kearsipan dengan predikat 'sangat memuaskan' dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2021



07. Penghargaan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Terbaik Se-Jawa Tengah oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispuspa) Kabupaten Magelang



08. Penghargaan Perpustakaan Kabupaten/Kota Terbaik dalam Implementasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2021 dari Perpustakaan Nasional RI dan BAPPEMAS RI



09. Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dengan predikat finalis

Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Magelang Tahun 2021



10. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Tahun 2021 Kategori RSUD Kabupaten/Kota “Menuju Informatif” oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah



11. Penghargaan Kategori Iklan Layanan Masyarakat dari RRI pada Swara Kencana Tahun 2021 oleh Gemilang FM Radio Magelang